

**UPAYA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN MALANG
(Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Selatan
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh
Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

MUHAMMAD ARIEF RACHMAN

NIM. 0510313092



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

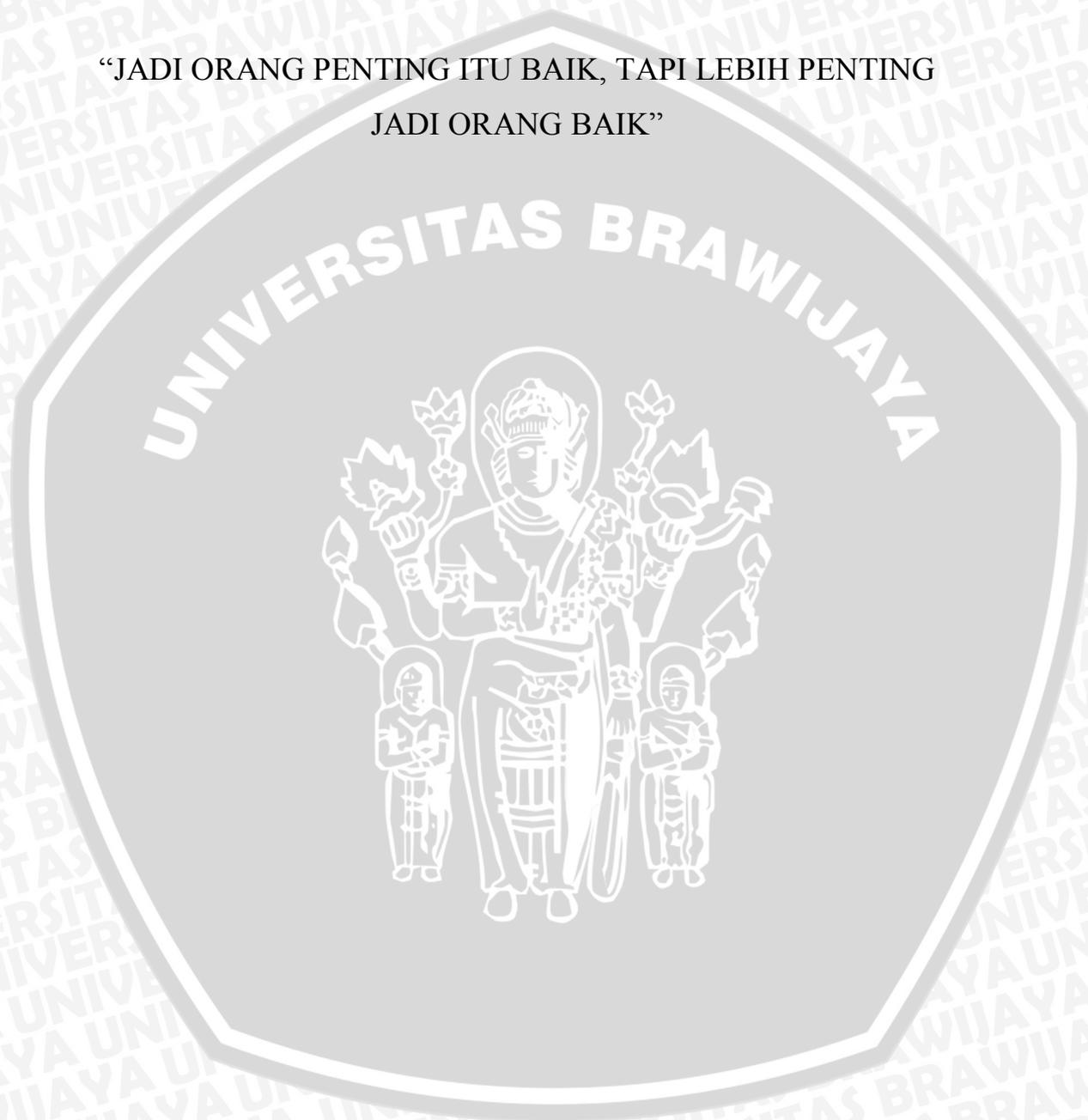
MALANG

2009

MOTTO

“LAKUKAN YANG TERBAIK DENGAN KERENDAHAN HATI”

“JADI ORANG PENTING ITU BAIK, TAPI LEBIH PENTING
JADI ORANG BAIK”



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)



Malang, Oktober 2009

Nama : Muhammad Arief R

NIM : 0510313092

RINGKASAN

Muhammad Arief R, 2009. **Upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Malang (Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kawasan Selatan Kabupaten Malang)**. Skripsi. Konsentrasi Administrasi Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. **Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Abdul Hakim M.Si, (2). Drs. Riyanto, M.Hum, 133 Halaman + xiii**

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari agenda ketiga RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yaitu agenda kesejahteraan rakyat yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan umum. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur di daerah diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan umum, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga ketersediaannya yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Malang adalah daerah terluas di Propinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Serta kaya akan berbagai potensi seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan lain-lain, yang sangat potensial sehingga diperlukannya akses poin prasarana fisik sebagai penunjang pembangunan dan perkembangan daerah. Oleh karena itu dilaksanakannya pengembangan wilayah di kawasan selatan Kabupaten Malang sebagai upaya pemerintah daerah untuk menunjang akses poin yang berfungsi untuk membuka jalur transportasi atau sebagai *land access*.

Pengembangan wilayah pada kawasan selatan Kabupaten Malang digerakkan karena adanya ketimpangan permasalahan pembangunan antara bagian utara Kabupaten Malang dengan bagian selatan Kabupaten Malang. Dimana pada bagian utara Kabupaten Malang, pembangunan-pembangunan infrastruktur lebih condong ke bagian utara Kabupaten Malang. Seiring dengan berjalannya pembangunan di bagian utara Kabupaten Malang.

Dalam perspektif jangka panjang, suatu pengembangan wilayah pada wilayah selatan di Kabupaten Malang harus menjadi suatu upaya untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dan lokal (*local economic development*), sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam hal ini sangat diharapkan peran pemerintah daerah serta organisasi-organisasi masyarakat setempat dapat menumbuhkan kegiatan usaha dan lapangan kerja dengan memobilisasi sumber daya manusia, alam dan kelembagaan secara lokal. Sehingga wilayah selatan Kabupaten Malang pembangunannya bisa seimbang dengan bagian wilayah lain di Kabupaten Malang.

Dalam rangka pengembangan wilayah yang meliputi potensi ekonomi dan sosial budaya di wilayah Malang Selatan dibutuhkan prasarana penghubung yang cukup memadai. Untuk mengatasi problema di atas Pemerintah Kabupaten Malang melimpahkan kewenangan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang untuk melaksanakan pengembangan wilayah guna mendukung pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang yang sering juga disebut dengan Jalan Lintas Selatan.

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang, serta kendala-kendala yang bersifat internal dan eksternal dari upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pengembangan wilayah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dan melakukan observasi serta mencari dokumen-dokumen yang terkait. Fokus dari penelitian ini antara lain 1. Upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang, dilihat dari proses pengembangan wilayah: a. Tahap Persiapan. b. Tahap Perencanaan. 2. Kendala yang dihadapi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang: a. Faktor Internal. b. Faktor Eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian ini pelaksanaan dari upaya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di wilayah selatan Kabupaten Malang berjalan dengan baik, pada tahapan persiapan, terdapat skenario dalam pengembangan wilayah. Skenario dalam pengembangan wilayah dibagi menjadi tiga skenario pengembangan, yaitu: skenario optimis, pesimis dan moderat. Pada tahapan perencanaan, rencana dari pengembangan wilayah di sepanjang jalan lintas selatan mencakup rencana pengembangan yang meliputi arahan pengembangan wilayah secara umum, antara lain: pemukiman, pertanian dan perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, serta pengembangan fasilitas dan utilitas. Selain itu terdapat kendala internal dan eksternal dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang. Adapun kendala internal yaitu, Rendahnya kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dipergunakan untuk pengembangan wilayah dalam penertiban izin lokasi pembangunan. Dan Keterbatasan anggaran. Sedangkan kendala eksternal yang ada berupa, pertama, pembebasan tanah di sepanjang jalan lintas selatan. Kedua, hampir sebagian besar lahan yang dilalui proyek pembangunan jalan lintas selatan ini merupakan milik dari Perhutani.

Untuk keberhasilan kegiatan pengembangan wilayah ini maka perlu diperhatikan: 1. wilayah dari pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang yang sebagian besar berupa lahan hutan. Sebagai daerah resapan air maka tetap harus mendapat prioritas penting dan juga perlunya diperhatikan keseimbangan lingkungan hidup pada pengembangan wilayah di kawasan selatan Kabupaten Malang. 2. Perlu adanya kerjasama yang baik antara Bappeda Kabupaten Malang dengan Perhutani, dimana wilayah yang dilalui proyek jalan lintas selatan ini sebagian besar lahan hutan milik perhutani. Oleh karena itu perlunya komunikasi yang kuat. 3. Selain itu perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

SUMMARY

Muhammad Arief R, 2009. **The Effort Planning Development Region Of Committee Malang Regency In Territory Development (Study At Establishment South Past Way Infrastructure On South Region Malang Regency)**. Skripsi. Konsentrasi Administrasi Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. **Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Abdul Hakim M.Si, (2). Drs. Riyanto, M.Hum, 133 Halaman + xiii**

Infrastructure development is being part from third journal RPJMN is public welfare journal which one is important to do for public needs for public service. As integral part from national development, regional infrastructure development will be held to fill necessity facility of public service, by from quantity or quality, so that an available facility of public service can raise up the welfare and pushing the region economic growth. Malang regency are wide region in east java province after Banyuwangi regency and rich from all kind potency like tourism, agriculture, plantation, mining, fishery and etc, which are more potentially so that need point access physic development support as development and to develop region. So must has to do Territory Development on South Region Malang Regency as well effort local government for support point access is function to open the transportation line or land access.

Territory development on south region Malang regency movement by lameness problem development between north and south regency of Malang, which are at north zone Malang regency, infrastructure developments is more leaning than south zone Malang regency.

In long term perspective, territory development on south region Malang regency must became effort for growing up local economic development, so that they can growth and develop according to self. In this case local government act is more expected also organizations local society can create business activities and works opportunity with mobilize human resource, nature resource and local institution. So that south region Malang regency can well balance the development with all part region in Malang regency.

On territory development overhelm economic and social culture potency needed physical connection as well. To surpass above the problem, local government give the authority to Bappeda Malang regency (Bappekab) to handle and support establishment south past way infrastructure on territory development in Malang regency that always mentioned with south past way (jalan lintas selatan).

Based on above statement this research purpose to know and describe also analyzing the effort planning development region of committee Malang regency in territory development at establishment south past way infrastructure on south region Malang regency, also obstacle has internal or external character from the effort Bappeda Malang regency in territory development.

This research use qualitative research with description research by means interview, collect data, and doing observation also collect documents. Focus from this research are: 1. The effort planning development region of committee Malang regency in territory development at establishment south past way infrastructure on

south region Malang regency, viewed from the process territory: a. Prepare. b. planning. 2. The obstacles that face it by planning development region of committee Malang regency in territory development at establishment south past way infrastructure on south region Malang regency: a. Internal Factor. b. External Factor.

Based on this research the result from the effort planning development region of committee Malang regency in territory development at establishment south past way infrastructure on south region Malang regency its very well, in the part of prepare, found scenario on regional development. Scenario on regional development divisible in third scenario development, that is: optimist scenario, pessimist, and moderate. In the part of planning, scheme from territory development on south past way include plan territory development are includes general development, which are: settlement, agriculture, plantation, fishery, mining, industrial, tourism, education, healthy, trade and service, also utility develop. In other case, found it internal and external obstacles on regional development at establishment south past way infrastructure on south region Malang regency. Concerning internal obstacle are, lower quality spatial planning regional Malang regency, and limited budget. And then external obstacle are, first, liberation land in south past way. Second, almost overall land south past way project is mine of perhutani.

For the goal of this regional development requirement: 1. Regional from regional development on south past way infrastructure on south region Malang regency overall is forest land, as land of water soak must still got first priority and need to keep environment balance on regional development on south region Malang regency. 2. Need good team work between Bappeda Malang regency with Perhutani, which are overall land is mine of Perhutani, and also needed good and strong communications. 3. Needed good quality of human resources.



KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

Judul skripsi ini adalah **“Upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Malang (Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Selatan Kabupaten Malang)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa keterlibatan dari berbagai pihak yang berkenan membantu memberikan pemikiran, kritik, dan saran-saran, karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Drs. Mudjiono, dan Ibu Dyahwati Cahyaningsih, kakakku Muhammad Husni Thamrin, serta adikku Muhammad Thoriq Rusydian, dan juga Dwi Kurniawati terima kasih atas doa dan dukungan kalian baik moral maupun materil.
2. Bapak Dr. Abdul Hakim M.Si selaku Komisi pembimbing I atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Riyanto, M.Hum selaku Komisi pembimbing II atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik atas segala ilmu yang diberikan.
6. Pemerintah Kabupaten Malang dan Bappeda Kabupaten Malang serta masyarakat Sumbermanjing atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Teman-teman Kelas D angkatan 2005, terima kasih atas segala bantuan, kenangan, dan pengalamannya.
8. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2003, 2004, 2005, terima kasih atas segala kenangannya

9. Teman-teman Sawojajar Bumi Permai yang telah mendukung dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
10. Rekan dan sahabat dari Lolyta ATDT, Limbang Nidiasmoro, Wahyudi Prima Hadi, Alvin Firdaus yang juga turut berpartisipasi mendukung dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
11. Rekan dan sahabat alumni MTsN Malang 1, SMU Negeri 10 Malang yang selalu member dukungan.
12. Dan semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang terbaik namun apabila masih kurang sempurna penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari ALLAH SWT. Karena penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Amin

Terima Kasih



Malang, Oktober 2009

(Muhammad Arief R.)

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
GLOSSARY	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Pengembangan Wilayah	
1. Konsep Pengembangan Wilayah	11
2. Tujuan Pengembangan Wilayah	18
B Perencanaan Pembangunan Daerah	
1. Definisi Perencanaan	19
2. Karakteristik Perencanaan	22
3. Asas-asas Perencanaan	22
4. Arti Penting Perencanaan	23
5. Ciri-ciri Perencanaan yang Baik	25
6. Definisi Pembangunan	25
7. Perencanaan Pembangunan	28
8. Perencanaan Pembangunan Daerah	28
9. Pembangunan Berkelanjutan	32

C	Rencana Tata Ruang Wilayah	
1.	Definisi Rencana Tata Ruang Wilayah.....	33
2.	Pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah.....	35
3.	Tujuan dan Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A	Jenis Penelitian.....	37
B	Fokus Penelitian	37
C	Lokasi dan Situs Penelitian.....	38
D	Jenis dan Sumber Data	39
E	Teknik Pengumpulan Data	40
F	Instrumen Penelitian.....	41
G	Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1.	Gambaran Umum Kabupaten Malang	
a.	Geografi	43
b.	Pemerintahan.....	43
c.	Kependudukan.....	44
2.	Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang	
a.	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang	46
b.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.....	47
c.	Tujuan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.....	49
d.	Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.....	50
3.	Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Selatan Kabupaten Malang (Jalan Lintas Selatan)	54

B Penyajian Data Fokus	
1. Upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Wilayah Pada jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang	58
a. Tahap Persiapan.....	60
b. Tahap Perencanaan	69
2. Kendala yang dihadapi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Wilayah Pada jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang	107
a. Kendala Internal	107
b. Kendala Eksternal.....	108
C Analisis Dan Interpretasi	
1. Upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Wilayah Pada jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang	110
2. Kendala yang dihadapi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang	121
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A Kesimpulan.....	125
B Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malang	45
2.	Desa-Desa di Kabupaten Malang Yang Dilalui Jalan Lintas Selatan	54
3.	Skenario Pengembangan Kawasan Sekitar Jalan Lintas Selatan	62
4.	Tabel Rencana Pengembangan Perikanan	73
5.	Tabel Rencana Pengembangan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	88
6.	Tabel Rencana Pengembangan Kebutuhan Perumahan	93
7.	Tabel Rencana Pengembangan Kebutuhan Listrik	95
8.	Tabel Rencana Pengembangan Kebutuhan Air Bersih	97
9.	Rencana Pengembangan Kebutuhan Telepon	99

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang	49
2.	Konsep Pengembangan Jalan Lintas Selatan	57



GLOSSARY

No	Istilah Asing	Istilah Indonesia
1.	Backwash and spread effect	Menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya
2.	Buffer zone	Batasan area
3.	Land access	Jalur transportasi
4.	Local economic development	Pembangunan perekonomian wilayah lokal
5.	Multiplier effect	Efek pertumbuhan ganda
6.	Regional development	Perkembangan wilayah
7.	Regional planning	Perencanaan wilayah keseluruhan
8.	Rural – urban linkages	Keterkaitan desa – kota dalam pengembangan wilayah
9.	Social Overhead Capital	Kebutuhan utama masyarakat
10.	Sustainable development	Pembangunan berkelanjutan
11.	Spatial diffusions process	Proses difusi dalam ruang
12.	Spatial process	Perencanaan wilayah fungsional berdasarkan suatu proses dalam ruang
13.	Spatial Policy for Equitable Growth	Kebijaksanaan penataan ruang untuk pertumbuhan yang mampu menciptakan pemerataan
14.	Unbalanced development	Perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar dan terencana yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation-Building*)” (Siagian, 2005:4).

Dalam pembangunan, perencanaan merupakan komponen yang sangat penting. Hal ini karena perencanaan adalah bagian dari pengambilan keputusan. Jenis-jenis perencanaan dapat dilihat dari berbagai sisi. Ada yang melihat dari sudut visi perencanaan, ada yang melihat dari institusi yang dilibatkan dan wewenang dari institusi yang terlibat. Ada yang melihat dari sudut pengelolaan atau koordinasi antar berbagai unsur yang telah disebutkan. Ada yang mengkategorikannya sebagai tipe-tipe perencanaan (Tarigan, 2005:13).

Jenis atau tipe perencanaan dapat berbeda diantara satu Negara dengan Negara lain, juga bahkan diantara satu sektor dengan sektor lain dalam satu Negara. Hal ini berarti dalam satu Negara akan ada kombinasi dari berbagai jenis perencanaan tergantung kondisi lingkungan dimana perencanaan itu diterapkan.

Glasson (1974) dalam Tarigan (2005:14), menyebutkan tipe-tipe perencanaan adalah:

1. *Physical planning and economic planning.*
2. *Allocative and innovative planning.*
3. *Multi on single objective planning.*
4. *Indicative or imperative planning.*

Di Indonesia juga dikenal jenis *top-down and bottom up planning*, *vertical and Horizontal planning*, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali.

Sedangkan Infrastruktur adalah bentuk prasarana fisik sebagai perwujudan dari pembangunan yang berlangsung. Contoh dari infrastruktur adalah: gedung, jalan raya, bandara, pelabuhan, kendaraan, dan lain-lain.

Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dsb., yang merupakan *Social Overhead Capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan. Di samping itu, dengan ketersediaan infrastruktur kota, maka akan mendukung peran kota sebagai pusat pelayanan jasa distribusi, sebagai penggerak kegiatan ekonomi, dan sebagai sumber kehidupan berbagai kelompok masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari agenda ketiga RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yaitu agenda kesejahteraan rakyat yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan umum. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur di daerah diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan umum, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga ketersediaannya yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah, memiliki kewenangan yang dapat memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat penting, terutama sebagai:

- (1) tulang punggung produksi dan pola distribusi barang dan penumpang,
- (2) perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- (3) pemicu pembangunan suatu kawasan,
- (4) pembuka keterisolasian suatu wilayah, dan
- (5) prasyarat kesuksesan pembangunan di berbagai sektor.

Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk lebih

produktif lagi dalam melakukan kegiatannya. Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting sebagai tulang punggung dan urat nadi perekonomian, sekaligus sebagai perekat berbagai fungsi dan elemen yang dinamis di masyarakat. Sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah, pemerintah daerah telah dilengkapi dengan berbagai kewenangan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia bagi kepentingan pembangunan infrastruktur agar tujuan pembangunan infrastruktur tercapai. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah perlu memaksimalkan perannya dalam menghasilkan infrastruktur sehingga sesuai dengan tujuan pembangunannya, yakni: untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, serta untuk mengangkat harkat dan daya saing bangsa.

Salah satu wujud pembangunan Infrastruktur ataupun pembangunan fisik adalah pembangunan transportasi. Pengertian transportasi berasal dari kata latin, yaitu *Transportare*, dimana *Trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *Portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Unsur pokok transportasi ada empat macam, yaitu : jalan, kendaraan dan alat angkutan, tenaga penggerak dan terminal.

Kabupaten Malang adalah daerah terluas di Propinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Serta kaya akan berbagai potensi seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan lain-lain, yang sangat potensial sehingga diperlukannya akses poin prasarana fisik sebagai penunjang pembangunan dan perkembangan daerah. Oleh karena itu dilaksanakannya pengembangan wilayah di kawasan selatan Kabupaten Malang sebagai upaya pemerintah daerah untuk menunjang akses poin yang berfungsi untuk membuka jalur transportasi atau sebagai *land access*, selain itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan

keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Secara regional, berdasarkan hierarki perencanaan tata ruang kawasan perencanaan merupakan salah satu satuan wilayah pengembangan Malang Raya di Propinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat perkembangan relatif pesat, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta pertambangan dan industri, dimana sektor-sektor tersebut telah memicu perubahan dan perkembangan penggunaan lahan yang berpengaruh pada kondisi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 1996 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Propinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa untuk mendorong perkembangan wilayah selatan Kabupaten Malang yang relatif lamban perkembangannya perlu dilakukan pembangunan jalan lintas selatan. Dengan pembangunan jalan lintas selatan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah dan memacu pertumbuhan wilayah selatan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, upaya pembangunan jalan lintas selatan tersebut perlu diikuti dengan perencanaan pengembangan wilayah yang komprehensif melalui konsep pembangunan yang terintegrasi.

Konsep pembangunan yang terintegrasi tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbul akibat pembangunan infrastruktur, mengingat sebagian besar wilayah selatan merupakan kawasan hutan dan lahan pertanian. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut yang kemungkinan besar akan membuka kawasan hutan (hutan lindung dan hutan produksi) maka dikhawatirkan akan terjadi perubahan yang cukup signifikan dari kawasan hutan menjadi kawasan terbangun. Selain itu akan terjadi dampak positif dan negatif baik terhadap aspek fisik lahan, ekonomi, sosial, budaya dan tata ruang.

Sebagai *starting point* yang terpenting dari pembangunan *integrated* di wilayah selatan adalah kebutuhan akan struktur pemanfaatan dan pengendalian ruang yang serasi dan seimbang sehingga tercapai pengembangan wilayah yang terpadu dengan memanfaatkan seluruh potensi

yang ada. Dalam upaya memacu pertumbuhan wilayah selatan pengembangan wilayah didasarkan pada konsep *Spatial Policy for Equitable Growth*, kebijaksanaan penataan ruang untuk pertumbuhan yang mampu menciptakan pemerataan, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah selatan dengan wilayah lain (*Sectoral and Spatial Linkage*) dan mendorong pertumbuhan pusat-pusat kegiatan (*Growth Pole*).

Wilayah Kabupaten Malang yang dilalui proyek jalan lintas selatan, di antaranya meliputi Kecamatan Ampelgading, Dampit, Donomulyo, Bantur, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Pagak dan Turen, sepanjang 180,80 km. Potensi kawasan Malang selatan cukup besar, baik untuk pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan lain-lain. Pengembangan potensi itu hingga kini masih terkendala oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai, sehingga sulit dijamah masyarakat luar, apalagi wisatawan manca negara. Dengan dilaksanakannya pembangunan jalan lintas selatan yang meliputi wilayah selatan Kabupaten Malang maka akan terbukanya akses poin prasarana fisik sebagai penunjang pembangunan dan perkembangan daerah.

Dari segi institusional maka lembaga yang paling memungkinkan untuk melakukan semua proses perencanaan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, karena lembaga ini yang berusaha untuk menata semua sektor mulai dari merencanakan, merumuskan kebijakan pembangunan yang melibatkan semua pihak hingga suatu pembangunan yang terbaik dapat dicapai, sampai pada penempatan wilayah suatu sektor yang akan didirikan, sehingga nantinya dengan pengaturan yang tepat dapat mengoptimalkan kinerja semua sektor.

Lembaga ini jugalah yang menjembatani terbentuknya suatu pembangunan yang dinamis antara pihak-pihak terkait, yakni pemerintah, masyarakat, pelaku industri, pemilik modal dan stakeholder yang lain. Dengan adanya lembaga ini diharapkan mampu melahirkan pembangunan yang bisa mewakili dan membawa keuntungan bagi semua pihak, khususnya bagi pemerintah setempat adalah terciptanya suatu keadaan pembangunan yang kondusif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten

Malang pada umumnya, dan seluruh lapisan masyarakat pada khususnya. Di tiap propinsi dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang merupakan badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah di dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaannya.

Dalam menjalankan fungsinya, Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan di daerah yang kokoh untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Maka dapat dikatakan bahwa Bappeda merupakan hal yang sangat berperan penting dalam pembangunan dan hal yang menentukan arah kebijaksanaan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pengembangan wilayah pada kawasan selatan Kabupaten Malang digerakkan karena adanya ketimpangan permasalahan pembangunan antara bagian utara Kabupaten Malang dengan bagian selatan Kabupaten Malang. Dimana pada bagian utara Kabupaten Malang, pembangunan-pembangunan infrastruktur lebih condong ke bagian utara Kabupaten Malang. Seiring dengan berjalannya pembangunan di bagian utara Kabupaten Malang, Pemerintah kabupaten Malang mulai memprioritaskan pembangunan di wilayah selatan Kabupaten Malang. Pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya. Dalam perspektif jangka panjang, suatu pengembangan wilayah pada wilayah selatan di Kabupaten Malang harus menjadi suatu upaya untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dan lokal (*local economic development*), sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam hal ini sangat diharapkan peran pemerintah daerah serta organisasi-organisasi masyarakat setempat dapat menumbuhkan kegiatan

usaha dan lapangan kerja dengan memobilisasi sumber daya manusia, alam dan kelembagaan secara lokal. Sehingga wilayah selatan Kabupaten Malang pembangunannya bisa seimbang dengan bagian wilayah lain di Kabupaten Malang.

Ketidakseimbangan fasilitas dan utilitas juga menjadi permasalahan utama di kawasan selatan Kabupaten Malang, dimana pada kawasan selatan Kabupaten Malang pembangunan fasilitas dan utilitas tidak sebanding dengan kawasan utara Kabupaten Malang. Konsep pengembangan wilayah di kawasan selatan Kabupaten Malang dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah khususnya wilayah selatan Kabupaten Malang untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dibangunnya jaringan jalan lintas selatan di Kabupaten Malang untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat wilayah selatan sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Juga meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terpencil kepada pusat-pusat pelayanan umum, membuka peluang bagi pengembangan kegiatan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan sentra-sentra produksi. Bahkan membuka kawasan-kawasan obyek wisata yang berpotensi, sehingga merangsang pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan.

Dalam menumbuhkembangkan perekonomian di wilayah selatan Kabupaten Malang dukungan Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Daerah menguraikan fungsi dan peran infrastruktur yang ketersediaannya sangat dibutuhkan untuk dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Kabupaten Malang. Permasalahan seperti ini memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan pengembangan wilayah di wilayah selatan Kabupaten Malang.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dipandang perlu untuk dikaji secara mendalam tentang upaya dari badan perencanaan pembangunan daerah dalam pengembangan wilayah sebagai bentuk permasalahan administrasi publik di bidang Administrasi Pembangunan, oleh karenanya penulis mengambil judul “UPAYA BADAN PERENCANAAN

DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN MALANG” (Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Selatan Kabupaten Malang).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam Penelitian ini akan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan lintas selatan yang dapat diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang?
2. Kendala apa yang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kegiatan ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan di bidang administrasi, khususnya Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pengembangan wilayah serta kewenangan instansi terkait yaitu Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan mahasiswa, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, mengenal langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Malang.
- b. Bagi kalangan instansi, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran dalam masalah pembangunan jalan lintas pada masa yang akan datang.
- c. Bagi kalangan masyarakat, diharapkan dapat membuka wawasan dan mengerti tentang upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah dan Pemerintah Kabupaten dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Malang, yang pada hakekatnya bermanfaat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini menyajikan 5 (lima) bab yang secara garis besar dipaparkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai administrasi publik, pelayanan publik, pembangunan, perencanaan pembangunan,

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode yang digunakan didalam penelitian ini, yang didalamnya meliputi : metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data,

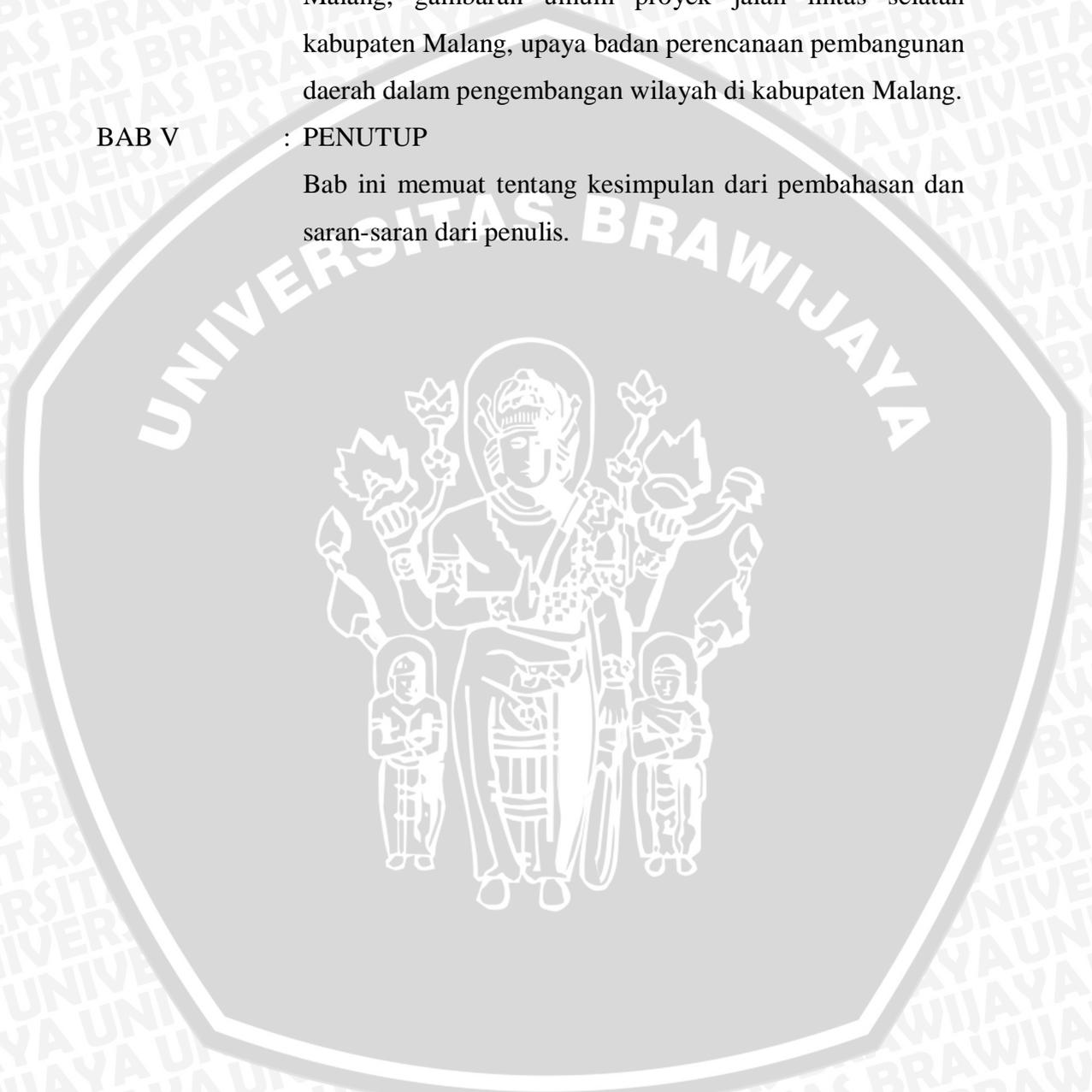
teknik pengambilan data, responden serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum kabupaten Malang, gambaran umum proyek jalan lintas selatan kabupaten Malang, upaya badan perencanaan pembangunan daerah dalam pengembangan wilayah di kabupaten Malang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari penulis.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengembangan Wilayah

1. Konsep Pengembangan Wilayah

Menurut Jayadinata (1999:2), Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antar negara, antar daerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga perdesaan.

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses iteratif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang yang telah diujiterapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Dirjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), Dalam sejarah perkembangan konsep pengembangan wilayah di Indonesia, terdapat beberapa landasan teori yang turut mewarnai keberadaannya. Pertama adalah Walter Isard sebagai pelopor ilmu wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan sebab-akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial-ekonomi, dan budaya. Kedua adalah Hirschmann (era 1950-an) yang memunculkan teori *polarization effect* dan *trickling-down effect* dengan argumen bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (*unbalanced development*). Ketiga adalah Myrdal (era 1950-an) dengan teori yang menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan menggunakan istilah *backwash* and *spread effect*. Keempat adalah

Friedmann (era 1960an) yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang

kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Terakhir adalah Douglass (era 70-an) yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa – kota (*rural – urban linkages*) dalam pengembangan wilayah.

Keberadaan landasan teori dan konsep pengembangan wilayah diatas kemudian diperkaya dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran cemerlang putra-putra bangsa. Diantaranya adalah Sutami (era 1970-an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota dan hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota. Selanjutnya adalah Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep Pola dan Struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misalnya antara kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia, antar kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Perkembangan terakhir pada awal abad milenium, bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Pengertian Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah menurut Said (1996:5) secara definitif belum dapat diberikan batasan yang baku dan cenderung samar dengan pengertian lainnya seperti pembangunan wilayah, pembangunan daerah, perencanaan tata guna tanah, regional development. Namun untuk lebih memudahkan pemahaman pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha memajukan dan memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Sedangkan Wilayah atau daerah mengandung tiga pengertian:

1. Menganggap suatu daerah sebagai suatu ruang dimana kegiatan ekonomi berlaku dan di berbagai pelosok ruang tersebut sifat-sifatnya sama. Persamaan sifat dapat ditinjau dari pendapatan perkapita penduduk, segi agama atau suku bangsa masyarakat dan dari berbagai struktur ekonominya. Daerah dalam pengertian ini adalah daerah homogen.
2. Pengertian daerah sebagai ekonomi ruang yang dikuasai satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah suatu administrasi tertentu seperti Propinsi, Kabupaten, Desa dan sebagainya. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah administrasi atau daerah perencanaan. (Sukirno, 1985:2)

Selanjutnya menurut Karmansyah (1986:4), untuk dapat memberi pegangan dalam pemahaman pengembangan wilayah adalah usaha sadar yang dilaksanakan untuk merubah (baik dalam arti kualitas, jumlahnya dan jenisnya) dalam arti peningkatan sumber daya yang terbatas untuk kesejahteraan masyarakat pada suatu region atau suatu ruang atau wilayah. Dari batasan tersebut pengembangan wilayah adalah usaha atau cara merubah guna meningkatkan kemampuan wilayah yang dimiliki mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia serta hasil manusia pada suatu wilayah untuk menunjang pembangunan.

Pembangunan dan pengembangan adalah dua hal yang sangat berhubungan erat. Pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Sedangkan pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki, atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada (Jayadinata, 1999:4) keduanya bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan dapat merupakan pembangunan atau pengembangan fisik dan dapat juga merupakan pembangunan atau pengembangan sosial ekonomi (Jayadinata, 1999:4).

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil pengertian pengembangan wilayah yaitu suatu usaha yang terencana untuk memajukan atau meningkatkan atau memperbaiki suatu wilayah dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, baik

potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

b. Kebijakan pengembangan wilayah

Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat berbagai masalah perkotaan muncul, seperti jumlah penduduk yang semakin meningkat, kemacetan, kejahatan, polusi, limbah, dan lain-lain. Untuk memecahkan masalah tersebut terdapat kriteria-kriteria dasar yang dilandasi oleh kebijakan pengembangan kabupaten yang meliputi:

1. Mengupayakan pengembangan kabupaten yang serasi secara fisik artinya keserasian antara pengembangan wilayah terbangun dan wilayah terbuka sebagai wilayah penyangga.
2. Mengupayakan pengembangan kabupaten yang berdasarkan keseimbangan dan keserasian kehidupan kabupaten mengingat beragamnya pola sosial budaya, sosial ekonomi, serta lingkungan fisik kabupaten termasuk didalamnya upaya untuk dapat menyeraskan dan menyeimbangkan pengembangan berbagai sektor yang serba dualistik, modern dan tradisional, sektor formal dan informal.
3. Mengupayakan pengembangan wilayah baru untuk kabupaten yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan masyarakat termasuk upaya menghindari terjadinya kelompok-kelompok eksklusif yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat dan penghematan sumber daya lahan untuk pembangunan.
4. Pengembangan wilayah kabupaten difungsikan menjadi sumber daya tandingan terhadap daya tarik kota besar.
5. Mengupayakan agar tidak terjadi perkembangan permukiman wilayah kabupaten yang terlalu tersebar sehingga dapat menimbulkan kurang-efisien dalam pengadaan prasarana, sarana dan perlahannya. Hal ini menuju kepada upaya pengembangan kabupaten.
6. Menunjang pengembangan pemukiman di wilayah seperti pemukiman transmigrasi sebagai embrio pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru yang akan sangat penting dalam rangka membina pemerataan pembangunan daerah, pemanfaatan sumber daya alam secara terarah dan kepada keamanan dan pertahanan (Jayadinata, 1999:198).

Kebijakan mengenai pengembangan wilayah tersebut sangat penting dalam pengembangan wilayah agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan pendapatnya Jayadinata (1999:276) tentang

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah, yaitu:

1. Perencanaan harus disertai oleh kekuasaan efektif untuk pelaksanaan. Adanya kekuasaan yang efektif dalam perencanaan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengembangan wilayah. Tanpa adanya suatu kekuasaan yang efektif maka perencanaan tersebut akan sulit diwujudkan.
2. Bagi suatu kebijakan harus terdapat ikatan politis yang tetap.
3. Untuk pengembangan wilayah harus dibuat peraturan (sarana). Segala sesuatunya jika mau berjalan dengan baik maka harus ada peraturan atau sarana untuk menunjangnya. Begitu juga dengan pengembangan wilayah harus dibuat peraturan atau sarana untuk menunjang pelaksanaannya.
4. Dalam pengembangan antar wilayah harus dipertahankan adanya keseimbangan nasional. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya akibat adanya pengembangan daerah yang tidak merata.

c. Perencanaan dalam pengembangan wilayah

Perencanaan merupakan suatu aktifitas universal manusia yang pasti ada dalam setiap kehidupan manusia dan merupakan keahlian dasar dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada (Catanese dan Snyder, 1992:50). Demikian juga dalam pengembangan wilayah diperlukan suatu perencanaan yang matang agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan teratur dan terarah.

Dalam perencanaan wilayah keseluruhan (*regional planning*) dapat dipergunakan macam-macam metode:

1. Pengembangan wilayah secara administratif atau secara geografis, misalnya pengembangan daerah Jawa Barat (Propinsi Jawa Barat), atau pengembangan wilayah geografis Jawa Barat (yang terdiri atas Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta), dengan ,mengembangkan seluruh wilayah pedesaan dan perkotaannya. Hal tersebut termasuk perencanaan wilayah teritorial (formal).
2. Pengembangan wilayah khusus.
 - a. Pengembangan wilayah aliran sungai yang pengembangannya dilakukan di wilayah aliran sungai tertentu. Di wilayah tersebut dilakukan peningkatan pemanfaatan sungai, tanah, dan sumber

daya alam lainnya. Dengan demikian dapat dikembangkan pertanian dan peternakan, kehutanan, industri, perikanan, pelayaran, pengawetan tanah, penanggulangan banjir, dan lain sebagainya.

- b. Pengembangan wilayah pedesaan, yang dilakukan dengan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk dengan mengembangkan pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok penduduk.
3. Pengembangan wilayah yang termasuk perencanaan wilayah fungsional serta berdasarkan suatu proses dalam ruang (*spatial process*) yaitu proses difusi dalam ruang (*spatial diffusions process*), yang meliputi:
 - a. Konsep pertumbuhan kutub (*growth pole*) yang berpusat dan mengambil tempat (kota) tertentu sebagai pusat pengembangan yang diharapkan menjalarkan perkembangan ke pusat-pusat yang tingkatannya lebih rendah.
 - b. Konsep Agropolitas, yang berdasarkan pula proses difusi dalam ruang, mempunyai prinsip desentralisasi dan mengikutsertakan sebagian besar penduduk wilayah yaitu penduduk pedesaan yang bertani dalam pembangunan. (Jayadinata, 1999:289)

Menurut Parlindungan (1992:41), khusus untuk perencanaan sesuatu pengembangan wilayah perlu diperhatikan:

1. Pengembangan dan perluasan pemukiman dan perumahan.
Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan keterbatasan ruang maka perencanaan pengembangan wilayah harus memperhatikan masalah pemukiman dan perumahan.
2. Pengembangan dan perluasan komunikasi dan fasilitas untuk lalu lintas.

Di zaman yang serba cepat dan canggih ini menuntut adanya fasilitas komunikasi dan lalu lintas yang lancar. Masyarakat sedang mempunyai mobilitas yang tinggi, mereka berkomunikasi dengan alat-alat canggih dan bepergian untuk menyelesaikan pekerjaannya. Adanya sarana komunikasi dan lalu lintas telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat modern. Karena tanpa keduanya, masyarakat akan menjadi terkucil di tengah kecanggihan zaman.

3. Pengembangan dan perluasan *lay out* suatu daerah yang belum berkembang.

Perencanaan pengembangan wilayah hendaknya lebih memperhatikan daerah yang belum berkembang agar tidak jauh

tertinggal dengan daerah maju. Karena hal tersebut akan berakibat buruk terhadap pembangunan.

4. Menjamin kondisi kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan ketenangan masyarakat.

Dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan masyarakat yang sejahtera maka menjadikan kondisi yang bersih, sehat, nyaman dan tenang bagi masyarakat adalah salah satu solusinya. Perencanaan pengembangan wilayah harus memperhatikan lingkungan alam di sekitarnya, dengan kata lain pengembangan wilayah yang ramah lingkungan. Karena pencemaran lingkungan seperti polusi, limbah dan pengrusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir, kekeringan, longsor, gempa merupakan pertimbangan yang sangat serius.

d. Teori pengembangan wilayah

Pengembangan kabupaten umumnya berbentuk pola tertentu. Motif ekonomi merupakan motif utama dalam pengembangan kabupaten dengan timbulnya pusat-pusat bisnis yang strategis. Selain motif ekonomi terdapat pula motif politik, bentuk fisik kabupaten seperti topografi dan drainase.

Meski struktur kabupaten tidak beraturan, namun kalau dilihat secara seksama memiliki keteraturan pola tertentu. Teori pengembangan wilayah terdiri dari 3 teori yaitu:

1. Teori Konsentris

Penyusunnya adalah E.W. Burgess pada tahun 1923 yang intinya adalah pembangunan yang berkembang keluar dari daerah pusat yang polanya akan berbentuk lingkaran. Zona pertama adalah kawasan pusat bisnis (KPB) yang dikelilingi daerah transisi. KPB terdiri dari bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, pasar, dan toko pusat perbelanjaan. Daerah transisi merupakan perumahan tua yang sudah beralih ke perkantoran dan industri ringan. Sebelah luar daerah transisi adalah daerah tempat tinggal buruh dan banyak ditemukan bangunan tua. Setelah itu zona perumahan yang ditempati oleh penduduk kelas menengah, kemudian setelah itu zona penglaju yang merupakan wilayah bagian luar dari pengembangan yang masih jarang terdapat perumahan (Koestoer, 2001:30).

2. Teori Sektoral

Tahun 1939 ekonom Homer Hoyt mengatakan bahwa tata guna lahan berkembang ke arah luar pusat wilayah pengembangan. Teori ini merupakan improvisasi dari teori konsentris dengan memperhatikan faktor transportasi. Pada teori ini makin ke dalam, bangunan atau gedung semakin kuno dan fungsi industri semakin berkurang dan sebaliknya perindustrian semakin berkembang pesat di pinggiran yang lebar sektornya makin membesar (Koestoer, 2001:31).

3. Teori Inti Ganda

Dikemukakan oleh C.D. Harris dan E Ullman tahun 1945. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan wilayah yang bermula dari satu pusat menjadi ruwet bentuknya. Hal ini disebabkan oleh munculnya pusat-pusat tambahan yang masing-masing akan berfungsi menjadi kutub pertumbuhan. Di sekeliling nukleus-nukleus baru ini akan mengelompok tata guna tanah yang bersambungan secara fungsional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah adalah aktivitas manusia, fasilitas yang ada dalam melakukan aktivitas, sumber daya alam manusianya.

2. Tujuan Pengembangan Wilayah

Dalam suatu negara yang sangat luas dan kondisi sosial ekonomi serta geografis wilayah yang sangat beragam seperti Indonesia, pengembangan wilayah (*regional development*) sangat penting dalam mendampingi pembangunan nasional. Tujuan pengembangan wilayah sangat bergantung pada permasalahan serta karakteristik spesifik wilayah yang terkait, namun pada dasarnya ditujukan pada pendayagunaan potensi serta manajemen sumber-sumber daya melalui pembangunan perkotaan, pedesaan dan prasarana untuk peningkatan kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Pada tingkat nasional pengembangan wilayah juga ditujukan untuk memperkuat integrasi ekonomi nasional melalui keterkaitan (*linkages*), serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.

B. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Definisi Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan (untuk masa depan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. Kebutuhan membuat perencanaan dapat diberi makna sebagai ;

- a. Adanya kebutuhan untuk menentukan langkah-langkah ke depan yang tepat, yakni adanya kesesuaian antara sumberdaya, situasi eksternal dan momentum.
- b. Agar dapat membuat bacaan (pembacaan) atas situasi yang tepat, sehingga daripadanya bisa diambil makna positif dan negatifnya, yang akan menjadi dasar (pertimbangan) dalam menentukan langkah ke depan.
- c. Agar dapat menentukan alokasi sumberdaya secara tepat, sehingga hasil-hasil yang diperoleh merupakan optimalisasi atas sumberdaya yang tersedia.
- d. Agar bisa dibayangkan dengan lebih jelas mengenai apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana mengantisipasi perkembangan yang tidak terduga.

Jadi, dapat dikatakan perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi dan factor-faktor eksternal, dari pihak-pihak berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Secara sederhana, perencanaan dapat diartikan menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai

tujuan tersebut. Menurut Conyers dan Hills (1994) dalam Arsyad (1999:19), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi di atas, ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu :

- a. Merencanakan berarti memilih,
- b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya,
- c. Perencanaan berorientasi ke masa depan, dan
- d. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Sedangkan perencanaan menurut Bintoro (1995:9) dilaksanakan dengan keperluan atau manfaat sebagai berikut :

- a. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- b. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
- e. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi. Menurut Wilson dalam Jayadinata (1999:5) perencanaan pada dasarnya meliputi tiga hal, yaitu :
 - Analisis, yaitu kupasan data, proyeksi/perkiraan untuk masa depan yang bertitik dari keadaan masa kini.
 - Kebijakan (*policy*), yakni pemilihan rencana yang baik untuk pelaksanaan, yang meliputi pengetahuan mengenai maksud dan kriteria untuk menelaah alternatif-alternatif rencana.
 - Rancangan atau desain (*design*), yaitu rumusan dan sajian rencana

Sesungguhnya tepat apabila dikatakan bahwa perencanaan merupakan proses pemikiran yg bersifat kreatif, inovatif dan reflektif

yang hasilnya adalah gambaran-gambaran situasi yang memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kendala-kendala yang sejak dini telah diidentifikasi dengan sebaik mungkin.

Jelaslah bahwa setiap organisasi memerlukan perencanaan karena beberapa alasan seperti:

1. Dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional, rencana merupakan alat efisiensi dan efektivitas untuk menghindari pemborosan berkat keterarahan kegiatan untuk mencapai tujuan.
2. Dengan rencana yang matang, dilakukan perkiraan keadaan mengenai hal-hal dan prospek perkembangan masa depan yang pada gilirannya dapat mengulngi ketidakpastian yang akan dihadapi.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang diduga yang merupakan cara terbaik yang setelah melalui pengkajian yang mendalam, dapat member petunjuk tentang cirri-ciri setiap alternative yang ada, baik yang sifatnya positif maupun negatif.
4. Dengan adanya rencana, tergambar pula jenis dan bentuk satuan-satuan kerja penyelenggara semua kegiatan yang sifatnya berlanjut dan oleh karenanya melembaga.
5. Dengan adanya rencana, dapat ditetapkan standar prestasi yang baku yang antara lain berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan usaha.
6. Rencana dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk penjabaran program kerja secara sistematis.
7. Dengan adanya rencana, jumlah, jenis keahlian dan ketrampilan tenaga kerja yang diperlukan dapat ditetapkan dengan lebih akurat.
8. Rencana menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian.
9. Implikasi pembiayaan pun dapat terlihat dengan jelas dalam suatu rencana.
10. Dengan rencana yang jelas, sarana dan prasarana kerja yang mutlak diperlukan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

2. Karakteristik Perencanaan

Dari berbagai pengertian perencanaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan itu merupakan suatu proses menyiapkan kegiatan untuk mencapai tujuan sebaik mungkin melalui sumber-sumber yang dimiliki supaya lebih efisien dan efektif. Untuk dapat mencapai pembangunan yang efektif dan efisien, tentu dibutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang tersebut mempunyai beberapa karakteristik, menurut Siagian (1984:18) dalam Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Perencanaan berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai karena eksistensi seluruh organisasi justru adalah untuk pencapaian tujuannya.
- b. Perencanaan selalu mengandung keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan tindakan yang akan diambil betapa pun tentatifnya keputusan tersebut.
- c. Segala sesuatu yang termuat dalam rencana merupakan hasil perhitungan yang matang dengan pengertian bahwa perhitungan yang dibuat tidak bersifat absolut yang berarti terbuka kemungkinan untuk ditinjau kembali serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

3. Asas-Asas Perencanaan

Dalam perencanaan pembangunan, Terdapat 14 asas perencanaan, yaitu :

1. *Principle of contribution to objective.*

Setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan.

2. *Principle of efficiency of planning.*

Suatu perencanaan efisien, jika perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya sekecil-kecilnya.

3. *Principle of primacy of planning.*

Perencanaan adalah keperluan utama para pemimpin dan fungsi-fungsi lainnya, organizing, staffing, directing, dan controlling.

4. *Principle of pervasiveness of planning.*

Asas pemerataan perencanaan memegang peranan penting mengingat pemimpin pada tingkat atas banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana itu.

5. *Principle of planning premise.*

Patokan-patokan perencanaan sangat berguna bagi ramalan, sebab premis-premis perencanaan dapat menunjukkan kejadian-kejadian yang akan datang.

6. *Principle of policy frame work.*

Kebijaksanaan ini mewujudkan pola kerja, prosedur-prosedur kerja, dan program-program kerja terusan.

7. *Principle of timing.*

Perencanaan waktu yang relatif singkat dan tepat.

8. *Principle of planning communication.*

Perencanaan dapat disusun dan dikoordinasikan dengan baik jika setiap orang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakannya.

9. *Prinsiple of alternative.*

Alternatif ada pada setiap rangkaian kerja dan perencanaan meliputi pemilihan rangkaian alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

10. *Principle of limiting factor.*

Dalam pemilihan alternatif-alternatif, pertama-tama harus ditujukan pada faktor-faktor yang strategis dan dapat membantu pemecahan masalah.

11. *The commitment principle.*

Perencanaan harus memperhatikan jangka waktu keteriketan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

12. *The principle of flexibility.*

Perencanaan yang efektif memerlukan fleksibilitas, tetapi tidak berarti mengubah tujuan.

13. *The principle of navigation change.*

Perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan yang terus-menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaannya untuk mempertahankan tujuan.

14. *Principle of strategic planning.*

Dalam kondisi tertentu, harus memilih tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan rencana agar tujuan tercapai dengan efektif.

4. Arti Penting Perencanaan

Sedangkan jika perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik, maka terdapat alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan, yaitu :

- a) Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- b) Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
- c) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*).
- d) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
- e) Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi (*control/evaluation*).

5. Ciri-ciri Perencanaan yang baik

Seperti yang diketahui bahwa penyusunan perencanaan sangat penting, menurut Siagian (1984:19) dalam Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan yang baik seharusnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Suatu rencana harus mempermudah seluruh usaha untuk mencapai tujuan.
2. Penyusunan rencana tidak bisa diserahkan kepada sekelompok orang yang kedalaman persepsi dan pengetahuannya tentang hakiki daripada tujuan yang hendak dicapai masih diragukan.
3. Para penyusun rencana harus terdiri dari para tenaga professional yang, di samping ahli dan terampil dalam penggunaan berbagai teknik perencanaan, juga telah memiliki pengalaman praktek di lapangan.
4. dicantumkan petunjuk yang jelas tentang substansi dan teknik penjabaran yang memang harus dilakukan sebelum dilaksanakan.
5. Tidak boleh terlepas dari pemikiran pelaksanaan.
6. Kesederhanaan bentuk dan isi dari sebuah rencana, maksudnya menggambarkan secara jelas skala prioritas yang logis, mudah dipahami oleh mereka yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana, meskipun tidak turut berperan dalam penyusunan rencana dan mudah dijabarkan oleh para pelaksana.
7. Keluwesan terhadap situasi yang ada.
8. Adanya ruang pengambilan resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya.
9. Pragmatisme.
10. Aktualitas, yaitu penggabungan yang operasional antara teori dan praktek di lapangan.

Pada hakikatnya, inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

6. Definisi Pembangunan

Definisi sederhana mengenai istilah pembangunan adalah sebagai proses untuk melakukan perubahan. Menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2001:4) menyimpulkan bahwa :

1. Pembangunan merupakan proses perubahan sosial menuju tataran kehidupan yang lebih baik.
2. Pembangunan merupakan upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
3. Pembangunan merupakan proses sosial yang bebas nilai.

Pembangunan sebagai proses perubahan tidak dapat dilepaskan dari peran *developer*. Pengembang (*developer*) adalah kunci dalam proses pembangunan. Proses pembangunan dibagi menurut 3 fase, yaitu :

- a. Aktivitas persiapan pembangunan. Ini adalah fase paling singkat, yang berakhir hanya dalam beberapa bulan. Aktivitas ini mencakup pemilihan tempat dan penentuan kelayakan proyek, yang menghasilkan keputusan tentang apakah pembangunan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Jika keputusannya melanjutkan pembangunan tersebut, maka fase ini akan menetapkan keseluruhan strategi pembangunan proyek tersebut.
- b. Pelaksanaan pembangunan. Proyek tadi akan terealisasi menjadi bangunan selama fase ini, yang meliputi tiga aktivitas, yaitu pembiayaan, pemasaran dan konstruksi serta desain.
- c. Pengelolaan dan kelangsungan hidup. Ini merupakan fase terakhir dan terpanjang dari proyek tersebut (Catanese, 1999:295)

Pembangunan akan membawa masyarakat kepada modernisasi, dalam pengertian mencapai kemandirian pribadi, melalui suatu proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Pembangunan harus dimulai dari proses perubahan-perubahan sosial yang besar dan secara berkelanjutan. Proses atau usaha perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu proses dan usaha pembangunan. Perubahan sosial dimulai dari proses kemandirian atau dimulai dari proses emansipasi diri. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses menuju perubahan untuk menjadi lebih baik, sehingga terdapat pendapat bahwa pembangunan merupakan pertumbuhan.

Menurut Siagian (1988:19), pembangunan nasional didasarkan pada lima ide pokok, yaitu :

1. Pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih “baik” dari kondisi yang kini ada. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup, misalnya, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya.

2. Ide pokok yang kedua yang inheren dalam pengertian pembangunan ialah pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan di sini ialah kemampuan suatu Negara bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Berarti, tidak ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan.
3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan, arah dan jenis berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dan seluruh potensi serta kekuatan nasional diarahkan ke situ.
4. Jika diterima pendapat bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar, konotasinya adalah bahwa pembangunan itu didasarkan pada sesuatu rencana yang tersusun secara rapi untuk satu kurun waktu tertentu.
5. Kiranya tepat apabila dikatakan bahwa pembangunan bermuara pada suatu "titik akhir" tertentu, yang untuk mudahnya dapat dikatakan merupakan cita-cita akhir dari perjuangan dan usaha Negara bangsa yang bersangkutan.

Adapun tujuan pembangunan terbagi menjadi dua tahap: Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Dalam proses kegiatan pembangunan, tingkat-tingkat yang dilalui untuk mencapai tujuan pembangunan adalah:

"Tahap pertama, segenap masalah yang timbul karena adanya tuntutan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda (mungkin juga saling bertentangan kadang-kadang) diidentifikasi dan dirumuskan untuk kemudian dipikirkan pemecahannya. *Tahap kedua*, mengadakan pemilihan alternatif-alternatif kebijaksanaan yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang timbul. *Tahap ketiga*, memilih satu diantara alternatif kebijaksanaan tersebut yang sekiranya paling tepat untuk kemudian dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan. *Tahap keempat*, melaksanakan kebijaksanaan melalui perencanaan, program-program serta proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan. *Tahap kelima*, mengadakan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dari program, proyek dan kegiatan pembangunan. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan tujuannya, maka dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan itu tidak atau kurang berhasil (Syamsi, 1986:39)".

7. Perencanaan Pembangunan

Terdapat definisi perencanaan pembangunan menurut beberapa ahli. Menurut Tjokroamidjojo (1987:15), perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Sedangkan menurut Riyadi (2003: 23), perencanaan pembangunan merupakan:

“suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah

Apabila dihubungkan antara perencanaan pembangunan dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan daerah menurut Riyadi (2003:24) merupakan :

1. Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas.

Perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan perencanaan-perencanaan kegiatan lain, perencanaan pembangunan daerah ini lebih bersifat kompleks dan rumit. Hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat berbagai komunitas, lingkungan, budaya atau kondisi sosial yang beragam

serta luasnya wilayah pembangunan dengan perbedaan kepentingan pada tiap wilayah atau daerah.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Wahyudi (2006: 42), ada dua dokumen pembangunan jangka menengah di daerah, yaitu :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Dokumen Rencana Strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD yang bersangkutan.

Di bawah ini terdapat beberapa ciri dari perencanaan pembangunan daerah menurut Riyadi (2003:24), yaitu :

- a. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
- b. Analisis perencanaan bersifat makro atau luas.
- c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.
- d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.
- e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Sebuah perencanaan pembangunan daerah akan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna melalui ciri-ciri di atas. Hal ini dikarenakan beberapa ciri tersebut merupakan prasyarat penting dalam mencapai pembangunan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat.

Selain terdapat ciri yang harus dilakukan, perencanaan pembangunan daerah harus juga memenuhi beberapa aspek. Adapun aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan, yaitu :

- a) Aspek lingkungan terbagi dua yaitu :

1. Lingkungan internal, yakni lingkungan yang berada di dalam “populasi” di mana perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan.
2. Lingkungana eksternal, yakni lingkungan yang berada di luar “populasi” tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat keberhasilan suatu program pembangunan.

b) Aspek Potensi dan Masalah

merupakan fakta yang ada di lapangan dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan dan dapat dijadikan pijakan awal dalam proses penyusunan perencanaan yang dapat menjadi dasar analisis berikutnya.

c) Aspek Institusi Perencana

Institusi perencana adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan daerah. Bertugas mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh, serta senantiasa melakukan kajian-kajian atau analisis dalam rangka mengevaluasi hasil-hasil yang telah dirumuskan.

d) Aspek Ruang dan Waktu

Aspek ruang dan waktu ini harus jelas menggambarkan suatu kebutuhan dalam *timing* yang tepat tentang kapan perencanaan pembangunan daerah mulai disusun, kapan mulai diberlakukan, untuk berapa lama masa pemberlakuannya, serta kapan dilakukan evaluasi atau perencanaan ulang (*replanning*). Sedangkan dalam aspek ruang perencanaan pembangunan daerah harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dari kondisi ruang yang ada, dimana proses pembangunan dilaksanakan.

e) Aspek Legalisasi Kebijakan

Aspek ini menjadi penting ketika hasil perencanaan perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan.

Keberhasilan ataupun kegagalan suatu program perencanaan pembangunan daerah, pastilah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun, faktor yang mempengaruhi tersebut akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah perencanaan. Hal ini dikarenakan perbedaan tempat, budaya dan adat di setiap daerah membuat permasalahan yang muncul juga berbeda. Menurut Riyadi (2003:32) yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan *Deutsche Stiftung Internationale Entwicklung* (DSE), yang dituangkan dalam Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah (1999), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- 1) Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri.
- 2) Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.
- 3) Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana.
- 4) Koordinasi yang baik.
- 5) *Top down* dan *bottom up planning*.
- 6) Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus-menerus.
- 7) Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat.

Di sisi lain, Riyadi (2003:12) juga berpendapat bahwa selain beberapa faktor di atas, terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah dengan merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, yaitu:

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil-tidaknya program perencanaan pembangunan daerah. Unsur dalam faktor lingkungan ini dapat dibagi menurut bidang :

a) Sosial

Kondisi sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program perencanaan pembangunan daerah.

b) Budaya

Faktor budaya yang ada dalam kelompok masyarakat tidak dapat diabaikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang akan diimplementasikan dalam bentuk proses pelaksanaan pembangunan.

c) Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki dampak yang sangat besar terhadap proses pembangunan, yang dalam hal ini juga sangat berdampak terhadap proses-proses awal pembangunan, yakni perencanaan pembangunan.

- d) Politik
Keterkaitan faktor politik dan pembangunan terutama dapat dilihat dari adanya ideologi yang dianut oleh suatu negara.
2. Faktor Sumber Daya Manusia Perencana
Sebagai motor penggerak perencanaan, SDM perencana menjadi sangat penting dan bahkan menjadi kunci bagi berhasil-tidaknya proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan yang baik tercipta oleh SDM yang tepat dan berkualitas.
3. Faktor Sistem yang Digunakan
Sistem perencanaan maksudnya adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai dasar atau landasan pelaksanaan perencanaan pembangunannya. Hal itu bisa menyangkut masalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan, dsb.
4. Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi
Perkembangan ilmu dan teknologi menjadi faktor penting dan berperan sangat besar dalam pencapaian pembangunan.
5. Faktor Pendanaan
Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, faktor pendanaan harus benar-benar diperhatikan sebagai hal yang penting karena kegiatan ini merupakan kegiatan “mahal”.

9. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Ide dasar dari konsep “*sustainable development*” bermula dari “*The Dub of Rome*” pada tahun 1972, yakni sekelompok orang yang terdiri dari para manajer, para ahli ilmu teknik, dari ilmuwan se-eropa yang berhasil menyusun suatu dokumen penting mengenai keprihatian terhadap lingkungan yang disebutnya sebagai “*The Limits to Growth*”. Pesan dari dokumen tersebut diantaranya bahwa sumber daya alam telah berada pada suatu tingkat ketersediannya yang memprihatinkan dalam menunjang keberlanjutan (*sustainability*) pertumbuhan penduduk dari ekonomi. Kehancuran yang serius pada hutan-hutan Eropa Barat, terjadinya “*oil shock 1983*” kelaparan di benua Afrika menurunnya kualitas lingkungan di Negara-negara tropis, semakin menipisnya lapisan ozon, efek rumah kaca yang menyebabkan “*global warning*”, telah semakin menunjukkan betapa serius masalah lingkungan hidup. Di sinilah kemudian konsep “*sustainable*” menemukan kelahirannya. *Sustainable* diartikan sebagai suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari

setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Situasi dan kondisi permasalahan pengembangan wilayah memperlihatkan semakin luasnya dimensi kompleksitas tantangan tugas dan tanggung jawab di era desentralisasi. Jawaban kunci mengatasi tantangan tersebut, harus menerapkan prinsip “*Sustainability*” dalam semua aspek pembangunan. Dimensi pengembangan wilayah secara berkelanjutan meliputi:

1. *Sustainable urban economy*
2. *Sustainable urban society: social coherence, and social solidarity*
3. *Sustainable urban shelter, affordable housing for all*
4. *Sustainable environment*
5. *Sustainable access*
6. *Sustainable urban life*
7. *Sustainable democracy*

Tantangan ke depan pengembangan wilayah adalah menerapkan secara efektif prinsip-prinsip *sustainable development* dalam semua aspek kebijakan pembangunan (Kumpulan Makalah Terpilih Seminar Plano 42 Departemen Teknik Planologi ITB).

C. Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Definisi Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah “wujud struktural ruang dan pola ruang”.

Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedang yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan

pedesaan, di mana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung dan lain-lain.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007, yaitu pasal 1 (5) yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Sodik, 2008:24).

Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk menciptakan suatu penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang serasi pula diantara peraturan pada tingkat tinggi sampai pada peraturan pada tingkat di bawahnya sehingga terjadi suatu koordinasi dalam penataan ruang.

Maka dari uraian diatas perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Landasan penataan ruang wilayah di Indonesia adalah Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang wilayah dilakukan pada tingkat nasional (rencana tata ruang wilayah nasional), tingkat propinsi (rencana tata ruang wilayah propinsi), dan tingkat kabupaten (RTRW kabupaten). Setiap rencana tata ruang harus mengemukakan kebijakan mikro pemanfaatan ruang berupa:

1. Tujuan pemanfaatan ruang,
2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan
3. Pola pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah

Telah dijelaskan pada uraian-uraian terdahulu di atas bahwa perencanaan berkaitan dengan faktor-faktor produksi atau sumber daya yang terbatas, untuk dimanfaatkan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal perencanaan wilayah, pentingnya perencanaan dikuatkan oleh berbagai faktor yang dikemukakan oleh Tarigan (2005:8) berikut ini:

1. Banyak di antara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbarui. Kalaupun ada yang masih mungkin untuk diperbarui akan memerlukan waktu yang cukup lama dan biayanya cukup besar. Potensi yang dimaksud antara lain menyangkut luas wilayah, sumber air bersih yang tersedia, bahan tambang yang sudah terkuras, luas hutan penyangga yang menciut, luas jalur hijau yang menciut, tanah longsor, atau permukaan tanah yang terkena erosi.
2. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia.
3. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Hal ini misalnya adanya penggunaan lahan yang tidak terencana ataupun salah dalam perencanaan.
4. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. Pada sisi lain, kemampuan manusia untuk mendapatkan lahan tidak sama. Hal ini membuat penggunaan atau kepemilikan lahan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Apabila dibiarkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, lahan dapat berada pada segelintir orang dan menetapkan sewa yang tinggi untuk orang-orang yang membutuhkan lahan. Padahal setiap orang membutuhkan lahan sebagai tempat tinggal atau sebagai tempat usaha.
5. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut.
6. Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu adalah asset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat langgeng.

Enam faktor yang dikemukakan di atas saja sudah cukup untuk meyakinkan bahwa rencana tata ruang wilayah mutlak diperlukan.

3. Tujuan dan Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah

Menurut Tarigan (2005:10) secara umum penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional, yakni:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Selain itu tujuan perencanaan tata ruang wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta.

Adapun manfaat dari rencana tata ruang wilayah menurut Tarigan (2005:10) adalah:

1. Perencanaan tata ruang wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, sejak awal telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk dibangun dan yang akan dijadikan sebagai wilayah penyangga.
2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan dimana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan, hal ini bisa mempercepat proses pembangunan.
3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
4. sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail.
5. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian ilmiah selalu menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga suatu penelitian dapat diandalkan kesahihannya. Berdasarkan judul, rumusan masalah dan tujuan yang ditentukan diatas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2002:3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya..

Deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Awal dari adanya penelitian itu sendiri sebenarnya berasal dari adanya minat untuk mengetahui gejala atau fenomena yang ada dengan menggunakan metode. Dalam melakukan penelitian, metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting, karena akan memberikan jalan ke arah pemecahan masalah yang akan diteliti dan juga akan menentukan hasil dari penelitian tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan lingkup langkah awal yang dijadikan sebagai tempat penelitian, kemudian peneliti memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang keadaan yang diteliti. Penetapan fokus penelitian sangatlah penting dimana penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang ditimbulkan sebagai masalah

dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, pertama; batas penentuan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus, kedua; penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Dengan kata lain, bagaimanapun penempatan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang, dilihat dari proses pengembangan wilayah:
 - a. Tahap persiapan
 1. Skenario pengembangan
 2. Metode pendekatan
 3. Metode analisa
 - b. Tahap perencanaan
 1. Arahan pengembangan wilayah secara umum
 2. Arahan pengembangan wilayah sepanjang koridor jalan lintas selatan
 3. Rencana pengembangan fasilitas
 4. Rencana pengembangan utilitas
4. Kendala yang dihadapi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang:
 - a. Faktor internal
 - b. Faktor eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang ditelitinya untuk mendapatkan data yang valid, relevan, akurat, serta data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.

Adapun alasan dalam pengambilan lokasi penelitian di Kabupaten Malang antara lain:

1. Karena daerah kabupaten malang merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar.
2. Karena di kawasan tersebut termasuk jalur perdagangan, dimana jalur ini menjadi prasarana utama transportasi baik dari sektor industri, perkebunan maupun pertanian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Malang karena Kabupaten Malang adalah daerah terluas di Propinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Serta kaya akan berbagai potensi seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan lain-lain, yang sangat potensial sehingga diperlukannya akses poin prasarana fisik yang juga disebut jalan sebagai penunjang pembangunan dan perkembangan daerah. Situs penelitian yang peneliti ambil adalah Kantor BAPPEDA Kabupaten Malang

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dan jenis data bagi peneliti untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah penelitian berasal dari data primer dan sekunder.

Adapun yang dimaksud dengan data primer dan sekunder tersebut adalah :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Dimana dalam penelitian ini data primer tersebut berupa hasil wawancara antara peneliti dengan responden serta hasil observasi peneliti. Sumber data primer yang digunakan, adalah :
 - a. Para Administratur Kantor BAPPEDA Kabupaten Malang
 - b. Pihak Bagian Perencanaan Fisik Kantor BAPPEDA Kabupaten Malang
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Data ini

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan yang terdahulu. Sumber data sekunder yang digunakan, adalah dari pakar, informan, peristiwa, buku, dokumen dan data dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penelitian, peneliti melakukan teknik pengumpulan data, dimana teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan diantaranya adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara yang dilakukan dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang dengan berbicara secara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut maupun dapat juga dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana komunikasi, seperti telepon.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Selain wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengamatan atau observasi. Observasi dalam kamus diartikan sebagai suatu proses melihat dengan penuh perhatian terhadap suatu objek. Observasi dilakukan pada saat peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pada saat pengambilan gambar.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Guna melengkapi data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara, maka digunakanlah teknik dokumentasi, yaitu mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian, kemudian mempelajari dan menjalani dokumen-dokumen yang ada yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan teknik ini dapat terkumpul data yang tidak diperoleh dari narasumber (informan), tetapi terdapat pada berbagai sumber lainnya, seperti buku, laporan-laporan, arsip-arsip, karya tulis.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrument atau alat yang digunakan adalah:

1. Peneliti atau manusia sebagai alat pengumpul data utama, dimana akan berpengaruh dalam proses penelitian.
2. Pedoman wawancara, untuk membatasi dan mengarahkan peneliti di dalam mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian.
3. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan dan alat tulis yang akan digunakan selama berada di lapangan atau alat/instrument lain yang dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan analisa dan kemampuan dalam mendeskripsikan obyek penelitian, dengan analisis, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga aliran kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan Miles, Huberman dan Yin dalam Suprayogo dan Tobroni (2001:192):

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.
2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian, maka akan dapat dipahami tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa ataukah tindakan-tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan terpenting pada suatu penelitian. Penarikan kesimpulan biasanya diartikan sebagai suatu

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama ia meneliti atau menulis dan merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validasinya. Jika tidak demikian maka yang kita miliki adalah merupakan cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan tidak jelas keberadaannya dan kegunaannya.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Geografi

Kabupaten Malang terletak antara $112^{\circ}17',10,90''$ Bujur Timur dan $122^{\circ}57',00,00''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}44',55,11''$ Lintang Selatan dan $8^{\circ}26',34,45''$ Lintang Selatan. Dengan batas wilayah sekitar 3.347,8 Km², Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Dari seluruh total luas tersebut, lebih dari 50 persen merupakan lahan pertanian yang berupa sawah, tegalan dan perkebunan. Sedangkan pemanfaatan untuk pemukiman penduduk sekitar 13,68 persen.

Kabupaten Malang dikelilingi oleh enam Kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara – Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat – Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis ini menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandainya jalur transportasi yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

b. Pemerintahan

Unit administrasi pemerintahan dibawah Kabupaten adalah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa dan setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT). Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 177 Desa, 2953 Rukun Warga dan 14.665 Rukun Tetangga.

Dalam melaksanakan fungsi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang membagi wilayahnya ke dalam delapan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), yaitu :

- a. SWP Ngantang dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Kasembon, Ngantang dan Pujon.
 - b. SWP Lingkar Kota Malang, meliputi Kecamatan Dau, Karangploso, singosari, Pakis, Tajinan, Bululawang, Pakisaji dan Wagir.
 - c. SWP Lawang, meliputi Kecamatan Lawang.
 - d. SWP Tumpang dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Tumpang, Jabung, Poncokusumo dan Wajak.
 - e. SWP Dampit dan sekitarnya, meliputi kecamatan Turen, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, dan Sumbermanjing Wetan.
 - f. SWP Gondanglegi dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagelaran, dan Gondanglegi.
 - g. SWP Kepanjen dan Sekitarnya, meliputi Kecamatan Wonosari, Ngajum, Kepanjen, Kromengan, Sumberpucung, Pagak dan Kalipare.
 - h. SWP Donomulyo meliputi Kecamatan Donomulyo.
- c. Penduduk**

Data kependudukan sebagaimana yang lain sangatlah dibutuhkan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Apalagi bila dikaitkan dengan dwifungsi penduduk dan pembangunan, yaitu fungsi obyek dan fungsi subyek. Fungsi obyek bermakna bahwa penduduk menjadi target dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh penduduk sedangkan fungsi subyek bermakna bahwa penduduk adalah pelaku tunggal dari sebuah pembangunan.

Menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2008, penduduk Kabupaten Malang berjumlah 2.345.658 jiwa. Untuk perkembangan jumlah penduduk pada tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malang

No.	Kecamatan	Tahun 2008	No.	Kecamatan	Tahun 2008
1.	Donomulyo	31383	17.	Sumberpucung	55147
2.	Kalipare	66785	18.	Kromengan	38415
3.	Pagak	50363	19.	Ngajum	49210
4.	Bantur	70979	20.	Wonosari	45743
5.	Gedangan	50657	21.	Wagir	72830
6.	Sumbermanjing	94457	22.	Pakisaji	74258
7.	Dampit	117462	23.	Tajinan	48396
8.	Tirtoyudo	63226	24.	Tumpang	74071
9.	Ampelgading	56995	25.	Pakis	113908
10.	Poncokusumo	85614	26.	Jabung	69267
11.	Wajak	84252	27.	Lawang	92636
12.	Turen	108806	28.	Singosari	145661
13.	Bululawang	60653	29.	Karangploso	55654
14.	Gondanglegi	53715	30.	Dau	56782
15.	Pagelaran	66297	31.	Pujon	62585
16.	Kepanjen	93046	32.	Ngantang	56025
			33.	Kasembon	30088

Sumber: Bappekab Kabupaten Malang 2009, diolah

Berdasarkan tabel di atas kepadatan penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Singosari, Dampit, Pakis, Turen, Lawang, Sumbermanjing, Kepanjen, dan yang terendah adalah Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Ampelgading, Gondanglegi, Pagelaran, Sumberpucung, Kromengan, Ngajum, Wonosari, Tajinan, Jabung, Karangploso, Dau, Pujon, Ngantang, Kasembon. Sedangkan Kecamatan Bantur, Poncokusumo, Wajak, Kepanjen, Wagir, Pakisaji, Tumpang merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk sedang.

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang

Badan perencanaan adalah sebuah organisasi terpisah, dengan kantor dan badan stafnya sendiri. Lembaga pemerintah yang berwenang merencanakan pembangunan terdapat di tingkat nasional (pusat) dan tingkat daerah. Di daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota terdapat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Kota yang bertanggung jawab langsung ke Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Di tingkat daerah tugas bidang perencanaan pembangunan dilakukan oleh Propinsi serta penilaian atas pelaksanaannya. Begitu juga di Kabupaten atau Kota Badan Perencanaan di tingkat itu membantu ke Bupati/Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di propinsi serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pada tahun 1978 Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur mengintruksikan kepada semua Bupati/ Walikota di Jawa Timur agar membentuk organisasi baru Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Malang ini, berada pada kompleks perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang, yang berhadapan dengan kantor Dinas Pendapatan, dan bersebelahan dengan kantor Dinas Kebakaran Malang.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Malang yang dikenal dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Malang dibentuk sebagai pelaksanaan keputusan Surat Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Bappeda Tingkat I dan Bappeda Tingkat II sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1980 Nomor BPPD 053/958/1980, perihal pembentukan Badan Perencanaan Daerah Tingkat II. Pembentukan Bappeda Kabupaten Malang ditetapkan dengan Perda Nomor 22 Tahun 1982, dan diperbarui lagi menjadi Perda. Nomor 22 Tahun 1999, dan dirombak lagi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disempurnakan menjadi Nomor 32 Tahun 2004 sesuai dengan berlangsungnya otonomi daerah pada saat ini.

Sedangkan tugas pokok dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang adalah melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga

Pemerintahan Kabupaten Malang di bidang Perencanaan di Daerah serta melaksanakan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaannya, serta melakukan koordinasi dengan Dinas-Dinas yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Malang, dan juga Instansi-Instansi _tandard yang terlibat dalam perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program-Program Perencanaan Daerah (PROPERDA)
2. Penyusunan Program-Program Tahunan Daerah (PROPERTADA) sebagai pelaksanaan rencana yang dibiayai oleh Daerah atau Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pelaksanaan kordinasi dengan Dinas/Instansi _tandard, Kecamatan, dan Badan2 lain yang berada di wilayah daerah
4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Tim Anggaran
5. Pelaksanaan koordinasi penelitian terhadap usulan Perencanaan Pembangunan yang diajukan oleh Dinas-Dinas yang ada di wilayah daerah
6. Penyusunan persiapan dan perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah
7. Pelaksanaan *Monitoring, Analysing, Evaluation, Documented* serta memvisualisasikan hasil pelaksanaan pembangunan serta berbagai potensi di daerah
8. Penyelenggaraan dan pengawasan _tandard pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan

b. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang

Susunan organisasi Badan Perencanan Pembangunan Kabupaten Malang terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Unsur Pelaksana yaitu:
 - a. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana
 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
 - b. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perekonomian
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan
 2. Sub Bidang Sosial Budaya
 - d. Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Statistik
 2. Sub Bidang Perencanaan Strategis
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain bagian-bagian di atas, untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu serta atas kebutuhan Bappekab Kabupaten Malang dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bappekab Kabupaten Malang.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappekab sendiri, Bappekab Kabupaten Malang memiliki 60 personil yang terdiri atas :

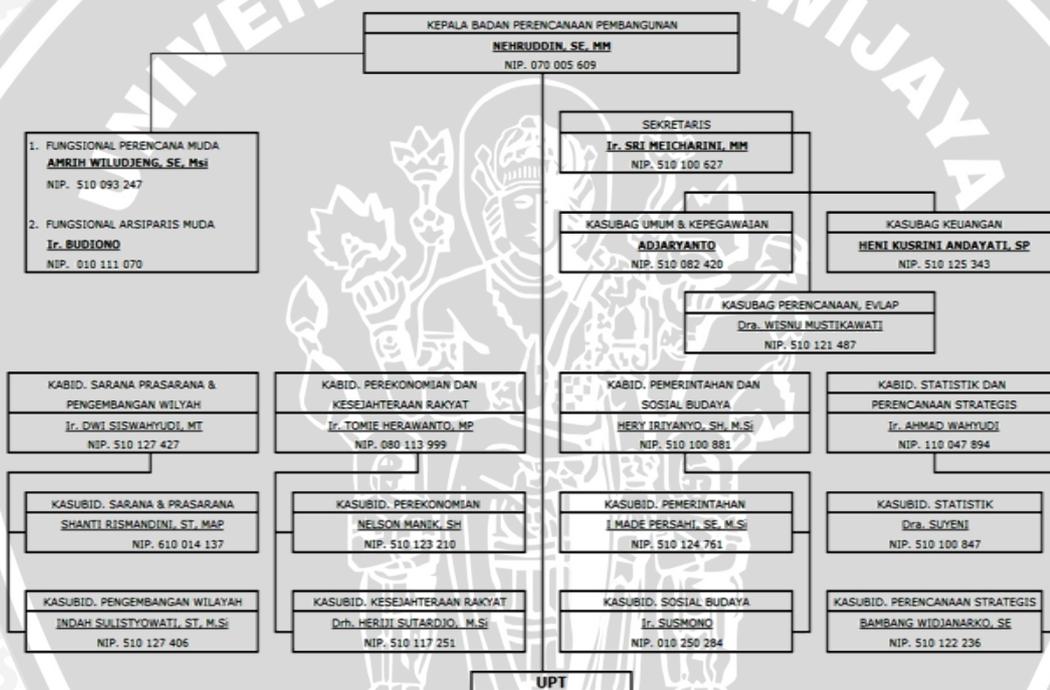
1. Berdasarkan Pendidikan Umum :
 - a. Pendidikan S3 : 1 Orang
 - b. Pendidikan S2 : 10 Orang
 - c. Pendidikan S1 : 29 Orang
 - d. Pendidikan DIII : 1 Orang
 - e. Pendidikan SLTA : 17 Orang
 - f. Pendidikan SLTP : 2 Orang

2. Berdasarkan Jabatan :
 - a. Eselon I : 2 Orang
 - b. Eselon II : 14 Orang
 - c. Eselon III : 35 Orang
 - d. Eselon IV : 6 Orang
 - e. Staff : 3 Orang

Berikut adalah struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang:

Gambar 1

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG



Sumber: Bappekab Kabupaten Malang, 2009

c. Tujuan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang

Tujuan dan langkah strategis dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis Informasi Teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas.

2. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan.
3. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana.
4. Mengembangkan studi kelayakan (*feasibility study*), sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel.

d. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang

Adapun visi dan misi Bappekab Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Visi

Perencanaan pembangunan Kabupaten yang dibuat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang diupayakan mampu mengadopsi dan mewadahi aspirasi masyarakat Kabupaten mengenai bentuk pembangunan yang diinginkannya, agar pembangunan tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja tetapi juga dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pemihakan.

Dalam rangka menunjang pencapaian visi Kabupaten Malang, visi Bappekab adalah menjadi lembaga perencana yang kapabel dalam mempersiapkan dan menyajikan rencana pembangunan

2. Misi

Bappekab mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Tersusunnya Perencanaan Pembangunan yang berpihak pada Kepentingan Masyarakat dan berkelanjutan
- b. Terwujudnya Koordinasi yang Efektif Antar Pelaku Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
- c. Tersedianya Aparat Perencana yang Terampil dan Profesional di masing-masing SKPD

- d. Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Lain baik Akademisi, Lembaga Donor, LSM, Swasta dalam Pelaksanaan Program maupun Kegiatan
- e. Terlaksananya Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)/Kajian, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

3. Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Selatan Kabupaten Malang (Jalan Lintas Selatan)

Potensi di wilayah Malang Selatan seperti di bidang pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan dan lainnya belum dapat diperdayakan secara maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana transportasi yang mendukung, diantaranya kurangnya aksesibilitas penghubung antara Kabupaten di Wilayah Selatan tersebut serta aksesibilitas penghubung dengan jalan-jalan radial utara dan selatan serta jalan kolektor antara pusat-pusat produksi ke/dari jalan arteri atau ke/dari pusat-pusat pemasaran.

Dalam rangka pengembangan wilayah yang meliputi potensi ekonomi dan sosial budaya di wilayah Malang Selatan dibutuhkan prasarana penghubung yang cukup memadai. Untuk mengatasi problema di atas Pemerintah Kabupaten Malang melimpahkan kewenangan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang untuk melaksanakan pengembangan wilayah guna mendukung pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang yang sering juga disebut dengan Jalan Lintas Selatan.

Pembangunan jalan lintas selatan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menunjang akses poin yang berfungsi untuk membuka jalur transportasi atau sebagai *land access*, selain itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional

untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Secara regional, berdasarkan hierarki perencanaan tata ruang kawasan perencanaan merupakan salah satu satuan wilayah pengembangan Malang Raya di Propinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat perkembangan relatif pesat, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta pertambangan dan industri, dimana sektor-sektor tersebut telah memicu perubahan dan perkembangan penggunaan lahan yang berpengaruh pada kondisi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 1996 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Propinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa untuk mendorong perkembangan wilayah selatan Jawa Timur yang relatif lamban perkembangannya perlu dilakukan pembangunan "Jalan Lintas Selatan". Dengan pembangunan Jalan Lintas Selatan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah dan memacu pertumbuhan wilayah selatan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, upaya pembangunan Jalan Lintas Selatan tersebut perlu diikuti dengan perencanaan yang komprehensif melalui konsep pembangunan yang terintegrasi.

Jalan lintas selatan merupakan penghubung kawasan secara regional, dimana jaringan jalan ini menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Lumajang. Sehingga dalam hal ini jalan lintas selatan merupakan jalur alternatif bagi penduduk sekitar wilayah selatan dalam melakukan pergerakan baik terhadap Kabupaten Blitar maupun terhadap Kabupaten Lumajang. Keberadaan jalan lintas selatan juga berperan dalam menunjang bidang pemasaran hasil produksi wilayah terutama produk unggulan desa yang ada di wilayah bagian selatan.

Pengembangan jalan lintas selatan juga memberi dampak yang signifikan bagi pengembangan sektor pariwisata terutama bagi obyek wisata yang belum berkembang. Hambatan utama pengembangan wisata pantai ini adalah kondisi jalan yang kurang memadai dengan perkerasan jalan tanah dan makadam serta jarak capai sampai ± 10 Km dari pusat desa. Sehingga melalui

pengembangan jalan lintas selatan selatan ini, obyek-obyek wisata yang terdapat pada kawasan baik yang sudah tergalai maupun yang belum tergalai dapat diorbitkan secara regional bahkan sampai nasional.

Masalah utama jaringan jalan lintas selatan adalah faktor kenyamanan dan keamanan. Topografi wilayah yang relatif bergelombang dan terjal di sepanjang jalan lintas membentuk kontur jalan yang ekstrem. Kondisi ini dapat mengurangi tingkat kenyamanan pengguna jalan dan juga dapat memperbesar resiko kecelakaan jika tidak ditunjang dengan pengaturan *traffic* yang memadai.

Pada masa mendatang, sistem jaringan jalan lintas selatan akan membuka peluang terbentuknya konsentrasi kegiatan-kegiatan baru yang berkaitan dengan potensi relatif wilayah seperti wisata dan perindustrian. Dua kegiatan tersebut dapat memberikan *multiplier effect* yang dapat menciptakan peluang kerja baru. Dalam kepariwisataan, bidang transportasi antar wilayah akan berkembang melalui penambahan modal transportasi penunjang pariwisata dan pembentukan jalur wisata baru. Sedangkan dalam bidang industri, penciptaan peluang kerja yang sangat terbuka akan menciptakan pertumbuhan permukiman berikut fasilitas penunjangnya.

Konsep pembangunan yang terintegrasi tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbul akibat pembangunan Jalan Lintas Selatan, mengingat sebagian besar wilayah selatan merupakan kawasan hutan dan lahan pertanian. Dengan adanya pembukaan jalur baru tersebut yang kemungkinan besar akan melalui kawasan hutan (hutan lindung dan hutan produksi) maka dikhawatirkan akan terjadi perubahan yang cukup signifikan dari kawasan hutan menjadi kawasan terbangun. Selain itu akan terjadi dampak positif dan negatif baik terhadap aspek fisik lahan, ekonomi, sosial, budaya dan tata ruang.

Sebagai *starting point* yang terpenting dari pembangunan *integrated* di wilayah selatan adalah kebutuhan akan struktur pemanfaatan dan pengendalian ruang yang serasi dan seimbang sehingga tercapai pengembangan wilayah yang terpadu dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Dalam upaya memacu pertumbuhan wilayah selatan pengembangan

wilayah didasarkan pada konsep *Spatial Policy for Equitable Growth*, kebijaksanaan penataan ruang untuk pertumbuhan yang mampu menciptakan pemerataan, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah selatan dengan wilayah lain (*Sectoral and Spatial Linkage*) dan mendorong pertumbuhan pusat-pusat kegiatan (*Growth Pole*).

Ruang lingkup pengembangan wilayah Jalan Lintas Selatan meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dengan batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kalipare, Pagak, Desa Bantur, Desa Gedangan, dan Desa Sumbermanjing Wetan
2. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
3. Sebelah Timur : Kecamatan Dampit dan Kecamatan Tirtoyudo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Blitar

Beberapa desa yang dalam wilayah keempat kecamatan tersebut yang dilalui oleh pengembangan wilayah Jalan Lintas Selatan ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2
Desa-Desa di Kabupaten Malang
Yang Dilalui Jalan Lintas Selatan

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa
1.	Donomulyo	Sumberoto
		Purwodadi
		Mentaraman
		Kedungsalam
		Banjarejo
		Tulungrejo
2.	Bantur	Bandungrejo
		Srignonco
		Sumberbening
3.	Gedangan	Tumpakrejo
		Sindurejo
		Gajahrejo
4.	Sumbermanjing Wetan	Sitiarjo
		Tambakrejo

Sumber: Bappekab Kabupaten Malang, 2009

Sistem transportasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pola perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah dalam pengembangan infrastruktur di Kabupaten Malang. Sistem transportasi di Kabupaten Malang

lebih didominasi oleh transportasi darat terutama jalan raya dan sebagian kereta api, sedangkan untuk transportasi laut hanya sebatas prasarana penangkapan ikan berupa TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yaitu di Sendangbiru.

Sistem transportasi di Kabupaten Malang secara keseluruhan didominasi oleh transportasi jalan raya, dengan sarana dan prasarana yang telah menjangkau wilayah kecamatan yang ada. Dalam pengembangan wilayah sampai saat ini, prasarana transportasi jalan raya telah ditingkatkan antara lain dengan pembangunan dan perbaikan jalan yang ada, maupun lain dengan pembangunan-pembangunan jembatan yang dapat meningkatkan bidang perekonomian. Dalam pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Malang ini, hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah :

1. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten/Kota Malang dengan Kabupaten/kota lainnya.
2. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah-wilayah selatan Kabupaten Malang.
3. Pengembangan jalan lintas selatan yang menjadi penghubung antara Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang.
4. Peningkatan kondisi jalan dan pelebaran atau mengembangkan jalan lintas, untuk mempermudah dan memperlancar akses di wilayah selatan Kabupaten Malang.

Dengan demikian maka hirarki pengembangan wilayah jaringan jalan di wilayah selatan Kabupaten Malang maka pembangunan infrastruktur jalan lintas selatan adalah jalur yang menghubungkan wilayah Jawa bagian selatan. Kecamatan yang dilalui oleh jalan ini adalah Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (melintas di kawasan pantai Sendangbiru), Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading yang melintasi Kawasan Pertanian dan Perhutani.

1. Sasaran Proyek Sampai Dengan Tahun Anggaran 2007

Sampai dengan Tahun Anggaran 2007, program penanganan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur adalah pembukaan

jalur/trase jalan baru dengan pembentukan badan jalan walaupun belum mencapai sasaran mencapai :

- a. Lebar badan jalan : 4.50 meter
- b. Lebar bahu jalan : 2 x 1.50 meter
- c. Lebar saluran tepi : 2 x 1.00 meter

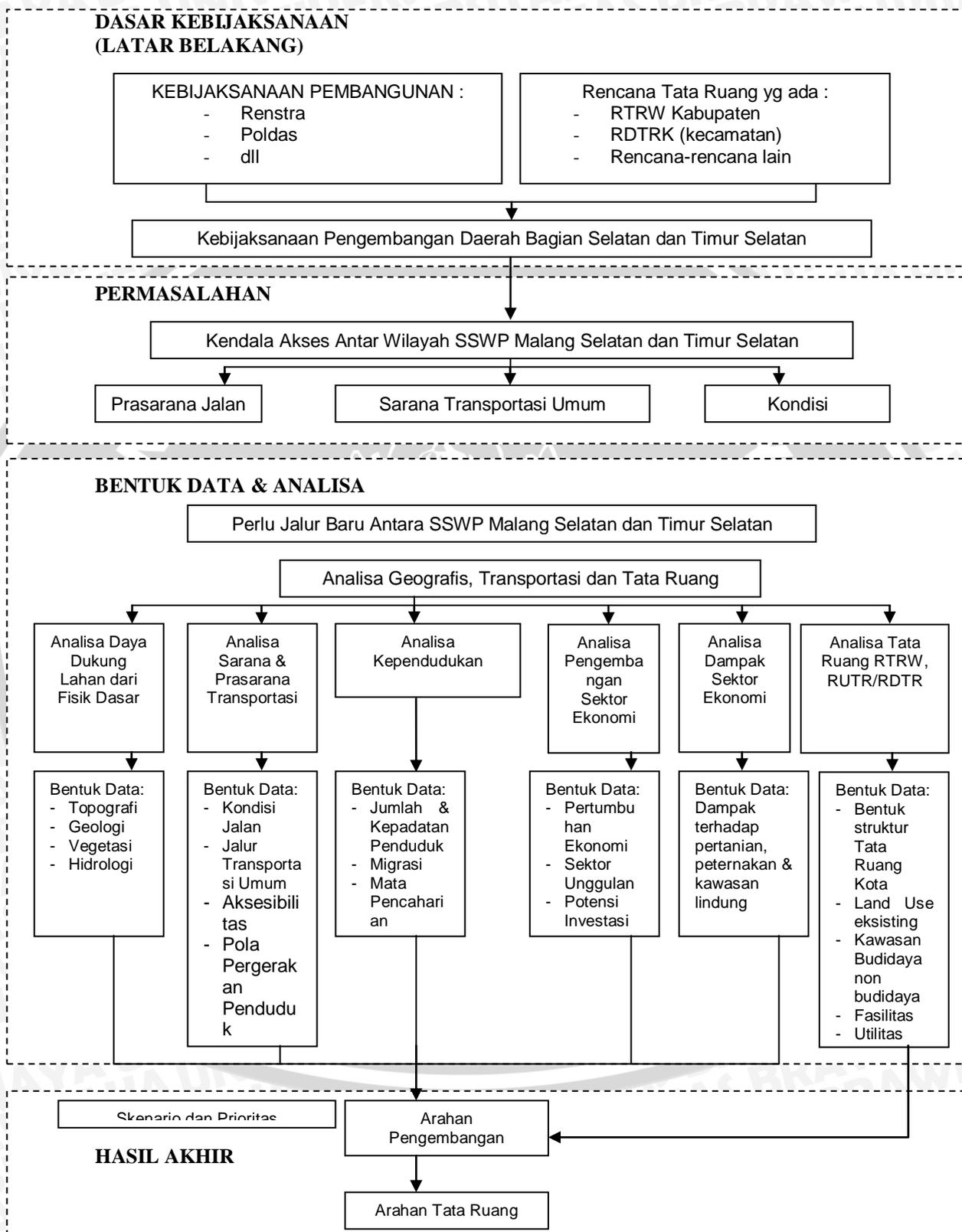
Panjang penanganan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Ruas jalan Blitar – Pangungwaru : 1.00 Km
- b. Ruas jalan Turen – Batas Lumajang : 1.40 Km
- c. Talok – Druju – Sendangbiru : 5.00 Km
- d. Jalan batas Blitar – Mentaraman : 11.00 Km
- e. Jalan Bajulmati – Sendangbiru : 7.00 Km
- f. Jalan Bajulmati – Wonorogo : 8.00 Km

Sebagai sasaran akhir pembangunan jalan lintas selatan Kabupaten Malang Jawa Timur ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan aksesibilitas agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya Pengembangan Wilayah Selatan Jawa Timur
- b. Menunjang sektor-sektor lain seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan pariwisata serta pengembangan budaya dan sosial penduduk setempat
- c. Membentuk sistem jaringan jalan dari atau ke rangkaian jalan lintas selatan Jawa secara menyeluruh (Nasional)

Gambar 2
Konsep Pengembangan Jalan Lintas Selatan



Sumber: Bappekab Kabupaten Malang, 2009

B. Penyajian Data Fokus

1. Upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Wilayah Pada jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang

Rencana Tata Ruang wilayah merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Ruang Wilayah Propinsi dan Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota yang mencakup kawasan-kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan tertentu, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Perencanaan Tata Ruang Wilayah berisikan tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, kebijaksanaan operasional dan kebijaksanaan serta strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah.

Secara regional, berdasarkan hierarki perencanaan tata ruang kawasan perencanaan merupakan salah satu satuan wilayah pengembangan Malang Raya di Propinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat perkembangan relatif pesat, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta pertambangan dan industri, dimana sektor-sektor tersebut telah memicu perubahan dan perkembangan penggunaan lahan yang berpengaruh pada kondisi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 1996 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Propinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa untuk mendorong perkembangan wilayah selatan Jawa Timur yang relatif lamban perkembangannya perlu dilakukan pembangunan "Jalan Lintas Selatan". Dengan pembangunan Jalan Lintas Selatan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah dan memacu pertumbuhan wilayah selatan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, upaya pembangunan Jalan Lintas Selatan tersebut perlu diikuti dengan perencanaan yang komprehensif melalui konsep pembangunan yang terintegrasi. Hal ini juga disampaikan oleh Dra. Santi sebagai berikut:

“JLS (Jalan Lintas selatan) juga berkaitan dengan pengembangan wilayah, dimana di wilayah selatan Kabupaten Malang merupakan wilayah terpencil dan terpelosok. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dalam permasalahan ini perlulah diambil langkah upaya dalam pengembangan wilayah yaitu pembangunan infrastruktur JLS di Kabupaten Malang.” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Juli 2009)

Konsep pembangunan yang terintegrasi tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbul akibat pembangunan Jalan Lintas Selatan, mengingat sebagian besar wilayah selatan merupakan kawasan hutan dan lahan pertanian. Dengan adanya pembukaan jalur baru tersebut yang kemungkinan besar akan melalui kawasan hutan (hutan lindung dan hutan produksi) maka dikhawatirkan akan terjadi perubahan yang cukup signifikan dari kawasan hutan menjadi kawasan terbangun. Selain itu akan terjadi dampak positif dan negatif baik terhadap aspek fisik lahan, ekonomi, sosial, budaya dan tata ruang.

Sebagai *starting point* yang terpenting dari pembangunan *integrated* di wilayah selatan adalah kebutuhan akan struktur pemanfaatan dan pengendalian ruang yang serasi dan seimbang sehingga tercapai pengembangan wilayah yang terpadu dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Dalam upaya memacu pertumbuhan wilayah selatan pengembangan wilayah didasarkan pada konsep *Spatial Policy for Equitable Growth*, kebijaksanaan penataan ruang untuk pertumbuhan yang mampu menciptakan pemerataan, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah selatan dengan wilayah lain (*Sectoral and Spatial Linkage*) dan mendorong pertumbuhan pusat-pusat kegiatan (*Growth Pole*). Hal ini juga disampaikan oleh Dra. Santi sebagai berikut:

“Dalam upaya dari pengembangan wilayah pada pembangunan jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang, Bappekab membagi tahapan-tahapan, antara lain: tahap persiapan dan tahap perencanaan.” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Juli 2009)

Dengan demikian maka tahapan dari Upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Wilayah Pada jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang dibagi menjadi dua tahapan, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang atau disebut juga Bappekab Kabupaten Malang lebih memaksimalkan dalam optimalisasi skenario terhadap jalan lintas selatan. Dimana skenario ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan ke tahapan perencanaan. Skenario dalam pengembangan wilayah dibagi menjadi tiga skenario pengembangan, yaitu:

1. Skenario Optimis I

Pengembangan wilayah dipacu serta optimal dengan terobosan baru yang tetap memperhatikan lingkungan. Pengembangan wilayah yang ditetapkan adalah menitikberatkan pada sektor-sektor potensial, dan memberikan arahan untuk penetapan fungsi kawasan ditunjang dengan infrastruktur yang memadai dan dipacu secara optimal.

2. Skenario Moderat

Pengembangan wilayah dengan standar pengembangan dengan tidak ada terobosan baru untuk mendapatkan perencanaan yang optimal/tetap mempertahankan kondisi semula.

3. Skenario Pesimis

Pengembangan wilayah dengan tetap mempertahankan seperti kondisi semula. Skenario tersebut tidak memberikan masukan dan merupakan pengembangan yang berdasar kenyataan di lapangan dengan melakukan perencanaan berdasarkan *trend*.

Perbandingan dalam pengembangan skenario memerlukan elemen yang dapat memberikan arah untuk mencapai tujuan pengembangan wilayah yang optimal sesuai dengan jenis skenario yang digunakan. Dalam memilih skenario yang tepat, maka

sebelumnya diidentifikasi menurut kondisi di lokasi studi antara lain:

1. Pertumbuhan Wilayah
2. Pemerataan Pembangunan
3. Struktur Ekonomi
4. Pemanfaatan Kawasan Konservasi
5. Transportasi
6. Infrastruktur



Tabel 3
Skenario Pengembangan Kawasan
Sekitar Jalan Lintas Selatan

No.	Elemen Pengembangan Kawasan	Optimis	Moderat	Pesimis
1.	Pertumbuhan Kawasan	Pertumbuhan baik dan merata di seluruh kawasan melalui penerapan terobosan baru yang berupa pengembangan elemen-elemen yang menjadi generator dalam perkembangan kawasan.	Pertumbuhan sedang karena pola perkembangan hanya mengikuti <i>trend</i> dan tidak dipacu secara maksimal.	Pertumbuhan cenderung kurang baik, tidak dikontrol karena tidak ada upaya perencanaan
2.	Pemerataan Pembangunan	Pemerataan pembangunan baik karena terdapat kesempatan perkembangan yang hampir sama pada semua kawasan	Pemerataan pembangunan kurang merata karena didominasi pada kawasan yang relatif sudah berkembang	Pemerataan pembangunan kurang baik karena ketidakeimbangannya sangat tinggi
3.	Kesempatan Kerja	Penyerapan tenaga kerja baik, karena lapangan usaha dapat diciptakan melalui penggalian potensi dan sumber daya manusia guna menciptakan lapangan usaha baru	Penyerapan tenaga sesuai dengan trend yang ada didominasi pada kawasan yang sudah berkembang	Penyerapan tenaga kerja kurang baik, karena tidak ada usaha penciptaan lapangan usaha untuk menyerap tenaga kerja
4.	Struktur Ekonomi	Struktur ekonomi tumbuh dengan baik, karena adanya terobosan baru dengan menyediakan fasilitas penunjangnya pada kawasan	Struktur ekonomi tumbuh kurang baik, karena tidak ada terobosan baru. Sedangkan untuk peningkatan ekonomi mengikuti trend	Struktur ekonomi tidak baik karena tidak ada program peningkatan ekonomi
5.	Pemanfaatan Kawasan Konservasi	Pemanfaatan konservasi kawasan lebih baik, karena adanya peraturan yang melindungi dengan ketat agar terkendali. Konservasi tersebut meliputi: konservasi pantai, sungai, mata air, hutan dan sebagainya	Pemanfaatan kawasan konservasi kurang baik karena tidak ada aturan yang jelas dan peraturan yang cenderung mengikuti trend yang ada	Pemanfaatan kawasan konservasi tidak ada peraturan dalam pemanfaatan, serta upaya-upaya perlindungan kurang
6.	Transportasi	Transportasi kawasan tumbuh dengan baik, karena adanya program peningkatan transportasi tetapi dibutuhkan biaya yang mahal guna mengatasi masalah infrastruktur tersebut	Transportasi kawasan tumbuh kurang baik sesuai dengan trend	Transportasi kurang baik, karena tidak ada perencanaan sehingga menimbulkan kesemrawutan pada titik-titik jalan tertentu
7.	Infrastruktur	Pelayanan sarana dan prasarana baik, karena pemerataan dan pelayanan infrastruktur terencana dan terprogram	Pelayanan infrastruktur kurang baik, karena terpusat pada kawasan yang sudah berkembang	Pelayanan infrastruktur tidak baik karena tidak ada perencanaan yang matang

Sumber: Bappekab Kabupaten Malang, 2009

Selain itu, dalam tahapan persiapan ini upaya Bappekab dalam pengembangan wilayah menitik beratkan pada metode pendekatan dan metode analisa dalam pengembangan wilayah. Dalam metode pendekatan dan metode analisa ini terdapat poin-poin di dalamnya. Metode pendekatan dan metode analisa ini digunakan untuk membantu mempermudah Bappekab dalam pelaksanaan persiapan pengembangan wilayah pada jalan lintas selatan.

1. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Pada Pola Kebijaksanaan

1. Kebijakan yang akomodatif untuk menunjang pengembangan kawasan
2. Berwawasan Lingkungan

b. Pendekatan Perencanaan Berkelanjutan

Pendekatan perencanaan ini diarahkan pada perencanaan yang bertumpu pada kekuatan sendiri dan bermuara pada terciptanya kemandirian dalam mewujudkan ketahanan untuk menghadapi semua tantangan dari dalam maupun luar, mengkonsolidasi semua hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini, serta mengembangkan dan menumbuhkan secara berkelanjutan pada masa mendatang. Sehingga pendekatan perencanaan ini melalui:

1. Pengembangan yang berpijak pada keseimbangan aspek pelestarian dan pengembangan serta berorientasi ke depan (jangka panjang)
2. Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat setempat
3. Pengelolaan aset/sumber data yang tidak merusak namun berkelanjutan untuk jangka panjang baik secara sosial, budaya maupun ekonomi
4. Mengembangkan aspirasi yang lebih peka dari masyarakat dan lingkungan hidup

c. Pendekatan Masyarakat

Pendekatan terhadap masyarakat yang dimulai dengan menggunakan bahasa dialog maupun dengan menyebarkan daftar isian/kuisisioner antara perencana dengan pelaku pembangunan (*stakeholder*) guna menyelaraskan persepsi dalam pemanfaatan tata ruang.

d. Pendekatan Intersektoral Holistik (Komprehensif)

Pendekatan perencanaan ini bertumpu pada perencanaan yang selalu terkait dengan sektor-sektor lain serta wilayah dengan skala lebih luas secara regional atau nasional, sehingga pada tahap selanjutnya didapatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan sektor terkait.

2. Metode Analisa

a. Analisa Kesesuaian Fisik Wilayah

Dalam menganalisa kesesuaian fisik wilayah yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi ataupun revisi disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang ada di lapangan dan mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Kota terdahulu agar rencana-rencana tersebut bersifat dinamis terhadap perkembangan yang terjadi tetapi memiliki prinsip dasar, serta berfungsi sebagai penunjang dan pengendali program-program pembangunan secara keseluruhan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan analisa kesesuaian fisik wilayah adalah sebagai berikut:

1. *Super Impose*

Penggabungan pada beberapa peta yang menjadi variabel untuk dijadikan *tools* dalam menentukan Studi Kelayakan Lahan Kota (SKLK) yang direncanakan.

2. Studi Kelayakan Lahan Kota

Merupakan usaha seleksi terhadap suatu kawasan dalam upaya merencanakan suatu kawasan tersebut, dimana

hasilnya nanti berupa suatu tanah yang layak untuk direncanakan, layak terbatas serta tidak layak untuk dikembangkan.

b. Analisa Struktur Ruang Perkotaan

Untuk menciptakan struktur yang efisien diperlukan penataan dan pengalokasian berbagai kegiatan perkotaan. Proses tersebut diadahi dengan penetapan bagian-bagian wilayah kota serta unit lingkungan agar perkembangan kota nantinya dapat berjalan secara simultan. Adapun dasar pertimbangan wilayah kota yang ditetapkan adalah mempertimbangkan metode perencanaan yang mencakup nilai dan status ruang dengan petunjuk dan alasan perencanaan fisik kawasan perkotaan. Ketentuan nilai dan status ruang itu sangat tergantung pada faktor-faktor nilai dan harga tanah serta faktor pemilikan tanah, sedangkan nilai dan harga tanah tersebut dipengaruhi oleh tersedianya prasarana dan sarana pembentuk elemen perkotaan seperti fasilitas perekonomian, listrik, jalan dan kemudahan fasilitas kota lainnya.

Struktur ruang kawasan perkotaan sangat mempengaruhi pola pemanfaatan ruang di masa mendatang dan dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Di lain sisi, analisa struktur ruang perkotaan dapat ditinjau dengan:

1. Sistem Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan dapat terbentuk dengan melakukan analisa arah pergerakan penduduk dalam melakukan kegiatannya seperti kegiatan berbelanja, kegiatan pendidikan, kegiatan bekerja, dan sebagainya.

2. Model Struktur Ruang Kota

Struktur ruang kota pada dasarnya akan membangun bentuk kota secara umum, struktur ruang kota dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai dengan

tingkat perkembangan dan pertumbuhan kota. Adapun model struktur ruang kota yang ada antara lain:

- a. Konsentrik
 - b. Sektoral
 - c. Multiplei Nuclei
3. Kecenderungan Pemanfaatan Ruang

Kecenderungan pemanfaatan ruang dapat dianalisa dari pola penggunaan tanah eksisting, yaitu dengan cara mengamati kesesuaian lahan bagi setiap peruntukkan. Hasil analisa ini akan digunakan sebagai dasar acuan untuk membuat rencana distribusi penggunaan tanah. Hasil ini juga akan dijadikan dasar arahan yang tepat dalam menentukan peruntukan bangunan/tapak.

Pemanfaatan tanah di kawasan pusat kota cenderung untuk kegiatan berintegrasi lebih tinggi, dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan estetika. Sedangkan di sepanjang jalan utama mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga perubahan guna tanah untuk kegiatan lain yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dapat dilakukan asalkan memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk tiap jenis penggunaannya. Pergeseran ini terutama untuk fasilitas umum, kegiatan perdagangan dan jasa perkantoran dengan intensitas sedang.

- c. Analisa Kependudukan

Analisa kependudukan merupakan salah satu faktor penting dalam kebijaksanaan pengembangan wilayah. Metode yang digunakan adalah model eksponensial.

- d. Analisa Potensi Pengembangan Daerah

Potensi pengembangan adalah potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam rangka pengembangannya di masa mendatang. Potensi pengembangan ini digolongkan menjadi tujuh potensi, yaitu:

1. Potensi pertanian sawah
 2. Potensi pertanian ladang
 3. Potensi perkebunan
 4. Potensi peternakan
 5. Potensi pertambangan
 6. Potensi kerajinan dan industri kecil
 7. Potensi jasa dan perdagangan
 8. Potensi pariwisata
- e. Analisa Fisik Binaan

Analisa fisik binaan ini mencakup analisa terhadap aspek-aspek yang bukan merupakan potensi sumber daya alam, melainkan buatan manusia.

1. Analisa Tata Guna Tanah

Analisa *land use* atau penggunaan tanah ini merupakan bahasan tentang peninjauan kondisi penggunaan tanah saat ini berdasarkan hasil survey primer dan skunder yaitu dengan cara mengamati kesesuaian lahan bagi setiap peruntukan. Hasil analisa ini akan digunakan sebagai dasar acuan untuk membuat rencana distribusi penggunaan tanah. Hasil ini juga akan dijadikan dasar arahan yang tepat dalam menentukan peruntukan bangunan/tapak.

Penilaian terhadap pemanfaatan lahan berdasarkan perkembangan jumlah penduduk, perkembangan kegiatan penduduk yang disesuaikan dengan standar pemenuhan yang ada serta yang dengan luas dari suatu wilayah. Dimana untuk analisa fisik binaan, meliputi:

- a. Alternatif pengembangan
- b. Kegiatan utama yang direkomendasikan
- c. Kegiatan yang akan muncul
- d. Kesesuaian ruang

2. Analisa Penggunaan Tanah dan Transportasi

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam dan alternatif-alternatif pemecahan yang baik, perlu dilakukan suatu pendekatan secara sistem makro yang terdiri dari beberapa sub sistem transportasi mikro. Sistem transportasi yang makro terbagi menjadi beberapa sub sistem mikro yang saling mempengaruhi dan terkait, sistem mikro tersebut antara lain:

- a. Sistem jaringan (Prasarana Transportasi/*Transportation Supply*)
- b. Sistem pergerakan (Lalu lintas/*Traffic*)
- c. Sistem Kelembagaan (Institusi)

Jaringan jalan merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk menerangkan kuantitatif sistem transportasi dan sistem karakteristik ruang. Suatu sistem jaringan transportasi ditunjukkan sebagai suatu jaringan untuk menerangkan komponen dan hubungannya satu sama lain dalam sistem transportasi. Selain itu pengertian tentang jaringan jalan merupakan simpul-simpul yang dalam hal ini berupa persimpangan yang dihubungkan dengan ruas-ruas jalan. Untuk mengenal jaringan maka ruas-ruas ataupun simpul-simpul diberi nomor atau nama tertentu.

Model jaringan jalan merupakan penyederhanaan dari model jaringan jalan yang ada antara lain:

1. *Jalan Regional*, mempunyai konsentrasi populasi yang rendah dan insentivitas tata guna tanah yang rendah pula. Tata guna tanah yang utama adalah pertanian dan pertambangan mineral, biasanya kebutuhan akan akses sangat rendah. Pada daerah luar kota terdapat perbedaan yang jelas antara jaringan jalan antar kota dengan kecepatan tinggi yang dibuat untuk lalu lintas angkutan antar kota dengan jaringan jalan pengisi dan akses yang

khusus digunakan untuk membawa hasil pertanian ke pasar dan mengalirkan lalu lintas ke dalam jaringan jalan antar kota.

2. *Jalan Urban*, kawasan urban mempunyai populasi dan intensitas tata guna tanah yang tinggi. Tata guna tanah digunakan untuk perkantoran, pertokoan dan industri serta lain-lain. Kebutuhan akan akses tinggi berhubungan dengan konsentrasi penduduk yang tinggi.

b. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengembangan suatu wilayah bertujuan untuk membentuk lingkungan yang baik dan serasi dengan efisiensi penggunaan tanah yang ada. Oleh sebab itu harus terdapat kesesuaian antar program kerja pembangunan, pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebagai pedoman pembangunan. Hal ini juga disampaikan oleh Dra. Santi sebagai berikut:

“Dalam pengembangan wilayah di wilayah selatan Kabupaten Malang dilaksanakan pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Selatan (JLS). Dalam perencanaan Bappekab, ternyata tidak hanya pembangunan infrastruktur JLS saja yang diutamakan, tetapi pembangunan-pembangunan yang lain. Dalam pembangunan infrastruktur, tidak hanya mementingkan apa yang dijadikan prioritas utama, melainkan pembangunan dalam pengembangan wilayah harus melihat side effect dari pembangunan infrastruktur, tidak hanya melihat dari sisi ekonomi saja. Bappekab sebagai biro pelayanan publik harus memperhatikan kepentingan masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Juli 2009)

Salah satunya adalah dengan menetapkan arahan struktur dalam pengembangan wilayah, yang tujuannya adalah:

1. Pengembangan kegiatan yang merata di seluruh wilayah secara berjenjang dan terstruktur
2. Mengurangi beban pusat pelayanan dengan membagi wilayah secara terstruktur
3. Membagi pusat-pusat pelayanan berdasarkan fungsi primer dan skunder sesuai dengan kemampuannya

4. Menciptakan aksesibilitas yang tinggi antara pusat dan sub pusat pelayanan yang dibentuk

a. Arahan Pengembangan Wilayah Secara Umum

Dalam tahapan perencanaan ini, rencana dari pengembangan wilayah di sepanjang jalan lintas selatan mencakup beberapa rencana pengembangan yang meliputi arahan pengembangan wilayah secara umum, antara lain:

1. Pemukiman

Pemukiman yang ada cenderung bergerak linier mengikuti jaringan jalan yang ada dan menuju ke arah selatan. Perkembangan ini menyebabkan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan penyangga dan lindung yang ada. Namun demikian, tidak semua desa perkembangan pemukimannya mendekati dan mengenai jalan lintas selatan, dikarenakan jarak jalan yang berbeda dari pusat desa, serta perbedaan kondisi topografi.

Adapun rencana dari pengembangan permukiman ditujukan pada masing-masing zoning kawasan (desa), adalah sebagai berikut:

- a. Zoning Desa Sumberoto
- b. Zoning Desa Purwodadi
- c. Zoning Desa Mentaraman
- d. Zoning Desa Kedungsalam
- e. Zoning Desa Banjarejo
- f. Zoning Desa Tulungrejo
- g. Zoning Desa Bandungrejo
- h. Zoning Desa Sumberbening
- i. Zoning Desa Srigonco
- j. Zoning Desa Tumpakrejo
- k. Zoning Desa Sindurejo
- l. Zoning Desa Gajahrejo
- m. Zoning Desa Sitarjo

n. Zoning Desa Tambakrejo

Sehubungan dengan rencana pengembangan kawasan permukiman pada masa yang akan datang, serta adanya luas lahan pertanian, maka pada zoning ini lebih diarahkan pengembangannya dengan mempertahankan kepadatannya pada kawasan permukiman baru di lokasi-lokasi yang masih kosong, selain itu juga perlu dilakukan pengembangan *buffer zone* bagi kawasan permukiman yang berbatas langsung dengan hutan. Sedangkan untuk permukiman yang berkembang pada sekitar jalan lintas selatan perlu adanya pengamanan dan batasan perkembangan dengan syarat perkembangan beradius ± 200 m dengan prosentase 30 – 40 % dari luas pemanfaatan lahan sekitar jalan lintas selatan.

2. Pertanian dan Perkebunan

Dalam kaitannya dengan pola penggunaan tanah, pertanian di empat wilayah kecamatan pada kawasan pengembangan jalan lintas selatan masih cukup mendominasi. Secara umum pertanian ada yang berupa pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan menggunakan sistem pertanian lahan kering/tegalan serta pertanian lahan basah/sawah, yang dalam hal ini berupa sawah tadah hujan.

Lahan pertanian yang berupa tegalan lebih luas dibandingkan dengan lahan pertanian sawah. Lahan tegalan tersebut tersebar merata di seluruh wilayah pengembangan dengan kecenderungan yang mengarah pada kegiatan konversi lahan, yaitu pengalihfungsian lahan tegalan menjadi lahan terbangun.

Sedangkan untuk lahan pertanian sawah luasan yang dimiliki pada masing-masing zoning/desa di kawasan pengembangan sudah cenderung menurun, dikarenakan adanya perkembangan wilayah yang mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan juga semakin meningkat. Di samping itu, lahan

pertanian sawah yang tersisa pada lokasi-lokasi tertentu cenderung mengalami perubahan akan penggunaan lahannya, yang disebabkan pada sekitar lokasi tersebut telah merupakan kawasan terbangun yang lambat laun akan mengalami perluasan.

Arah perkembangan kegiatan pertanian umumnya cenderung menyerupai arah perkembangan pemukiman, yang tersebar merata di semua desa dan menuju ke arah selatan. Perkembangan kegiatan ini juga mengakibatkan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan penyangga dan kawasan lindung lainnya, sehingga diperlukan adanya pembatasan perkembangan untuk lahan pertanian karena perkembangan ini cenderung mengorbankan keberadaan hutan. Sementara untuk lahan hutan yang telah menjadi lahan pertanian diupayakan pemulihan fungsi hutan melalui pengembangan tanaman tegakkan yang berproduksi maupun pengembangan penanaman tanaman hutan sendiri. Berikut akan diuraikan rencana perkembangan kegiatan pertanian pada seluruh kawasan sepanjang jalan lintas selatan:

1. Penggunaan sistem pertanian secara bergilir
 2. Mencegah alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian
 3. Perlindungan lahan sawah
 4. perlindungan lahan hutan dari terjadinya alih fungsi dengan pengembangan *buffer zone area*
 5. Perbaikan dan pengembangan irigasi
3. Perikanan

Usaha-usaha pengembangan sektor perikanan tidak berkembang merata di tiap zoning. Pada kawasan pengembangan jalan lintas selatan, untuk sektor usaha perikanan laut hanya berkembang pada zoning-zoning tertentu yang memiliki potensial tersebut, seperti di pantai Kondang Merak, Sendang Biru, Tamban dan Bajulmati.

Rencana dari pengembangan wilayah berdasarkan komoditi perikanan akan dititik beratkan pada beberapa zoning di kawasan jalan lintas selatan.

Tabel 4
Rencana Pengembangan Perikanan

Lokasi	Pasca Tangkap	Rencana Pengembangan
Kondang Merak	Di pasarkan lokal hingga regional	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jangkauan penangkapan dengan motorisasi - Perbaikan teknologi penangkapan
Wonogoro	Di pasarkan lokal	Pembinaan dan pengembangan armada penangkapan
Bajulmati	Di pasarkan lokal	Pembinaan dan pengembangan armada penangkapan
Sendang Biru	Di pasarkan hingga regional (Kab. Malang dan sekitarnya), internasional (ekspor) dan pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pelabuhan dengan berbagai fasilitasnya - Pendirian pabrik es di lokasi terdekat - Peningkatan kualitas TPI yang ada - Pengembangan industri pengolahan
Tamban	Di pasarkan hingga regional (Kab. Malang dan sekitarnya), internasional (ekspor) dan pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan permodalan - Pendirian pabrik es di lokasi terdekat - Pengembangan industri pengolahan

Sumber: *Bapekab Kabupaten Malang, 2009*

4. Pertambangan

Sumber daya pertambangan yang ada pada beberapa lokasi di wilayah zoning kawasan pengembangan jalan lintas selatan umumnya belum dimanfaatkan secara optimal.

Potensi tambang batu kapur yang cukup berpotensi hampir terdapat di semua zoning yang ada. Dimana keberadaan batu kapur pada kawasan perencanaan terutama pada wilayah

bagian selatan termasuk pada hasil tambang yang tidak layak tambang dan layak tambang terbatas. Di samping batu kapur, potensi tambang lainnya yang ada berupa potensi batu bintang yang terdapat di zoning Desa Mentaraman, Tumpakrejo dan Gajahrejo, untuk potensi pasir besi di zoning Desa Tumpakrejo, potensi dolosit di zoning Desa Gajahrejo, serta potensi batu bara terdapat di zoning Desa Gajahrejo dan Sitarjo, untuk kalosit hanya terdapat di Desa Sitarjo.

Dengan adanya potensi-potensi tambang baik yang sudah di gali maupun yang belum di gali, pengelolaan serta pengembangannya di masa yang akan datang diarahkan agar tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan alam sekitarnya serta perlunya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Alam dan Pihak-pihak swasta lain yang berkaitan.

5. Industri

Pola perkembangan dan persebaran industri yang ada di wilayah zoning sangat terbatas dan cenderung menyatu dengan pemukiman penduduk. Sebagian besar masih berupa industri kecil dengan proses produksinya yang masih sangat sederhana.

Semua zoning dalam kawasan pengembangan jalan lintas selatan memiliki potensi hasil perkebunan yang akan datang untuk sektor industri pengolahan hasil perkebunan diarahkan untuk dikembangkan secara merata di tiap-tiap zoning.

Untuk industri pengolahan hasil hutan (kayu jati dan akasia) yang dijadikan meubel terdapat di zoning Desa Sumberbening yang dapat dikategorikan sebagai industri sedang jika dibandingkan dengan industri meubel pada zoning-zoning lainnya. Arah pengembangan untuk hasil industri hutan ini yaitu dengan mempertahankan industri yang ada (pada zoning Desa Bandungrejo dan Desa Sumberbening),

karena lokasinya sudah cukup dekat dengan sumber bahan baku, dengan akses yang cukup mudah.

Sedangkan untuk industri pengolahan hasil perikanan, perkembangannya diarahkan pada zoning yang memiliki sumberdaya hasil perikanan baik darat maupun laut, didukung oleh pemanfaatan lahan budidaya di sekitarnya, yang memungkinkan bagi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan.

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan tidak diarahkan di semua lokasi yang memiliki potensi perikanan. Untuk lokasi pengembangan sarana dan prasaran industri pengolahan hasil perikanan di masa yang akan datang yang sangat sesuai dengan kondisi yang diharapkan diarahkan pada kawasan pantai Sendang Biru dan Pantai Tamban. Dimana pada kawasan ini telah terdapat aktifitas penangkapan ikan dan pertambakan, yang juga dilengkapi dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Selain itu, kawasan ini juga telah menjadi sentra hasil perikanan laut bagi Kabupaten Malang dan sekitarnya, didukung akses yang memadai, serta tersedianya lahan budidaya bagi pengembangan sektor industri perikanan di masa yang akan datang.

Secara umum, munculnya industri-industri pengolahan baru diarahkan pada lokasi yang memiliki akses mudah, terkait dengan kemudahan bagi proses mendatangkan bahan baku maupun pemasarannya.

6. Pariwisata

Jenis pariwisata yang terdapat pada kawasan pengembangan jalan lintas selatan berupa obyek wisata pantai yang potensial dan tersebar di semua zoning dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 pantai.

Adapun arahan pengembangan obyek wisata pantai yang terdapat pada masing-masing zoning adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan *buffer zone area*
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi
 - c. Pengadaan fasilitas wisata
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana utilitas
 - e. Pengembangan informasi/promosi
- b. Arahan Pengembangan Wilayah Sepanjang Koridor Jalan Lintas Selatan

Adanya jalan lintas selatan akan memacu pertumbuhan dan perkembangan di kawasan selatan. Terlebih di sepanjang koridor jalan serta pada simpul-simpul pertemuan antara jalan desa/sirip dengan jalan lintas yang juga terhubung dengan obyek wisata yang ada.

Selain karena adanya kecenderungan perkembangan kegiatan perkotaan yang terus bergerak ke arah selatan, perubahan dan perkembangan yang signifikan akan terjadi terkait dengan pengembangan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa/zoning. Yang dalam hal ini pengembangan potensi dan sumber daya tersebut tentunya juga dilaksanakan dengan pengembangan segala jenis fasilitas, utilitas, serta infrastruktur penunjang yang diperlukan.

Untuk menghindari konflik yang lebih kompleks di sepanjang koridor jalan lintas yang terkait dengan kecenderungan yang ada, diperlukan pengendalian yang ketat terhadap fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini arahan batas toleransi pemanfaatan lahan yang diperkenankan di sepanjang koridor kanan kiri jalan lintas adalah radius 200 meter.

Arahan pengembangan sepanjang koridor jalan lintas yang melalui masing-masing zoning akan diuraikan sebagai berikut:

1. Zoning Desa Sumberoto

Pada zoning ini kegiatan yang keberadaannya dekat dengan jalan lintas ini adalah kegiatan pemukiman, dimana dengan letaknya yang tidak terlalu jauh dari jalan lintas, sangat memungkinkan kegiatan tersebut berkembang hingga mencapai koridor jalan lintas dan menjadi tarikan bagi munculnya kegiatan lainnya. Kecenderungan ini semakin besar karena didukung pemanfaatan lahan sepanjang koridor jalan lintas selatan yang melalui zoning ini berupa tegalan dan perkebunan.

Dengan adanya kecenderungan tersebut, pengembangan di sepanjang koridor dapat diarahkan pada:

- a. Pembentukan *buffer zone* di sepanjang kanan-kiri jalan lintas selatan, yang membatasi dengan lahan tegalan dan perkebunan.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi dengan mengembangkan tanaman tegakkan maupun berupa hutan sendiri.
- c. Membatasi perkembangan kegiatan permukiman guna mengurangi munculnya kegiatan lainnya.
- d. Pengendalian dan pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- e. Larangan adanya aktifitas penambangan terkait dengan banyaknya potensi tambang batu kapur pada koridor jalan lintas selatan, guna mencegah pengrusakan yang mengakibatkan munculnya bencana alam (tanah longsor)
- f. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan

2. Zoning Desa Purwodadi

Pemanfaatan lahan di sepanjang jalan lintas pada zoning ini berupa pemukiman penduduk, tegalan, kebun dan sedikit hutan. Dari pusat zoning, simpul pertemuan jalan desa/sirip dengan jalan lintas tidak terlalu jauh, yang menyebabkan kecenderungan perkembangan kegiatan perkotaan sangat tinggi di kawasan ini.

Arahan pengembangannya koridor untuk masa yang akan datang adalah:

- a. Pembentukan *buffer zone* di sepanjang kanan-kiri jalan lintas selatan, yang membatasi dengan lahan tegalan dan perkebunan.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi dengan mengembangkan tanaman tegakkan maupun berupa hutan sendiri.
- c. Membatasi perkembangan kegiatan permukiman guna mengurangi munculnya kegiatan lainnya.
- d. Pengendalian dan pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- e. Larangan adanya aktifitas penambangan terkait dengan banyaknya potensi tambang batu kapur pada koridor jalan lintas selatan, guna mencegah pengrusakan yang mengakibatkan munculnya bencana alam (tanah longsor)
- f. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan

3. Zoning Desa Mentaraman

Koridor jalan lintas selatan yang melalui zoning ini dimanfaatkan sebagai permukiman, tegalan, kebun dan sedikit sawah. Hal tersebut tentunya akan memacu terjadinya alih fungsi lahan khususnya di sepanjang koridor dan simpul

pertemuan jalan lintas dengan jalan sirip di masa yang akan datang. Guna mengantisipasi, arahan pengembangan koridor yang dapat dilakukan adalah:

- a. Pembentukan *buffer zone* di sepanjang kanan-kiri jalan lintas selatan, yang membatasi dengan lahan tegalan dan perkebunan.
 - b. Membatasi perkembangan kegiatan permukiman guna mengurangi munculnya kegiatan lainnya.
 - c. Pengendalian dan pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
 - d. Larangan adanya aktifitas penambangan batu kapur
 - e. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan
4. Zoning Desa Kedungsalam

Lahan pada koridor jalan lintas yang melalui zoning ini digunakan sebagai permukiman, tegalan, kebun dan hutan. Pada kawasan yang berupa tegalan dan kebun merupakan lahan yang berpotensi untuk beralih fungsi pada beberapa tahun yang akan datang. Kecenderungan ini menjadi lebih besar karena didukung adanya obyek wisata Pantai Nglipyep yang telah dikembangkan dan dikelola yang letaknya di sebelah selatan zoning ini. Arahan pengembangannya berupa:

- a. Pembentukan *buffer zone* di sepanjang kanan-kiri jalan lintas selatan, yang membatasi dengan lahan tegalan dan perkebunan.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi dengan mengembangkan tanaman tegakkan maupun berupa hutan sendiri.
- c. Membatasi perkembangan kegiatan permukiman guna mengurangi munculnya kegiatan lainnya.

- d. Pengendalian dan pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- e. Larangan adanya aktifitas penambangan batu kapur
- f. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan

5. Zoning Desa Banjarejo

Jalan lintas selatan pada zoning ini melalui sebagian besar melalui hutan, hanya sedikit yang melalui tegalan dan kebun. Simpul pertemuan jalan lintas dengan jalan sirip cukup jauh dari pusat zoning, namun demikian tidak seberapa jauh dari simpul pertemuan tersebut terdapat beberapa permukiman penduduk yang diperkirakan akan terus berkembang ke arah selatan karena didukung pemanfaatan lahan sekitarnya yang berupa tegalan dan kebun yang langsung berbatasan dengan jalan lintas dan hutan negara. Arahan pengembangan pada koridor jalan lintas yang melalui zoning ini adalah:

- a. Pembentukan *buffer zone* di sepanjang kanan-kiri jalan lintas selatan, yang membatasi dengan lahan tegalan dan perkebunan.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi.
- c. Membatasi perkembangan kegiatan permukiman guna mengurangi munculnya kegiatan lainnya.
- d. Pengendalian dan pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- e. Larangan adanya aktifitas penambangan batu kapur.
- f. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan.

6. Zoning Desa Tulungrejo

Untuk zoning ini, koridor jalan lintas berfungsi sebagai hutan yang cukup jauh dari pusat zoning.

Arahan pengembangan sepanjang koridor jalan lintas selatan pada zoning ini meliputi:

- a. Pembentukan *buffer zone* di sepanjang kanan-kiri jalan lintas selatan, yang membatasi dengan hutan negara.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi.
- c. Pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- d. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan.

7. Zoning Desa Bandungrejo

Jarak dari pusat zoning ini menuju simpul pertemuan jalan lintas selatan dan jalan sirip cukup jauh. Dimana pemanfaatan lahan sepanjang koridor jalan lintas adalah sebagai hutan negara. Arahan pengembangan koridor jalan lintas selatan pada zoning ini berupa:

- a. Pembentukan *buffer zone* di sepanjang kanan-kiri jalan lintas selatan, yang membatasi dengan hutan negara.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi.
- c. Pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- d. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan.

8. Zoning Desa Sumberbening

Jalan lintas yang melalui zoning ini melewati hutan negara. Namun tidak jauh dari situ terdapat obyek wisata Pantai Kondangmerak yang cukup potensial yang ada di dalamnya juga terdapat pemukiman nelayan walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu besar.

Akses dari pusat zoning jaraknya cukup jauh dengan topografi yang tidak terlalu terjal dan belum didukung oleh kondisi jalan yang memadai.

Dengan topografi yang relatif datar tersebut, sebenarnya kegiatan permukiman dan perkotaan dapat dengan mudah berkembang, terlebih adanya kecenderungan yang terus menuju ke arah selatan. Namun karena adanya hutan negara, kecenderungan perkembangan hingga mencapai simpul pertemuan dan koridor jalan lintas menjadi kecil. Walaupun begitu tetap diperlukan arahan pengembangan koridor jalan lintas yang berupa:

- a. Pembentukan *buffer zone* di sepanjang kanan-kiri jalan lintas selatan, yang berbatasan dengan hutan negara.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi
- c. Membatasi perkembangan kegiatan permukiman khususnya permukiman nelayan..
- d. Pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- e. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan.

9. Zoning Desa Srigonco

Seperti pada zoning sebelumnya, jalan lintas selatan yang melalui zoning ini juga melalui hutan negara. Pertemuan

jalan lintas dengan jalan sirip cukup jauh dari pusat zoning, yang telah didukung oleh kondisi jalan desa/sirip yang sudah memadai (aspal dalam keadaan kondisi baik), seiring dengan adanya pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang, pengembangan koridornya diarahkan pada:

- a. Pembentukan *buffer zone* di sepanjang kanan-kiri jalan lintas selatan, yang membatasi dengan hutan negara.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi.
- c. Pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- d. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan.

10. Zoning Desa Tumpakrejo

Di zoning ini lahan yang ada di sepanjang koridor jalan lintas dimanfaatkan sebagai permukiman, tegalan, kebun dan hutan. Walaupun jarak simpul pertemuan jalan lintas dan jalan sirip dari pusat zoning cukup jauh, tetapi di sekitar simpul tersebut telah terdapat permukiman penduduk yang sudah ada sebelum jalan lintas selatan terbentuk. Dengan keadaan tersebut, arahan pengembangannya adalah:

- a. Pembentukan *buffer zone* di sepanjang jalan lintas selatan.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi.
- c. Membatasi perkembangan kegiatan permukiman.
- d. Pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- e. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan.

11. Zoning Desa Sindurejo

Untuk jalan lintas selatan yang melalui zoning ini, koridor yang dilalui berupa hutan negara yang jaraknya cukup jauh dari pusat zoning. Pengembangan koridornya diarahkan pada:

- a. Pembentukan *buffer zone* di sepanjang jalan lintas selatan.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi dengan tanaman tegakkan maupun tanaman hutan sendiri.
- c. Pengendalian dan pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- d. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan.

12. Zoning Desa Gajahrejo

Koridor jalan lintas selatan pada zoning ini berupa hutan negara dan cenderung mendekati pantai (Pantai Bajulmati) yang berjarak ± 25 meter. Di dekat simpul pertemuan jalan lintas dan jalan sirip desa terdapat sedikit permukiman yang berdekatan dengan hutan. Oleh sebab itu, arahan pengembangan kawasan koridornya di masa yang akan datang berupa:

- a. Pembentukan *buffer zone* di pada sekitar kawasan permukiman dan sepanjang jalan lintas selatan.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi
- c. Membatasi perkembangan kegiatan permukiman.
- d. Pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- e. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan.

13. Zoning Desa Sitarjo

Pada zoning ini, koridor jalan lintas berupa kebun dan hutan negara dengan topografi yang bergelombang. Simpul pertemuan jalan lintas dengan jalan sirip jaraknya cukup jauh dari pusat desa, terlebih terhadap kawasan kegiatan permukiman. Namun pada beberapa tempat di sepanjang jalan lintas telah mulai terlihat munculnya beberapa permukiman penduduk yang tentunya jika dibiarkan akan terus berkembang di sepanjang koridor jalan. Untuk itu upaya Bappekab dalam menyikapi perkembangan tersebut maka sepanjang koridor jalan lintas ini diarahkan pada:

- a. Pembentukan *buffer zone* di pada sekitar kawasan permukiman dan sepanjang jalan lintas selatan.
- b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi
- c. Membatasi perkembangan kegiatan permukiman di sepanjang jalan lintas.
- d. Pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
- e. Dengan potensi batu kapur yang dimiliki, perlu diterapkan larangan terhadap aktifitas penambangan batu kapur.
- f. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan.

14. Zoning Desa Tambakrejo

Keadaan yang hampir sama terjadi pada koridor jalan lintas pada zoning ini, dimana pemanfaatan lahan yang ada berupa kebun, hutan negara, serta beberapa permukiman penduduk. Namun pada beberapa dua titik, jalan lintas pada zoning ini juga melalui permukiman penduduk yang lebih

ramai dan lebih dekat jaraknya dengan sub pusat zoning (Dusun Sendang Biru).

Keadaan ini tentunya akan menjadi kecenderungan yang tinggi bagi berkembangnya kegiatan permukiman dan perkotaan pada zoning ini. Oleh sebab itu arahan pengembangannya adalah:

- a. Pembentukan *buffer zone* di pada sekitar kawasan permukiman dan sepanjang jalan lintas selatan.
 - b. Mengembalikan fungsi hutan yang sudah beralih fungsi
 - c. Membatasi perkembangan kegiatan permukiman dan perkotaan di sepanjang jalan lintas pada radius 200 meter kanan dan kiri jalan.
 - d. Pengawasan ketat pada simpul pertemuan jalan lintas selatan dengan jalan desa/sirip.
 - e. Larangan terhadap aktifitas penambangan potensi batu kapur.
 - f. Meningkatkan pengamanan di sepanjang jalan lintas selatan guna mencegah perambahan hutan.
- c. Rencana Pengembangan Fasilitas

Kebutuhan fasilitas sosial sangat dibutuhkan seiring dengan berkembangnya suatu wilayah, dimana kebutuhan tersebut merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan dasar penduduk pada wilayah tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah yang paling utama adalah pemenuhan kebutuhan fasilitas. Pemenuhan kebutuhan fasilitas adalah adanya kecenderungan manusia dalam menuntut pemenuhan kebutuhan yang dekat, mudah dan aman, sehingga dalam penyediaan fasilitas di suatu wilayah harus diupayakan untuk memenuhi tuntutan itu dengan

cara mencari lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan memenuhi selera pemakai/konsumennya.

Selain itu, kemampuan berkembangnya suatu wilayah ditunjukkan dengan adanya sistem penyebaran, kelengkapan dan kepastian pelayanan dari fasilitas yang ada. Perkembangan penduduk yang tidak diimbangi dengan pengadaan dan penyebaran fasilitas yang memadai akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan penduduk itu sendiri. Akan tetapi ada pula alternatif lain dimana dengan penambahan dan penempatan satu jenis fasilitas, akan membangkitkan perkembangan bagi wilayah yang masih kurang berkembang.

Kebutuhan akan fasilitas pada masing-masing zoning di empat wilayah kecamatan dalam kawasan pengembangan jalan lintas selatan tidak hanya didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk sampai tahun perencanaan dan standar kebutuhan fasilitas, tetapi juga sesuai dengan kecenderungan perkembangan yang terjadi saat ini serta arahan kegiatan di setiap kawasan. Selain itu penambahan fasilitas yang dilakukan menggunakan konsep pemerataan di seluruh wilayah, agar kebutuhan semua penduduk dapat terpenuhi. Distribusi fasilitas di masing-masing wilayah pada kawasan pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Pendidikan

Untuk menentukan kebutuhan fasilitas pendidikan diperoleh berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah ditahun perencanaan (tahun 2010) pada masing-masing zoning, yang disesuaikan dengan standar daya tampung fasilitas pendidikan yang dibutuhkan.

Pada tahun 2010, penambahan fasilitas pendidikan yang berupa TK, SD, dan SMP terjadi di semua zoning/desa, sedangkan untuk penambahan fasilitas pendidikan yang berupa SMU hanya terjadi pada zoning VII, VII, X dan XIII.

Penambahan dilakukan tidak hanya mengacu pada kebutuhan masyarakat saja. Dari hasil proyeksi, beberapa zoning membutuhkan penambahan, namun karena didukung faktor kedekatan jarak dengan wilayah/zoning lain, serta kemudahan akses transportasi yang dimiliki, yang memungkinkan masyarakatnya memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan tersebut di zoning/desa tetangga, sehingga penambahan dan pengadaan akhirnya tidak dilakukan. Lebih jelasnya jumlah kebutuhan fasilitas pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5
Tabel Rencana Pengembangan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Kecamatan		Eksisting				Kebutuhan tahun 2010			
Zoning	Desa	TK	SD	SM P	SM U	TK	SD	SM P	SM U
Donomulyo									
I	Sumberoto	2	6	1	1	3	3	1	-
II	Purwodadi	7	5	-	-	2	3	-	-
III	Mentaraman	1	4	-	-	3	3	-	-
IV	Kedungsala	3	7	-	-	5	5	-	-
V	m	1	3	-	-	2	3	1	-
VI	Banjarejo Tulungrejo	1	2	-	-	1	1	-	-
Bantur									
VII	Bandungrejo	4	6	1	-	2	4	1	1
VIII	Sumberbenin	2	5	1	-	3	3	1	1
IX	g srigonco	2	3	1	-	2	2	1	-
Gedangan									
X	Tumpakrejo	1	5	1	-	3	4	1	1
XI	Sindurejo	-	3	1	-	2	3	1	-
XII	Gajahrejo	1	4	1	-	3	3	1	-
Sumbermanjing Wetan									
XIII	Sitiarjo	2	5	1	1	4	4	1	1
XIV	Tambakrejo	3	4	1	-	3	3	1	-

Sumber: Hasil Rencana Bappedab Kabupaten Malang, 2009

2. Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan penduduk di satu wilayah. Di kawasan pengembangan terdapat 1 unit puskesmas, selain itu juga tersebar puskesmas pembantu, posyandu dan polindes hampir di semua zoning. Untuk tenaga medisnya berupa praktek dokter dan bidan dengan jam kerja yang masih terbatas. Kebutuhan fasilitas kesehatan ini meliputi:

a. Puskesmas

Jumlah puskesmas yang ada di wilayah perencanaan pada tahun 2003 sebanyak 1 unit. Dari hasil perhitungan jumlah penduduk di kawasan perencanaan, pada tahun 2010 jumlah fasilitas puskesmas tidak memerlukan penambahan.

b. Puskesmas Pembantu

Konsep pengembangan pelayanan puskesmas pembantu yang digunakan yaitu konsep kewilayahan, jadi tidak hanya berdasarkan standard penduduk pendukungnya. Akan tetapi tiap wilayah zoning minimum mempunyai 1 unit puskesmas pembantu. Dimana saat ini jumlah puskesmas pembantu yang tersebar sebanyak 12 unit. Berdasarkan standar penduduk minimum untuk puskesmas pembantu, pada tahun 2010 jumlah fasilitas puskesmas pembantu tidak memerlukan penambahan.

c. Praktek Dokter

Praktek dokter yang ada sampai tahun 2003 di kawasan perencanaan sebanyak 1 unit yang terdapat di zoning Desa Sitarjo. Dari standar dan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk wilayah perencanaan tahun 2010, semua zoning di wilayah pengembangan memerlukan penambahan tempat praktek dokter masing-masing sebanyak 1 unit. Sedangkan untuk zoning Desa Kedungsalam penambahannya sebanyak

2 unit. Tetapi untuk zoning Desa Tulungrejo dan Desa Srigonco belum memerlukan penambahan dikarenakan akses yang ada memungkinkan untuk terlayani di zoning/desa tetangga atau pusat kecamatan.

d. Praktek Bidan

Praktek bidan pada tahun 2003 di wilayah perencanaan sebesar 6 unit yan terdapat hanya di beberapa zoning saja. Dengan standar dan hasil perhitungan jumlah penduduk di wilayah perencanaan di tahun 2010 masing-masing zoning membutuhkan penambahan 1 unit praktek bidan.

e. Balai Pengobatan

Pada tahun 2010 seluruh zoning di kawasan perencanaan memerlukan penambahan balai pengobatan masing-masing sebanyak 1 unit, kecuali di zoning Desa Bandungrejo dan zoning Desa Sitarjo masing-masing membutuhkan penambahan sebesar 2 unit.

f. Polindes

Polindes merupakan salah satu jenis fasilitas kesehatan sejenis poliklinik. Jumlah polindes eksisting sebanyak 12 unit yang tersebar hampir di tiap zoning. Berdasarkan perhitungan dan standar kebutuhan, maka pada tahun 2010 tidak terdapat penambahan polindes.

g. Posyandu

Posyandu merupakan sarana kesehatan yang dikhususkan pada pelayanan kesehatan ibu dan anak usia 5 tahun ke bawah (balita). Pada tahun ini jumlah posyandu yang tersebar sebanyak 93 unit. Berdasarkan standar dan penduduk pendukung, pada tahun 2010 kebutuhan terhadap posyandu tidak ada penambahan karena sudah terdistribusi di semua zoning dengan asumsi bahwa 1 unit posyandu mampu melayani 800 jiwa.

h. Apotik

Untuk lebih menunjang sarana kesehatan khususnya dalam penyediaan obat diperlukan sarana berupa apotik. Dimana sampai saat ini di kawasan pengembangan tidak tersedia apotik. Untuk itu berdasarkan perhitungan dan standar penduduk di tahun 2010, terdapat pengadaan jumlah apotik di kawasan perencanaan sebanyak 1 unit yang berlokasi di zoning Desa Kedungsalam.

3. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Jenis fasilitas perdagangan dan jasa yang akan dikembangkan di kawasan pengembangan jalan lintas selatan adalah yang berkaitan dengan kegiatan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dimana jenis fasilitas yang dimaksud meliputi toko/warung/kios dan pasar. Sementara untuk jenis fasilitas perdagangan dan jasa yang muncul dan dibutuhkan karena dipengaruhi adanya suatu aktifitas (dalam hal ini adanya aktifitas wisata dan perikanan laut), yaitu berupa rumah makan, penginapan, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Untuk toko/warung/kios yang ada di kawasan perencanaan pada umumnya merupakan fasilitas perdagangan yang cenderung menyatu dengan rumah penduduk dan terdapat di pusat-pusat pelayanan. Pada tahun 2010 penambahan jenis fasilitas ini secara keseluruhan sebesar 146 unit.

Sedangkan untuk jenis pasar yang terdapat di wilayah perencanaan terbagi menjadi dua yaitu pasar tanpa bangunan permanen dan pasar dengan bangunan permanen. Pada tahun perencanaan fasilitas pasar tidak memerlukan penambahan, melainkan hanya memerlukan peningkatan kondisi secara fisik (menjadi permanen) agar daya tampung aktifitas jual beli

menjadi lebih besar sehingga jangkauan pelayanannya pun menjadi lebih luas, atau setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pada skala lokal/desa.

Untuk rumah makan yang ada berfungsi untuk memberikan pelayanan di bidang jasa terutama makanan dan minuman. Jumlah penambahan rumah makan pada tahun 2010 adalah sebanyak 4 unit.

4. Fasilitas Perumahan

Pengembangan fasilitas perumahan sampai dengan tahun perencanaan 2010 dilaksanakan dengan cara infiltrasi, penyatuan dan pengembangan kawasan baru.

Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan ini didasarkan pada asumsi bahwa tiap keluarga dapat hidup layak dan menempati satu rumah sendiri. Pada tahun 2003 jumlah rumah di kawasan pengembangan sejumlah 23456 unit. Diasumsikan bahwa tiap 1 unit rumah digunakan untuk 4 orang. Jumlah kebutuhan fasilitas perumahan didasarkan pada perbandingan antara jumlah penduduk proyeksi dengan jumlah anggota keluarga, sehingga diperoleh hasil bahwa seluruh zoning di kawasan pengembangan mengalami penambahan unit perumahan kecuali zoning Desa Kedungsalam, zoning Desa Sumberbening, zoning Desa Sindurejo. Dalam perencanaan pengembangan fasilitas perumahan ini, dimaksudkan dengan harapan ketika pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan atau yang biasa disebut dengan jalan lintas selatan di Kabupaten Malang setelah selesai akan membuka akses masuk bagi masyarakat, sehingga dibutuhkan perencanaan pengembangan fasilitas perumahan yang ditujukan bagi masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 6
Rencana Pengembangan Kebutuhan Perumahan

Kecamatan		Kebutuhan Perumahan		
Zoning	Desa	Eksisting	Proyeksi	Penambahan
Donomulyo				
I	Sumberoto	1799	2045	246
II	Purwodadi	2100	1643	-
III	Mentaraman	1607	1677	70
IV	Kedungsalam	2455	2895	440
V	Banjarejo	1522	1632	110
VI	Tulungrejo	710	829	129
Bantur				
VII	Bandungrejo	2397	2398	1
VIII	Sumberbening	2421	1435	-
IX	srigonco	1061	1120	59
Gedangan				
X	Tumpakrejo	1754	1771	17
XI	Sindurejo	1449	1307	-
XII	Gajahrejo	1271	1391	120
Sumbermanjing Wetan				
XIII	Sitiarjo	1750	2034	284
XIV	Tambakrejo	1170	1295	125

Sumber: Hasil Rencana Bappekab Kabupaten Malang, 2009

d. Rencana Pengembangan Utilitas

Rencana pengembangan sistem utilitas meliputi jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, persampahan dan sistem sanitasi.

1. Listrik

Sebagian besar kawasan yang dilalui pengembangan jalan lintas selatan telah dilayani listrik yang berupa tegangan rendah dan menengah. Namun pada beberapa wilayah tertentu belum terlayani, khususnya di bagian selatan di sekitar wilayah pantai dan jalan lintas selatan. Untuk itu di masa yang akan datang kebutuhan listrik di kawasan perencanaan diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan adanya pengembangan jalan lintas selatan. Disamping itu perlu adanya pelayanan listrik yang lebih merata bagi perumahan hingga ke wilayah pelosok (khususnya wilayah selatan) maupun bagi penerangan

obyek-obyek khusus dan jaringan jalan baru yang semakin meningkat.

Dalam memperkirakan kebutuhan listrik di tahun perencanaan, asumsi yang digunakan adalah:

a. Rumah tangga:

Proyeksi jumlah rumah di tahun perencanaan dikalikan dengan 450 watt (setiap rumah diasumsikan sama

b. Komersial:

15% dari total kebutuhan untuk rumah tangga

c. Sosial:

10% dari total kebutuhan untuk rumah tangga

d. Kehilangan Daya:

10% dari total kebutuhan untuk rumah tangga

e. Cadangan:

10% dari total kebutuhan untuk rumah tangga

f. Penerangan Jalan:

40% dari total kebutuhan untuk rumah tangga

Dari total kebutuhan listrik untuk tahun 2010, didapat angka rencana kebutuhan listrik di tiap zoning yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Rencana Pengembangan Kebutuhan Listrik

Kecamatan	Kebutuhan Listrik						Total
	Zoning	Rumah tangga	Komersial	Sosial	Cadangan	Kehilangan Daya	
Donomulyo							
Sumberoto	920.138	138.021	92.014	92.014	92.014	368.055	1.702.255
Purwodadi	739.238	110.886	73.924	73.924	73.924	295.695	1.367.590
Mentaraman	754.763	113.214	75.476	75.476	75.476	301.905	1.396.312
Kedungsalam	1.302.750	195.413	130.275	130.275	130.275	521.100	2.410.088
Banjarejo	734.175	110.126	73.418	73.418	73.418	293.670	1.358.224
Jumlah	4.824.114	723.617	482.411	482.411	482.411	1.929.646	8.924.611
Bantur							
Bandungrejo	1.078.875	161.831	107.888	107.888	107.888	431.550	1.995.919
Sumberbening	645.638	96.846	64.564	64.564	64.564	258.255	1.194.430
Srignonco	503.888	75.583	50.389	50.389	50.389	201.555	932.193
Jumlah	2.228.401	334.260	222.840	222.840	222.840	891.360	4.122.542
Gedangan							
Tumpakrejo	796.838	119.526	79.684	79.684	79.684	318.735	1.474.150
Sindurejo	588.038	88.206	58.804	58.804	58.804	235.215	1.087.870
Gajahrejo	625.838	93.876	62.584	62.584	62.584	250.335	1.157.800
Jumlah	2.010.714	301.607	201.071	201.071	201.071	804.286	3.719.821
Sumbermanjing Wetan							
Sitiarjo	915.075	137.261	91.508	91.508	91.508	366.030	1.692.889
tambakrejo	582.863	87.429	58.286	58.286	58.286	233.145	1.078.297

Sumber: Hasil Rencana Bappedab Kabupaten Malang, 2009

Dari jumlah kebutuhan listrik pada masing-masing zoning di atas, rencana pengembangan fasilitas listrik diarahkan pada:

- a. Peningkatan/perbaikan jaringan distribusi zoning yang ada terutama pada lokasi-lokasi jaringan distribusinya masih berupa tiang-tiang kayu menjadi beton terutama pada zoning-zoning di Kecamatan Bantur dan Sumbermanjing Wetan (zoning Desa Srignonco, zoning Desa Bandungrejo, zoning Desa Sitiarjo, dan zoning Desa Tambakrejo).
- b. Peningkatan/perbaikan jaringan pendistribusian melalui pengembangan jaringan tiang karena pada lokasi ini cenderung masih dilewatkan pada pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan (zoning Desa Tumpakrejo, zoning Desa Sindurejo dan zoning Desa Gajahrejo).

2. Air Bersih

Kebutuhan air bersih ini merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, seperti kebutuhan untuk air minum, kebutuhan untuk memasak, mencuci dan mandi.

Kebutuhan akan air bersih/minum pada sebagian besar kawasan pengembangan belum terlayani oleh PDAM dan hanya sebagian dari zoning XII yang sudah terlayani.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat di kawasan ini memanfaatkan sumber air yang ada dengan dialirkan langsung ke masing-masing rumah tangga melalui jaringan pipa dari hasil swadaya masyarakat. Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan air sebagian masyarakat ada yang membuat sumur dengan kedalaman ± 10 meter.

Dari keadaan ini, pada dasarnya masyarakat di wilayah pengembangan tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan air bersih. Terkecuali untuk zoning V, dikarenakan belum dimanfaatkannya sumber air yang ada secara maksimal.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

- a. Memanfaatkan sumber air yang dengan membuat sumur pompa (*weslick*)
- b. Pembuatan tandon penampung air bersih
- c. PIPANISASI permanen bagi distribusi air yang menjangkau ke pelosok, khususnya ke wilayah selatan (sekitar pantai dan jalan lintas)

Untuk masa mendatang dalam memperkirakan kebutuhan terhadap air bersih/minum digunakan asumsi:

- a. Rumah Tangga:

Satu orang menggunakan air bersih/minum sebanyak 60 liter/hari, sehingga 1 rumah tangga yang terdiri dari 4 orang membutuhkan air 240 liter/hari

- b. Komersial:
20% dari kebutuhan air bersih untuk rumah tangga
- c. Sosial:
15% dari kebutuhan air bersih untuk rumah tangga
- d. Industri:
10% dari kebutuhan air bersih untuk rumah tangga
- e. Cadangan Bocor:
10% dari kebutuhan air bersih untuk rumah tangga

Dari asumsi tersebut dilakukan perhitungan yang mendapatkan total kebutuhan air bersih/minum di kawasan pengembangan pada tahun 2010.

Tabel 8
Rencana Pengembangan Kebutuhan Air Bersih

Kecamatan	Kebutuhan Air Bersih(liter/hari)					Total
	Zoning Rumah tangga	Komersial	Sosial	Industri	Cadangan Bocor	
Donomulyo						
Sumberoto	490.740	98.148	73.611	49.074	49.074	760.647
Purwodadi	394.260	78.852	59.139	39.426	39.426	611.103
Mentaraman	402.540	80.508	60.381	40.254	40.254	623.937
Kedungsalam	694.800	138.960	104.220	69.480	69.480	1.076.940
Banjarejo	391.560	78.312	58.734	39.156	39.156	606.918
Tulungrejo	198.960	39.792	29.884	19.896	19.896	308.388
Jumlah	2.572.860	514.572	385.929	257.286	257.286	3.987.933
Bantur						
Bandungrejo	574.400	115.080	86.310	57.540	57.540	891.870
Sumberbening	344.340	68.868	51.651	34.434	34.434	533.727
Srigonco	268.740	53.748	40.311	26.874	26.874	416.547
Jumlah	1.188.480	237.696	178.272	118.848	118.848	1.842.144
Gedangan						
Tumpakrejo	424.980	84.996	63.747	42.498	42.498	658.719
Sindurejo	313.620	62.724	47.043	31.362	31.362	486.111
Gajahrejo	333.780	66.756	50.067	33.378	33.378	517.359
Jumlah	1.072.380	214.476	160.857	107.238	107.238	1.662.189
Sumbermanjing Wetan						
Sitiarjo	488.040	97.608	73.206	48.804	48.804	756.462
tambakrejo	310.860	62.172	46.629	31.086	31.086	481.833
Jumlah	798.900	159.780	119.835	79.890	79.890	1.238.295

Sumber: Hasil Rencana Bappekab Kabupaten Malang, 2009

Setelah diketahui kebutuhan air bersih di atas, rencana pengembangan fasilitas air bersih diarahkan pada:

- a. Pengembangan air bersih (PDAM), terutama di sekitar pusat zoning (Desa Sumberoto, Desa Kedungsalam, Desa Bandungrejo, Desa Sitarjo).
 - b. Pengembangan air bersih (PDAM) tidak hanya di pusat zoning, tapi juga mencapai pelosok (Desa Srigonco).
 - c. Memanfaatkan sumber air yang ada, khususnya di daerah yang tidak terlayani PDAM (zoning Desa Sumberoto, Desa Purwodadi, Desa Mentaraman, Desa Kedungsalam, Desa Banjarejo, Desa Tulungrejo, Desa Sumberbening, Desa Tumpakrejo, Desa Sindurejo, Desa Gajahrejo).
 - d. Perbaikan dan peningkatan jaringan PDAM (di Dusun Sendang Biru pada zoning Desa Tambakrejo).
3. Telepon

Telepon merupakan sarana komunikasi yang penting. Dengan adanya pengembangan jalan lintas selatan, kebutuhan akan sarana komunikasi ini sangat diperlukan. Dimana saat ini jaringan telepon yang ada masih sangat terbatas dan belum menjangkau semua wilayah pengembangan.

Meskipun demikian untuk mengantisipasi adanya perkembangan kawasan sebagai dampak dari dibukanya jalan lintas selatan, perlu adanya perluasan jaringan serta penyediaan sarana telpon yang menjangkau semua wilayah pengembangan, baik berupa saluran telepon rumah tangga, wartel, maupun telepon umum.

Dalam memperkirakan kebutuhan telepon, asumsi yang digunakan adalah:

- a. Saluran rumah tangga : 1.000 jiwa = 20 saluran telepon
- b. Wartel : Setiap 1000 penduduk memerlukan 1 unit wartel

- c. Telepon umum : Setiap 200 penduduk memerlukan 1 unit telepon umum

Kebutuhan sarana telepon pada tiap zoning pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9
Rencana Pengembangan Kebutuhan Telepon

Kecamatan	Kebutuhan Telepon (unit)		
	Rumah Tangga	Wartel	Telepon Umum
Donomulyo			
Sumberoto	164	8	41
Purwodadi	131	7	33
Mentaraman	134	7	34
Kedungsalam	232	12	58
Banjarejo	131	7	33
Tulungrejo	66	3	17
Jumlah	858	43	214
Bantur			
Bandungrejo	192	10	48
Sumberbening	115	6	29
Srigonco	90	4	22
Jumlah	396	20	99
Gedangan			
Tumpakrejo	142	7	35
Sindurejo	105	5	26
Gajahrejo	111	6	28
Jumlah	357	18	89
Sumbermanjing Wetan			
Sitiarjo	163	8	41
Tambakrejo	104	5	26
Jumlah	266	13	67

Sumber: Hasil Rencana Bappekab Kabupaten Malang, 2009

Selanjutnya setelah diketahui jumlah kebutuhan fasilitas ini, rencana pengembangan fasilitas telepon di arahkan pada:

- Pengembangan jaringan pada daerah yang belum terlayani (zoning Desa Sumberoto, Desa Purwodadi, Desa Mentaraman, Desa Kedungsalam, Desa Bandungrejo, Desa Sumberbening, Desa Tumpakrejo, Desa Sindurejo, Desa Gajahrejo dan Desa Tambakrejo).
- Pengembangan jaringan telepon secara optimal dan merata (zoning Desa Srigonco).

4. Sampah

Kebutuhan pengelolaan sampah ini sangat diperlukan sehubungan dengan semakin meningkatnya aktifitas di kawasan pengembangan, jumlah sampah yang dihasilkan pun juga akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah sampah ini, maka perlu adanya upaya untuk menangani sampah yang meliputi sistem pengangkutannya dan pengolahan sampah itu sendiri. Untuk pengangkutan sampah ini dimulai dari rumah tangga hingga menuju tempat pembuangan sementara, kemudian dari tempat pembuangan sementara hingga menuju tempat pembuangan sementara, kemudian dari tempat pembuangan sementara hingga menuju tempat pembuangan akhir.

Jenis pengolahan sampah didasarkan pada pertimbangan kondisi fisik kawasan maupun pertimbangan biaya yang diperlukan, adalah sebagai berikut:

a. Penimbunan Saniter (*Sanitary Landfill*)

Penimbunan saniter adalah teknik penimbunan sampah yang dapat meminimumkan dampak yang merusak lingkungan dimana teknik yang digunakan adalah dengan memadatkan sampah dengan ketebalan 3,5 – 5 m dan kemudian ditimbun dengan tanah setebal 15 – 30 cm.

b. Pembakaran (*Incineration*)

Pembakaran merupakan salah satu cara pemusnahan sampah dengan cara mengurangi volume maupun berat sampah melalui proses pembakaran.

c. Pembuatan Kompos (*Composting*)

Pembuatan kompos merupakan salah satu cara mengolah sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali yakni dengan mengelola sampah menjadi pupuk.

d. Pemanfaatan Ulang (*Recycling*)

Pemanfaatan ulang adalah cara pengolahan sampah anorganik agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cara mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Dari sistem pengolahan sampah di atas, apapun yang akan dipilih nantinya harus mempertimbangkan jumlah sampah yang dihasilkan di kawasan perkotaan dan jenis sampahnya.

Pada kawasan pengembangan, pengelolaan sampah yang ada pada saat ini adalah dikelola secara individu di tiap rumah dengan cara membakar atau menimbun sampah di pekarangan rumah. Untuk penanganan sampah di masa mendatang diperlukan adanya penanganan secara terkoordinasi, yaitu dengan adanya pengangkutan sampah dari tiap rumah. Selain itu pengolahan sampah juga harus diantisipasi sebelumnya, dimana untuk pengolahan sampah yang diperkirakan sesuai adalah menggunakan cara *sanitary landfill* (penimbunan saniter) dan *incineration* (pembakaran) dengan pertimbangan efisiensi, keuntungan yang didapat dan minimalisasi kerusakan lingkungan. Dengan pengolahan tersebut, maka perlu dilakukan pula pemisahan sampah berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik. Pemisahan sampah ini ada gunanya jika disertai dengan peraturan daerah yang sifatnya mengikat, yaitu memberi sanksi/hukuman jika tidak dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah pengembangan jalan lintas selatan.

5. Sanitasi

Perkembangan fisik suatu kawasan memerlukan sistem sanitasi yang terencana dan memperhatikan aspek lingkungan. Sistem sanitasi ini merupakan sarana untuk pembuangan air buangan maupun limpasan air hujan. Dimana untuk perencanaan sanitasi ini harus mempertimbangkan kondisi fisik

dasar kawasan (topografi/kelerengan, keadaan tanah, hidrologi, curah hujan). Perencanaan sanitasi idealnya harus merupakan sistem sanitasi yang menyeluruh, artinya antara saluran harus terhubung dengan baik dan alirannya dapat menuju ke saluran induk/primer.

Selain itu perlu pula dipertimbangkan mengenai dimensi saluran yang direncanakan karena menyangkut kapasitas dalam menampung air buangan dan limpasan air hujan, tersedianya kawasan resapan air juga perlu diperhatikan sebagai salah satu tujuan aliran selain menuju ke saluran induk. Untuk kawasan resapan air pada perumahan yang sudah tidak memungkinkan untuk tersedianya kawasan resapan air dengan luasan yang besar, dapat dilakukan dengan menyediakan sumur resapan di tiap rumah.

Untuk saluran yang menyatu dengan saluran irigasi terutama pada kawasan yang masih berkarakter pedesaan, perlu adanya pengolahan air buangan yang berasal dari rumah tangga maupun industri yang ada sehingga tidak mencemari air untuk irigasi. Dengan adanya sistem sanitasi yang menyeluruh dan terencana ini, maka terjadinya genangan atau banjir dapat dihindari. Di samping itu karakter kawasan yang mempunyai ketinggian 15 – 40 % menyebabkan aliran air cenderung tinggi.

Adapun arahan pengembangan sistem sanitasi di sekitar kawasan pengembangan jalan lintas selatan, selain mengusahakan pengadaan dan peningkatan kondisi saluran air di kiri-kanan jalan sebagai saluran pembuangan air hujan dan limbah rumah tangga, juga dilakukan pengembangan konservasi tanah.

Arahan pengembangan untuk sanitasi pada tiap zoningnya adalah sama. Dimana lebih cenderung pada pengembangan jaringannya, yaitu di sepanjang kanan-kiri jalan. Namun pada lokasi yang berdekatan dengan lahan sawah,

fungsi salurannya menjadi ganda (sebagai drainase dan sebagai irigasi).

Untuk koridor jalan lintas selatan, sanitasi diarahkan pada pengembangan gorong-gorong seperti yang sudah dilakukan.

6. Sistem Jaringan Jalan

Jalan yang ada di wilayah kecamatan yang dilalui pengembangan jalan lintas selatan meliputi kolektor dan lokal primer. Dimana untuk jenis jalan kolektor tersebut secara fisik sudah berupa hotmik/aspal. Selebihnya untuk jalan lokalnya masih berupa makadam dan tanah serta sebagian beton. Walaupun demikian, sebagian besar jalan yang ada telah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Untuk jalan lintas selatan yang telah dibuka, permukaan fisiknya masih berupa tanah dan dapat dilalui kendaraan roda empat dengan kondisi fisik yang bergelombang (turun-naik). Sebagian besar badan jalan merupakan jalan yang baru dibuka dan pada beberapa bagian terdapat perpotongan yang membentuk persimpangan dengan jalan desa yang sudah terlebih dulu ada. Atau dengan kata lain jalan desa tersebut menjadi jalan sirip dari jalan lintas selatan.

Rencana pengembangan sistem transportasi merupakan hal penting dalam pengembangan tata ruang suatu kawasan. Begitu pula di kawasan pengembangan jalan lintas selatan, dimana sistem transportasi merupakan sektor yang strategis bagi pengembangan tata ruang khususnya bagi kawasan pengembangan jalan lintas selatan.

Sebagian besar kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi adalah berupa peningkatan kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Dimana jumlah ruas jalan yang rusak sangat banyak jumlahnya serta tersebar pada semua kecamatan.

Dari keadaan tersebut, rencana pengembangan jaringan jalan desa/sirip yang terhubung dengan jalan lintas selatan pada masing-masing zoning adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan perkerasan jalan.
- b. Pengaturan sirkulasi dan pembatasan arus pada jalan sirip terutama untuk arus yang cenderung menyeberang.
- c. Pengembangan jalan baru menuju obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan.

Secara umum rencana pengembangan yang dilakukan pada jaringan jalan lintas selatan adalah:

- a. Pengembangan jalan lintas selatan sebagai penghubung antara Kabupaten Blitar – Kabupaten Malang – Kabupaten Lumajang
- b. Keberadaan jalan ini akan mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah terutama pada sirip-sirip yang menghubungkan dengan dan antar kawasan potensial (obyek wisata)

Dari rencana pengembangan jalan desa/sirip dan pengembangan jalan lintas selatan tersebut, secara keseluruhan arahan pengembangan jaringan jalan pada kawasan perencanaan yaitu mengembangkan jalur-jalur penghubung secara internal dan eksternal yang adalah sebagai berikut:

- a. jalur internal; pengembangan jalan penghubung antar desa dalam satu kecamatan sehingga terbentuk rute yang saling terkait.
- b. Jalur eksternal; pengembangan jalan penghubung antar pusat kecamatan, penghubung antar pusat kecamatan, penghubung ke obyek-obyek wisata (dari pusat kecamatan/desa ke lokasi wisata), serta keberadaan jalan lintas yang menghubungkan antar kabupaten.

Rencana pengembangan hierarkhi jalan di kawasan pengembangan jalan lintas selatan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan lokal primer, yaitu:

a. Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota-kota jenjang dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dengan kecepatan paling rendah 60 km/jam dan lebar jalan tidak kurang dari 8 meter.
2. Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
3. Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas rata-rata.
4. Jumlah jalan masuk ke arteri primer dibatasi secara efisien.

Sebagai jalan arteri primer, di masa yang akan datang tentunya akan terjadi penggunaan dengan intensitas yang tinggi pada kawasan ini, seperti bus, truk dan kendaraan lainnya dengan jumlah simpangan yang dibatasi. Jalan lintas selatan merupakan jalan yang termasuk dalam kategori ini, dimana dengan ditetapkannya jalan lintas selatan sebagai jalan arteri primer, berarti jalan-jalan lain di sekitarnya yang sudah lebih dahulu ada juga akan berubah kelasnya. Jalan lintas ini terhubung dengan Kabupaten Blitar (sebelah barat) dan Kabupaten Lumajang (sebelah timur), yang melewati 14 desa dalam 4 kecamatan yang juga ditetapkan sebagai wilayah zoning bagi pengembangannya di masa yang akan datang. Zoning oning Desa Sumberoto – Zoning Desa Tambakrejo.

b. Jalan Kolektor Primer

Merupakan jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua, atau menghubungkan dengan kota jenjang ketiga, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kecepatan paling rendah 40 km/jam.
2. Mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
3. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga dua ketentuan diatas masih terpenuhi.
4. Tidak terputus walaupun memasuki kota.

Jalan kolektor primer pada kawasan ini adalah jalan menghubungkan antar kecamatan dan yang melalui pusat desa/zoning dan terhubung menuju ke obyek-obyek khusus. Jaringan jalan yang menghubungkan antar kecamatan adalah jalan yang menghubungkan Desa Sumberoto – Desa Donomulyo – Desa Kedungsalam – Desa Sumbermanjing Kulon (Kecamatan Pagak) – Desa Bandungrejo – Desa Wonorejo (Kecamatan Bantur) – Desa Gedangan (Kecamatan Gedangan), sedangkan jalan-jalan desa/sirip yang menghubungkan pusat desa/zoning ke obyek khusus di wilayah selatan yang dalam hal ini adalah obyek wisata pantai antara lain: jalan ke arah pantai Ngliyep, Balekambang, Sendang Biru.

c. Jalan Lokal Primer

Merupakan jalan yang menghubungkan kota jenjang ketiga dengan sesama kota jenjang ketiga, atau dengan kota jenjang keempat, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menghubungkan kota jenjang satu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga.

2. Jalan tidak kurang dari 3,5 meter.
3. Batas luar daerah pengawasan jalan DASWAJA yang diukur dari as jalan tidak kurang dari 4 meter.

Jalan yang berfungsi sebagai jalan lokal primer adalah jalan di luar jaringan jalan yang termasuk pada kategori jalan arteri primer dan jalan kolektor primer yang terdapat di wilayah desa/zoning dalam kawasan pengembangan jalan lintas selatan.

2. Kendala yang dihadapi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Wilayah Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Selatan Kabupaten Malang

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap melaksanakan suatu program kegiatan banyak sekali kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaannya, kendala itu datang baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Demikian halnya dengan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam upayanya mengembangkan wilayah pada jalan lintas selatan di Kabupaten Malang melalui kegiatan-kegiatan pengembangan wilayah Kabupaten Malang. Kendala-kendala tersebut lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a) Kendala yang bersifat Internal

1. Rendahnya kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dipergunakan untuk pengembangan wilayah dalam penertiban izin lokasi pembangunan, sehingga kurang dapat mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan dinamis. Perencanaan pengembangan wilayah yang sudah disusun oleh para tenaga ahli dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah pengembangan dalam bentuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) seringkali hanya sebagai dokumen dan tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan secara matang dan kuat.

Menurut pengamatan peneliti, berdasarkan kenyataan yang ada dokumen perencanaan RTRW Kabupaten Malang dalam pengembangan wilayahnya dapat dinilai kurang efektif dan efisien.

2. Keterbatasan anggaran, Kendala dana tersebut juga disampaikan oleh ibu Dra. Santi sebagai berikut:

“Kalau masalah dana di setiap instansi juga pasti menjadi sebuah kendala mas. Tetapi selama ini bagi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang sendiri masalah dana bukan merupakan sebuah kendala yang berarti selama Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten Malang selaku pemangku dana kegiatan masih bertanggung jawab penuh untuk memberikan dana yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor. Tapi masalah yang dihadapi adalah proses turunnya anggaran mas, tidak bisa langsung. Harus bertahap.”. (Hasil wawancara pada tanggal 27 Juli 2009)

Mengingat Kabupaten Malang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan keberadaan dari jalan lintas selatan sebagai penunjang perekonomian dan *open land access* maka kebutuhan biaya pengembangan wilayah sangat banyak dan saat ini anggaran yang disediakan dinilai oleh Bappekab masih sangat kurang.

- b) Kendala yang bersifat Eksternal

Potensi sosial yang dimiliki kawasan perencanaan terkait dengan pembebasan tanah di sepanjang jalan lintas selatan, yaitu tanah tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai sektor pertanian lahan kering/tegalan, perkebunan, industri, maupun pariwisata.

Permasalahan utama yang terkait dengan pembebasan tanah di sepanjang jalan lintas selatan adalah pertama, masalah pembebasan tanah yang terkait dengan harga tanah yang tidak sesuai dengan permintaan pemilik tanah. Penentuan harga tanah oleh pemerintah didasarkan pada nilai pajak atas tanah. Sedangkan pemilik tanah merasa harga yang ditentukan pemerintah tidak

sesuai dengan kondisi pasar. pembebasan lahan yang lambat dan banyak pemilik lahan meminta nilai jual jauh dari harga tawar, proyek hanya mampu mengoptimalkan pelebaran jalan yang sudah ada.

Kedua, hampir sebagian besar lahan yang dilalui proyek pembangunan jalan lintas selatan ini merupakan milik dari Perhutani, Pembebasan lahan untuk proyek jalan lintas selatan yang dibebankan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, masih kurang lima kilometer dan seluruhnya merupakan lahan milik Perhutani. beban terbesar dan proses paling rumit adalah membebaskan lahan milik perhutani, apalagi pembebasan lahan tersebut dibebankan sepenuhnya pada Pemkab Malang penggunaan tanah seluas 150 hektare milik Perum Perhutani di wilayah Kabupaten Malang untuk proyek Jalan Lintas Selatan. Departemen Kehutanan masih mensyaratkan ada lahan pengganti untuk tanah aset Perhutani yang dimanfaatkan untuk proyek jalan lintas selatan tersebut. Beban untuk pengadaan tanah pengganti lahan Perhutani tersebut, menjadi beban Pemkab Malang. Pemkab Malang setuju saja dengan persyaratan tersebut. Yang menjadi masalah berapa lama waktu untuk pembebasan tanah pengganti tanah Perhutani tersebut. Dalam perjanjian tersebut tidak disebut jangka waktu pengadaan tanah. Jika persyaratan pengadaan tanah dalam waktu yang singkat, tentu Pemkab tidak mampu. APBD Kabupaten Malang tidak mampu membiayai pengadaan tanah seluas 150 hektare dalam waktu singkat, apalagi dalam satu tahun anggaran. Jadi beban terbesar dalam pembebasan lahan ini adalah kesepakatan dengan Perhutani, dimana sebagian besar lahan milik Perhutani.

C. Analisis dan Interpretasi

1. Upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Wilayah Pada jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang

Pada bab II halaman 34 telah dibahas mengenai Konsep pengembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehateraan masyarakat. Pengaruh globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antar negara, antar daerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga perdesaan.

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses iteratif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang yang telah diujiterapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Dalam upaya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di wilayah selatan Kabupaten Malang, sangat luas sekali aspek-aspek yang dipaparkan dalam penyajian data. Sebagai *starting point* yang terpenting dari pembangunan *integrated* di wilayah selatan adalah kebutuhan akan struktur pemanfaatan dan pengendalian ruang yang serasi dan seimbang sehingga tercapai pengembangan wilayah yang terpadu dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Dalam upaya memacu pertumbuhan wilayah selatan pengembangan wilayah didasarkan pada konsep *Spatial Policy for Equitable Growth*, kebijaksanaan penataan ruang untuk pertumbuhan yang mampu menciptakan pemerataan, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi

wilayah selatan dengan wilayah lain (*Sectoral and Spatial Linkage*) dan mendorong pertumbuhan pusat-pusat kegiatan (*Growth Pole*).

Oleh karena itu perlunya dipahami lebih dalam azas-azas yang mendapatkan perhatian bersama dan diberikan berat yang sesuai dengan peran dan pengaruh masing-masing pada keberhasilan program pengembangan wilayah. Azas-azas yang mencakup tentang aspek pengembangan wilayah adalah: Sosial, Ekonomi, dan Wawasan Lingkungan.

Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah selatan Kabupaten Malang yang dilakukan dalam pengembangan wilayah dirancang dan dilaksanakan oleh, serta ditujukan bagi kepentingan-kepentingan bersama para pelaku-pelakunya yaitu, Pemerintah, yang akan bertugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, koordinasi maupun administrasi seluruh program-program di dalam proses pengembangan wilayah terhadap pembangunan jalan lintas selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang sebagai sinkrosinator program-program pengembangan wilayah pada jalan lintas selatan, dalam menyusun rencana pengembangan yang konsisten agar tidak terjadi tumpang tindih, inefisiensi, dan bagi menciptakan sinergi antar program dan aktivitas lintas sektor/satuan kerja.

Kedua yaitu masyarakat, dimana dalam melaksanakan kegiatan pengembangan wilayah, sebaiknya program-program perencanaan pembangunan terhadap wilayah di kawasan jalan lintas selatan Kabupaten Malang harus bersifat berguna dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik di wilayah selatan Kabupaten Malang, Kota Malang bahkan Luar Kota dan Kabupaten Malang itu sendiri. Dengan demikian masyarakat akan bersedia berperan sebagai subyek dan pelaku aktif pengembangan wilayah, sehingga akan memberikan peran sertanya secara maksimal. Selain itu dengan terlaksananya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan wilayah akan menimbulkan kesinambungan finansial, dimana masyarakat sebagai pemanfaat produk pengembangan wilayah akan bersedia

mengeluarkan biaya untuk menikmatinya sehingga seluruh biaya untuk menikmatinya dan seluruh biaya yang dikeluarkan termasuk biaya untuk operasional dan pemeliharaannya akan dapat kembali dan dapat dipakai untuk modal pengembangan wilayah selanjutnya. Selanjutnya kesinambungan sosial, yaitu berupa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat di dalam pengembangan wilayah khususnya Bappekab Kabupaten Malang sebagai biro pelayan publik dalam pengambil tindakan perencanaan dan pembangunan dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan lintas selatan di Kabupaten Malang. Selanjutnya yaitu kesinambungan institusional, berupa kepercayaan diri atau *self confidence*, atas kemampuan diri pada Bappekab Kabupaten Malang untuk merencanakan, melaksanakan perannya, dan mengelola kegiatan-kegiatan pembangunan dalam pengembangan wilayah serta melakukan pengembangan-pengembangan lebih lanjut karena dan untuk selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Melihat dari semua upaya kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, tindakan mulai dari persiapan sampai perencanaan telah mencakup keseluruhan aspek dari *sustainable development* atau disebut juga dengan pembangunan berkelanjutan. Dimana upaya dari Bappekab mulai dari tahap persiapan sampai ke tahap perencanaan memenuhi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah dalam pembangunan infrastruktur jalan di wilayah selatan Kabupaten Malang. Bappekab dalam upayanya pengembangan wilayah menitikberatkan pada pertumbuhan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial ataupun budaya sehingga perlunya aspek-aspek dari pembangunan berkelanjutan ini diarahkan pada perencanaan yang bertumpu pada kekuatan sendiri dan bermuara pada terciptanya kemandirian dalam mewujudkan ketahanan untuk menghadapi semua tantangan dari dalam maupun luar, mengkonsolidasi semua hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini, serta mengembangkan dan menumbuhkan secara

berkelanjutan pada masa mendatang. Sehingga pendekatan perencanaan ini melalui:

- a. Pengembangan yang berpijak pada keseimbangan aspek pelestarian dan pengembangan serta berorientasi ke depan (jangka panjang)
- b. Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat setempat
- c. Pengelolaan aset/sumber data yang tidak merusak namun berkelanjutan untuk jangka panjang baik secara sosial, budaya maupun ekonomi
- d. Mengembangkan aspirasi yang lebih peka dari masyarakat dan lingkungan hidup

Selain dari aspek-aspek *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan yang tertera diatas, Bappekab perlu mengoptimalkan penyusunan strategi atau rencana pengembangan wilayah. Pada penyajian data fokus diatas upaya Bappekab mempunyai kapasitas yang besar dalam pengembangan wilayah sebagai usaha dari pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi masih memiliki kekurangan, oleh karena itu diperlukannya optimalisasi penyusunan strategi atau rencana pengembangan wilayah. Rencana pengembangan wilayah kini umumnya berusaha memusatkan pada beberapa titik pengembangan yang dipilih berdasarkan sifat-sifat geografik dan daerah yang unggul atau tersedianya bahan-bahan baku atau kelebihan lain yang menjanjikan harapan terbaik untuk keberhasilan.

Strategi sektor/satuan kerja yang disusun berdasarkan misi masing-masing harus menunjukkan keterkaitan yaitu saling terpadu dan saling menunjang sehingga akan menghasilkan program-program sektor/satuan kerja yang konsisten satu dengan lainnya.

Dalam upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pengembangan wilayah pada jalan lintas selatan di Kabupaten Malang terdapat dua tahapan yang didalamnya memiliki poin-poin

penting dan menunjang pengembangan wilayah di kawasan selatan Kabupaten Malang, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan terdapat skenario dalam pengembangan wilayah dibagi menjadi tiga skenario pengembangan, yaitu: skenario moderat, skenario pesimis, dan skenario optimis. Menurut pemahaman dari penulis pada tahapan persiapan ini tiga skenario yang digunakan sangat tepat dan berguna, dimana dari skenario, perbandingan dalam pengembangan skenario memerlukan elemen yang dapat memberikan arah untuk mencapai tujuan pengembangan wilayah yang optimal sesuai dengan jenis skenario yang digunakan. Dalam memilih skenario yang tepat, maka sebelumnya diidentifikasi menurut kondisi di lokasi studi antara lain:

- a. Pertumbuhan Wilayah
- b. Pemerataan Pembangunan
- c. Struktur Ekonomi
- d. Pemanfaatan Kawasan Konservasi
- e. Transportasi
- f. Infrastruktur

Selain penggunaan skenario penekanan pengembangan wilayah Kabupaten Malang, upaya Bappekab dalam pengembangan wilayah menitik beratkan pada metode pendekatan dan metode analisa dalam pengembangan wilayah. Dalam metode pendekatan, terdapat empat metode pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Pada Pola Kebijakan
- b. Pendekatan Masyarakat
- c. Pendekatan Perencanaan Berkelanjutan
- d. Pendekatan Intersektoral Holistik

Sedangkan dalam metode analisa terdapat lima metode, antara lain:

- a. Analisa Fisik Binaan
- b. Analisa Potensi Pengembangan Daerah

- c. Analisa Kependudukan
- d. Analisa Struktur Ruang Perkotaan
- e. Analisa Kesesuaian Fisik Wilayah

Menurut penulis, dalam konsep pengembangan wilayah, pengembangan wilayah di Kabupaten Malang penggunaan metode pendekatan dan analisa merupakan tindakan tepat yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam upaya pengembangan wilayah di kawasan selatan Kabupaten Malang. Poin-poin di dalam metode pendekatan dan metode analisa sangat membantu sekali mempermudah Bappeda dalam pelaksanaan persiapan pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang.

2. Perencanaan

Dalam tahapan perencanaan ini, rencana dari pengembangan wilayah di sepanjang jalan lintas selatan mencakup beberapa rencana pengembangan yang meliputi arahan pengembangan wilayah secara umum, antara lain:

a. Pemukiman

Pada perencanaan pengembangan pemukiman, pada lahan pertanian yang sudah ada harusnya dipertahankan tetap sebagai lahan pertanian, dengan kata lain tidak mengubah fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Arahan dalam pengembangan wilayah pada tahapan perencanaan di kawasan selatan Kabupaten Malang masih berupa hutan dan lahan pertanian. Menunjang pengembangan pemukiman sebagai embrio pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru yang akan sangat penting dalam rangka membina pemerataan pembangunan daerah, pemanfaatan sumber daya alam secara terarah dan kepada keamanan dan pertahanan (Jayadinata, 1999:198). Oleh karena itu lahan untuk pemukiman bisa dititikberatkan pembangunannya pada pemanfaatan lahan sekitar jalan lintas selatan yang bukan merupakan lahan pertanian. Menurut Parlingungan

(1992:41), khusus untuk perencanaan sesuatu pengembangan wilayah perlu diperhatikan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan keterbatasan ruang maka perencanaan pengembangan wilayah harus memperhatikan masalah pemukiman

b. Pertanian dan Perkebunan

Dalam kaitannya dengan pola penggunaan tanah, pertanian di empat wilayah kecamatan pada kawasan pengembangan jalan lintas selatan masih cukup mendominasi. rencana perkembangan kegiatan pertanian pada seluruh kawasan sepanjang jalan lintas selatan:

1. Penggunaan sistem pertanian secara bergilir
2. Mencegah alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian
3. Perlindungan lahan sawah
4. Perlindungan lahan hutan dari terjadinya alih fungsi dengan pengembangan buffer zone area
5. Perbaikan dan pengembangan irigasi

Dalam perencanaan wilayah keseluruhan (regional planning) dapat dipergunakan metode pengembangan wilayah pedesaan, yang dilakukan dengan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk dengan mengembangkan pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok penduduk (Catanese dan Snyder, 1992:50).

c. Perikanan

Usaha-usaha pengembangan sektor perikanan tidak berkembang merata di tiap zoning. Pada kawasan pengembangan jalan lintas selatan, untuk sektor usaha perikanan laut hanya berkembang pada zoning-zoning tertentu yang memiliki potensial tersebut, seperti di pantai Kondang Merak, Sendang Biru, Tamban dan Bajulmati. Menurut Tarigan (2005), Perencanaan tata ruang wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, sejak awal telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk dibangun dan yang akan dijadikan sebagai wilayah

penyangga. Oleh karena itu perikanan harus dititik beratkan pada beberapa zoning di kawasan jalan lintas selatan.

d. Pertambangan

Sumber daya pertambangan yang ada pada beberapa lokasi di wilayah zoning kawasan pengembangan jalan lintas selatan umumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi tambang batu kapur yang cukup berpotensi hampir terdapat di semua zoning yang ada. pengelolaan serta pengembangannya di masa yang akan datang diarahkan agar tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan alam sekitarnya serta perlunya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Alam dan Pihak-pihak swasta lain yang berkaitan.

e. Industri

Semua zoning dalam kawasan pengembangan jalan lintas selatan memiliki potensi hasil perkebunan yang akan datang untuk sektor industri. Sebagian besar industri di kawasan selatan masih berupa industri kecil dengan proses produksinya yang masih sangat sederhana. Terdapat berbagai macam industri di kawasan selatan Kabupaten Malang antara lain: industri pengolahan hasil hutan (kayu jati dan akasia) yang dijadikan meubel dan industri pengolahan hasil perikanan.

f. Pariwisata

pada kawasan pengembangan jalan lintas selatan terdapat jenis pariwisata yang berupa obyek wisata pantai yang potensial dan tersebar di semua zoning dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17 pantai. Oleh karena itu perlunya sarana dan prasarana transportasi, pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana utilitas serta pengembangan informasi/promosi dimana keseluruhan dari kegiatan ini merupakan konsep dari pengembangan wilayah.

g. Pendidikan

Dalam konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya

dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pada kawasan selatan Kabupaten Malang penambahan fasilitas pendidikan yang berupa TK, SD, dan SMP terjadi di semua zoning/desa, sedangkan untuk penambahan fasilitas pendidikan yang berupa SMU hanya terjadi pada zoning Bandungrejo, Sumberbening, Tumpakrejo dan Sitarjo.

h. Kesehatan

kesejahteraan masyarakat di satu wilayah dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan sangat penting dalam konsep pengembangan wilayah, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan suatu daerah. Kebutuhan fasilitas kesehatan ini meliputi: Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Praktek Dokter, Praktek Bidan, Balai Pengobatan, Polindes (Poliklinik Desa), Posyandu, Apotik. Di kawasan pengembangan masih terdapat 1 unit puskesmas, selain itu juga tersebar puskesmas pembantu, posyandu dan polindes hampir di semua zoning.

i. Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan dan jasa yang muncul dan dibutuhkan karena dipengaruhi adanya suatu aktifitas. Pada Kawasan Selatan Kabupaten Malang munculnya perdagangan di sepanjang koridor jalan lintas selatan karena adanya aktifitas (dalam hal ini adanya aktifitas wisata dan perikanan laut), yaitu berupa rumah makan, penginapan, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Pada tahun 2010 penambahan jenis fasilitas warung/kios secara keseluruhan sebesar 146 unit. toko/warung/kios yang ada di kawasan perencanaan pada umumnya merupakan fasilitas perdagangan yang cenderung menyatu dengan rumah penduduk dan terdapat di pusat-pusat pelayanan. Sedangkan untuk jenis pasar yang terdapat di wilayah perencanaan terbagi menjadi dua yaitu pasar tanpa bangunan permanen dan pasar dengan bangunan permanen. Pada tahun perencanaan fasilitas pasar tidak memerlukan penambahan, melainkan hanya

memerlukan peningkatan kondisi secara fisik (menjadi permanen) agar daya tampung aktifitas jual beli menjadi lebih besar sehingga jangkauan pelayanannya pun menjadi lebih luas, atau setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pada skala lokal/desa.

j. Pengembangan Utilitas

Rencana pengembangan sistem utilitas meliputi jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, persampahan dan sistem sanitasi. Pertama yaitu listrik, sebagian besar kawasan yang dilalui pengembangan jalan lintas selatan telah dilayani listrik yang berupa tegangan rendah dan menengah. Namun pada beberapa wilayah tertentu belum terlayani, khususnya di bagian selatan di sekitar wilayah pantai dan jalan lintas selatan. Untuk itu di masa yang akan datang kebutuhan listrik di kawasan perencanaan diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan adanya pengembangan jalan lintas selatan. Dalam memperkirakan kebutuhan listrik di tahun perencanaan, asumsi yang digunakan adalah: rumah tangga, komersial, sosial, kehilangan daya, cadangan, penerangan jalan.

Kedua, jaringan air bersih. Kebutuhan akan air bersih/minum pada sebagian besar kawasan pengembangan belum terlayani oleh PDAM dan hanya sebagian dari zoning Bandungrejo yang sudah terlayani. Pada dasarnya masyarakat di wilayah pengembangan tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan air bersih. Terkecuali untuk zoning Banjarejo, dikarenakan belum dimanfaatkannya sumber air yang ada secara maksimal. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Memanfaatkan sumber air yang dengan membuat sumur pompa (weslick).
2. Pembuatan tandon penampung air bersih.
3. Pipanisasi permanen bagi distribusi air yang menjangkau ke pelosok, khususnya ke wilayah selatan (sekitar pantai dan jalan lintas).

Ketiga, jaringan telepon. untuk mengantisipasi adanya perkembangan kawasan sebagai dampak dari dibukanya jalan lintas selatan, perlu adanya perluasan jaringan serta penyediaan sarana telpon yang menjangkau semua wilayah pengembangan. Pengembangan jaringan pada daerah yang belum terlayani (zoning Desa Sumberoto, Desa Purwodadi, Desa Mentaraman, Desa Kedungsalam, Desa Bandungrejo, Desa Sumberbening, Desa Tumpakrejo, Desa Sindurejo, Desa Gajahrejo dan Desa Tambakrejo).

Keempat, sistem persampahan. Jenis pengolahan sampah didasarkan pada pertimbangan kondisi fisik kawasan maupun pertimbangan biaya yang diperlukan, adalah sebagai berikut: penimbunan saniter, pembakaran, pembuatan kompos, pemanfaatan ulang. Dengan pengolahan tersebut, maka perlu dilakukan pula pemisahan sampah berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik. Pemisahan sampah ini ada gunanya jika disertai dengan peraturan daerah yang sifatnya mengikat, yaitu memberi sanksi/hukuman jika tidak dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah pengembangan jalan lintas selatan.

Kelima, sistem sanitasi. Perkembangan fisik suatu kawasan memerlukan sistem sanitasi yang terencana dan memperhatikan aspek lingkungan. Sistem sanitasi ini merupakan sarana untuk pembuangan air buangan maupun limpasan air hujan. Adapun arahan pengembangan sistem sanitasi di sekitar kawasan pengembangan jalan lintas selatan, selain mengusahakan pengadaan dan peningkatan kondisi saluran air di kiri-kanan jalan sebagai saluran pembuangan air hujan dan limbah rumah tangga, juga dilakukan pengembangan konservasi tanah. Arahan pengembangan untuk sanitasi pada tiap zoningnya adalah sama. Dimana lebih cenderung pada pengembangan jaringannya, yaitu di sepanjang kanan-kiri jalan. Namun pada lokasi yang berdekatan dengan lahan sawah, fungsi salurannya menjadi ganda (sebagai drainase dan sebagai irigasi). Untuk koridor jalan lintas

selatan, sanitasi diarahkan pada pengembangan gorong-gorong seperti yang sudah dilakukan.

Keenam, sistem jaringan jalan. Jalan yang ada di wilayah kecamatan yang dilalui pengembangan jalan lintas selatan meliputi kolektor dan lokal primer. Dimana untuk jenis jalan kolektor tersebut secara fisik sudah berupa hotmik/aspal. Selebihnya untuk jalan lokalnya masih berupa makadam dan tanah serta sebagian beton. Untuk jalan lintas selatan yang telah dibuka, permukaan fisiknya masih berupa tanah dan dapat dilalui kendaraan roda empat dengan kondisi fisik yang bergelombang. rencana pengembangan jaringan jalan desa/sirip yang terhubung dengan jalan lintas selatan pada masing-masing zoning adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan perkerasan jalan.
2. Pengaturan sirkulasi dan pembatasan arus pada jalan sirip terutama untuk arus yang cenderung menyeberang.
3. Pengembangan jalan baru menuju obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan.

Secara umum rencana pengembangan yang dilakukan pada jaringan jalan lintas selatan adalah sebagai penghubung antara Kabupaten Blitar – Kabupaten Malang – Kabupaten Lumajang, dan keberadaan jalan ini akan mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah terutama pada sirip-sirip yang menghubungkan dengan dan antar kawasan potensial (obyek wisata)

2. Kendala yang dihadapi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Bagi pembangunan suatu daerah, pengembangan wilayah perlu untuk diperhatikan tidak hanya dari keberadaannya tetapi juga kualitas perannya. Keberhasilan pembangunan suatu daerah juga keberhasilan daerah dalam mengembangkan wilayahnya pada pembangunan-pembangunan infrastruktur sehingga pertumbuhan dari masyarakat itu jauh lebih pesat dan baik, baik dari segi ekonomi sosial dan budaya.

Dengan kata lain pembangunan infrastruktur itu sebagai penunjang dari pengembangan wilayah. Oleh karena itu, strategi pengembangan wilayah pada saat ini memfokuskan kepada upaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya tidak dipungkiri banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Demikian halnya dengan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, baik kendala datangnya dari faktor internal maupun eksternal.

Kendala dari faktor internal yang dihadapi oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang salah satunya yaitu mengenai masalah Keterbatasan anggaran atau dana. Masalah dana ini memang hampir tidak pernah lepas dijadikan sebagai salah satu kendala di dalam setiap melaksanakan kegiatan. Walaupun jika melihat selama ini dana merupakan bukan suatu kendala yang terlalu menghambat dalam pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, namun hal tersebut masih menjadi sebuah masalah besar ketika DPRD Kabupaten yang selama ini menjadi penyalur dana kegiatan tidak dapat dengan cepat mencairkan dana kegiatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, menanggapi hal tersebut maka penting sekali adanya tanggung jawab dari para penyalur dana kegiatan untuk dapat mencairkan dengan cepat dana yang dibutuhkan supaya pelaksanaan dari kegiatan yang telah diagendakan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Kendala internal Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tidak hanya pada persoalan dana saja. Ketika persoalan dana teratasi ternyata ada persoalan internal lain, yaitu persoalan Rendahnya kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dipergunakan untuk pengembangan wilayah dalam penertiban izin lokasi pembangunan, sehingga kurang dapat mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan dinamis. Perencanaan pengembangan wilayah yang sudah disusun oleh para tenaga ahli dengan memperhitungkan

kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah pengembangan dalam bentuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) seringkali hanya sebagai dokumen dan tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan secara matang dan kuat. Dengan kata lain, pengembangan wilayah bisa berjalan lambat.

Adapun kendala yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang terdapat beberapa kendala. Pertama, Potensi sosial yang dimiliki kawasan perencanaan terkait dengan pembebasan tanah di sepanjang jalan lintas selatan, yaitu tanah tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai sektor pertanian lahan kering/tegalan, perkebunan, industri, maupun pariwisata. Permasalahan utama yang terkait dengan pembebasan tanah di sepanjang jalan lintas selatan adalah Masalah pembebasan tanah yang terkait dengan harga tanah yang tidak sesuai dengan permintaan pemilik tanah. Penentuan harga tanah oleh pemerintah didasarkan pada nilai pajak atas tanah. Sedangkan pemilik tanah merasa harga yang ditentukan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi pasar. Untuk itu Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang untuk kedepannya sebaiknya diperlukannya pengarahannya maksimal terhadap masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang, dimana pengarahannya dilaksanakan untuk penetapan ganti rugi atas pembebasan tanah. Pengarahannya bisa dilaksanakan dengan jalan musyawarah, dalam musyawarah pihak dari masyarakat dan pihak panitia merupakan proses penerimaan aspirasi masyarakat agar terjadi suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian atas pembebasan lahan. Selain itu Menghadapi hal ini, perlunya pembentukan panitia pengadaan tanah kabupaten. Dimana pembentukan panitia pengadaan tanah kabupaten ini dibentuk agar proses pembebasan lahan bisa berjalan tanpa merugikan kedua belah pihak, baik dari pemerintah kabupaten maupun masyarakat itu sendiri. Selain itu perlunya aturan Perpres 65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai landasan penguat dari upaya bappeda Kabupaten Malang dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang, sehingga proses pembebasan lahan bisa berjalan dengan lancar.

Kedua, adalah dimana sebagian besar lahan yang dilalui jalan lintas selatan ini adalah milik Perhutani. Permasalahan yang dihadapi adalah jalan lintas selatan terbentuk dengan cara membuka lahan di dalam hutan. penyelesaian ganti rugi dengan Perhutani menyangkut juga menjadi kendala. Oleh karena itu untuk kedepannya dalam penyelesaian pembebasan lahan dengan Perhutani bisa dilakukan dengan mekanisme tukar guling. Proyek jalan lintas selatan merupakan proyek skala nasional sehingga pemerintah pusat memberikan kewenangannya ke daerah untuk melaksanakan pengadaan tanah, maka tukar guling dapat dilaksanakan apabila dalam proyek tersebut terdapat aset negara. Jika Bappeda Kabupaten Malang berhasil membebaskan lahan untuk pengganti tanah Perhutani, secara logika tanah Perhutani yang dimanfaatkan untuk proyek jalan lintas selatan itu menjadi aset Kabupaten Malang.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Paradigma baru Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan menajukan daerahnya. Otonomi daerah yang dicangkan tersebut juga diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan perkembangan wilayah pada tiap daerah di Indonesia.

Keberhasilan dan kegagalan dalam kegiatan pengembangan wilayah sangat dipengaruhi dan tergantung pada peranan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan fungsi perencanaan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berfungsi untuk merumuskan rencana-rencana pembangunan. Dalam upaya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di wilayah selatan Kabupaten Malang, sangat luas sekali aspek-aspek yang dipaparkan dalam penyajian data. Sebagai *starting point* yang terpenting dari pembangunan *integrated* di wilayah selatan adalah kebutuhan akan struktur pemanfaatan dan pengendalian ruang yang serasi dan seimbang sehingga tercapai pengembangan wilayah yang terpadu dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

1. Pada tahapan persiapan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang lebih memaksimalkan dalam optimalisasi skenario optimis terhadap jalan lintas selatan. Dimana skenario tersebut ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan pada tahapan persiapan menuju ke tahapan perencanaan. Skenario dalam pengembangan wilayah dibagi menjadi tiga skenario pengembangan, yaitu: skenario optimis, skenario pesimis dan skenario moderat.

2. untuk membantu mempermudah Bappeda dalam pelaksanaan persiapan pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang, maka digunakan pendekatan-pendekatan pada tahapan persiapan, beberapa diantaranya merupakan bagian penting dalam proses tahapan persiapan, yaitu: pendekatan pola kebijaksanaan, pendekatan perencanaan berkelanjutan, pendekatan masyarakat, serta pendekatan intersektoral. Dimana keempat pendekatan ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
3. Dalam tahapan perencanaan, rencana dari pengembangan wilayah di sepanjang jalan lintas selatan mencakup beberapa rencana pengembangan yang meliputi konsep pengembangan wilayah secara umum, antara lain: pemukiman, pertanian dan perkebunan, perikanan, pertambangan, Industri, dan Pariwisata. Sedangkan konsep pengembangan wilayah di sepanjang koridor jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang ditujukan karena adanya kecenderungan perkembangan kegiatan perkotaan yang terus bergerak ke arah selatan, perubahan dan perkembangan yang signifikan akan terjadi terkait dengan pengembangan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa/zoning. Yang dalam hal ini pengembangan potensi dan sumber daya tersebut tentunya juga dilaksanakan dengan pengembangan segala jenis fasilitas, utilitas, serta infrastruktur penunjang yang diperlukan.
4. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang, maka otomatis akan mempercepat laju pertumbuhan masyarakat. Dilihat dari *side effect* tersebut, maka perencanaan pembangunan fasilitas dan utilitas sangat diperlukan dalam tahapan perencanaan.
5. Terdapat kendala internal dan eksternal dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang. Adapun kendala internal yaitu, Rendahnya kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dipergunakan untuk

pengembangan wilayah dalam penertiban izin lokasi pembangunan. Dan Keterbatasan anggaran. Sedangkan kendala eksternal yang ada berupa, pertama, pembebasan tanah di sepanjang jalan lintas selatan. Kedua, hampir sebagian besar lahan yang dilalui proyek pembangunan jalan lintas selatan ini merupakan milik dari Perhutani.

B. Saran

Berdasarkan gambaran upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan oleh penulis antara lain:

1. Kabupaten Malang memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten harus dapat menggali potensi daerah secara tepat guna pengembangan daerah, oleh karena itu sebagai penunjang akses di wilayah selatan Kabupaten Malang maka dibangun jalan lintas selatan. Dikarenakan jalan lintas selatan diperlukan sebagai sarana penunjang kegiatan baik dari masyarakat dalam maupun luar wilayah Kabupaten Malang untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu perlunya dipercepat penyelesaiannya pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang.
2. Adapun wilayah dari pengembangan wilayah pada pembangunan infrastruktur jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang ini berupa lahan hutan. Sebagai daerah resapan air maka tetap harus mendapat prioritas penting dan juga perlunya diperhatikan keseimbangan lingkungan hidup pada pengembangan wilayah di kawasan selatan Kabupaten Malang.
3. Perlu adanya kerjasama yang baik antara Bappeda Kabupaten Malang dengan Perhutani, dimana wilayah yang dilalui proyek jalan lintas selatan ini sebagian besar lahan hutan milik perhutani. Oleh karena itu perlunya komunikasi yang kuat sehingga kerjasama antara Bappeda

dengan Perhutani bisa berhasil dan jalan lintas selatan bisa terselesaikan dengan cepat.

4. Agar pengembangan wilayah dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan. Begitu juga di sepanjang koridor jalan di kawasan selatan Kabupaten Malang, rencana pembangunan fasilitas dan utilitas sangat diperlukan guna meningkatkan sumber daya manusia. Maka, Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan mampu merealisasikan pembangunan fasilitas dan utilitas di wilayah selatan Kabupaten Malang.
5. Perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penggerak pembangunan sebaiknya dapat pula menggugah masyarakat untuk turut menyukseskan pembangunan. Oleh sebab itu perlu adanya kemitraan antara pemerintah dan swasta. Pemerintah sebaiknya dapat menjadi fasilitator yang baik bagi masyarakat, selain itu juga, pemerintah dapat menjadi fasilitator bagi swasta yang berminat untuk menanamkan modal yang nantinya tentu akan berimbas pada keberhasilan pengembangan wilayah.
6. Bappeda Kabupaten Malang harus lebih intensif dalam melakukan sosialisasi pembangunan infrastruktur jalan terhadap warga masyarakat di kawasan selatan Kabupaten Malang, dimana sosialisasi ini diharapkan mampu menyelesaikan kendala dari faktor masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, Sofwan. 1983. *Konsep-Konsep Dasar Administrasi : Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan*. PT. Bina Aksara : Jakarta.
- Catanese, A dan Snyder, JC. 1992. *Perencanaan Kota*. PT. Erlangga : Jakarta.
- Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Dirjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2003. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia, diakses pada tanggal 5 Maret 2009 melalui http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/DirjenPR_STT-NASYogya.pdf.
- Ginandjar. 2006. Perkembangan Pemikiran Mengenai Administrasi Pembangunan, diakses pada tanggal 11 Februari 2009 melalui <http://www.ginandjar.compublications/microsoft%20word%20%2006perkeembangan-emikiran.pdf>.
- Harahap, Johan S. 2008. Pemikiran Dalam Merencanakan Pembangunan Kabupaten, diakses pada tanggal 11 februari 2009 melalui <http://lahmuddinsiregar.wordpress.com/berita-padang-lawas/>.
- Jayadinata, J.T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. ITB : Bandung.
- Kamaluddin. 2003. *Ekonomi Transportasi : Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*. PT. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Karmansyah, R. 1986. *Perencanaan Regional*. CV. Karunika : Jakarta.
- Kasru Susilo. 2005. Kebijakan Pengembangan Wilayah Di Masa Yang Akan Datang Dan Implikasinya Terhadap Kebutuhan Analisis Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis, diakses pada tanggal 15 Februari 2009 melalui <http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/Prospek%20GIS-ITB.pdf>.
- Katz, Saul M. 1985. *Modernisasi Administrasi untuk Pembangunan Nasional*. PT Bina Aksara : Jakarta.
- Koestoer, R, dkk. 2001. *Dimensi Keruangan Kota*. Universitas Indonesia : Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Pemikiran dan Praktek Perencanaan Dalam Era Transformasi di Indonesia (Kumpulan Makalah Terpilih Seminar Plano 42 Departemen Teknik Planologi ITB).

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 1996, Tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Propinsi Jawa Timur.

Pasolong, Harbany. 2007. *Teori Administrasi Publik*. PT. Alfabeta : Bandung

Parlindungan, AP. 1993. *Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang*. CV. Mandar maju : Bandung.

Putra. 2009. Konsep Pengembangan Wilayah Dalam Perencanaan Pembangunan, diakses pada tanggal 19 Maret 2009 melalui <http://putracerter.word-press.com/?s=pengembangan+wilayah>.

Riggs, Fred W. 1986. *Administrasi Pembangunan : Batas-Batas Strategi Pembangunan, Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. CV. Rajawali : Jakarta.

..... 1989. *Administrasi Pembangunan : Sistem Administrasi dan Birokrasi*. Jakarta : Rajawali Press

Riyadi, Suprpto. 2003. *Administrasi pembangunan*. UM Press : Malang.

Said, Abdullah. 1996. *Pengembangan Wilayah Dilihat Dari Sektor Industri Perhotelan di Kota Batu*. FIA Universitas Brawijaya : Malang.

Siagian, Sondang P. 1988. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. CV. Haji Masagung : Jakarta.

..... 2005. *Administrasi pembangunan*. Bumi Aksara : jakarta.

Sulistiono. 2008. Konsep Wilayah dan Pusat Pertumbuhan Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah, diakses pada tanggal 11 Februari 2009 melalui <http://www.damandiri.or.id/file/sulistionoipbbab2.pdf>.

Suprayogo, Imam ; Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. UM Press : Malang.

Suwirno, Sadono. 1985. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. LPFE UI : Jakarta.

Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. CV. Rajawali : Jakarta.

Syafiie, Drs. H. Inu Kencana, Msi. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Perencanaan Pembangunan*. PT. Gunung Agung : Jakarta.

..... 1987. *Manajemen Pembangunan*. CV. Haji Masagung : Jakarta.

..... 1988. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. PT. Kincir Buana : Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960 No. 3034.

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Tentang Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang.

Wiroatmadja, Piran, dkk. 2001. *Pembangunan Daerah, Sektor dan Nasional : Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III*. Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.

INTERVIEW GUIDE

Peneliti : Muhammad Arief R.
Tujuan : Penelitian Skripsi
Sasaran : Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang
Materi : Upaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Malang (Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Selatan Kabupaten Malang)

1. Bagaimana upaya Bappekab dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Malang, dilihat dari sudut pandang tahap persiapan?
2. Bagaimana proses penyusunan rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Malang pada tahapan perencanaan?
3. Dalam pengembangan wilayah di sekitar jalan lintas selatan Kabupaten Malang, selain dari pihak Bappekab sendiri, adakah pihak-pihak lain yang terkait dengan pengembangan wilayah di jalan lintas selatan Kabupaten Malang ini?
4. Apa saja langkah upaya dalam pengembangan wilayah di kawasan selatan Kabupaten Malang?
5. Bagaimana alur konsep pengembangan jalan lintas selatan?
6. Bagaimana proses persiapan dan sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepada masyarakat?
7. Pada tahapan persiapan, didapati skenario pengembangan. Apa fungsi dari skenario pengembangan ini?
8. Dalam perencanaan Bappekab, ternyata tidak hanya pembangunan infrastruktur jalan lintas selatan saja yang diutamakan, tetapi pembangunan-pembangunan yang lain. Apa saja bentuk dari pembangunan-pembangunan selain pembangunan infrastruktur jalan lintas selatan itu sendiri?
9. Apa saja kendala internal pada upaya Bappekab dalam pengembangan wilayah?

10. Apa saja kendala eksternal pada upaya Bappekap dalam pengembangan wilayah?

